PROSES INTEGRASI SOSIAL MASYARAKAT MAJEMUK

(Sebuah Studi Pada Masyarakat Transmigrasi di Kecamatan Landono)

IRMA IRAYANTI
Nomor Registrasi : G2G108059
Program studi : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS HALUOLEO
2010

ABSTRACT

Irma Irayanti, SID G2G1 08 059, Research title "Social Integration Pocess of Complex Society (A study on Landono Society)". Dengan Supervisor I: Dr. Rivai Nur, M.Hum; Supervisor II: Drs. Sundi Komba, M.Si.

This explanatory study aims to know empirically about the social integrasi process of complex cociet in District of Landono of South Konawe Regency as the representation of complex society's life in Indonesia. In particular, it aims to know deeper about the picture of social integration process in a society, its supporting factors and its barriers as well as the effort in improving the social integration in Landono.

This descriptive qualitative, by using phenomenological and functional structural approach, focused on the process of society's social life in terms of integration among Tolakinese as the indigenous ethnic, transmigrant society and other newcomers in the district. Data was collected through in-depth structured interview, observation and documentation.

This study found that (1) The society in District of Landono, the blend of Tolakinese, Javanese and Balinese transmigrants and other newcomers, is the realization of complex society which consists of various ethnic, religion, language and culture. (2) Integration process of complex society in Landono is influenced by the following factors (a) Cultural factor which is rooted from nation cultural values as stated in Pancasila values (b) Familial relationship through inter-ethnic marriage (c) Society's obedience to the government officials so that ethnical issue can be neutralized by local wisdom tradition (3) Conflict is considered as the barrier in society's integration process in District of Landono (4) In improving society's social integration, Local government socialized Minister of Religious Affairs and Minister of Regional Affairs' Decree No. 9 Year 2006 and No. 8 Year 2006 about maintaining tolerance through social and cultural system approach that can lead to harmonious life of people in District of Landono.

Based the result of the study, it can be concluded that people in District of Landono can integrate well in the complexity of life in that society.

Keywords : Social Integration and Complex Society.

ABSTRAK

Irma Irayanti, Nomor stambuk G2G1 08 059, Judul Penelitian "Proses Integrasi Sosial Masyarakat Majemuk (Sebuah Studi Pada Masyarakat Landono)". Dengan pembimbing pertama Dr. Rivai Nur, M.Hum dan pembimbing kedua Drs. Sundi Komba, M.Si.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana gambaran proses integrasi sosial masyarakat Kecamatan Landono?, (2) Faktor-faktor apakah yang mendukung integrasi sosial masyarakat Kecamatan Landono?, (3) Faktor-faktor apakah yang menghambat integrasi sosial Kecamatan Landono?, (4) Bagaimana upaya peningkatan integrasi sosial masyarakat Kecamatan Landono?.

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empirik bagaimana proses integrasi sosial masyarakat majemuk di Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan sebagai gambaran kehidupan masyarakat majemuk di Indonesia. Sedangkan Tujuan khususnya adalah ingin mengetahui secara mendalam bagaimana gambaran proses integrasi sosial masyarakat, faktor pendukung dan penghambat integrasi sosial dan bagaimana upaya peningkatan integrasi sosial masyarakat Kecamatan Landono.

Penelitian yang bersifat eksplanatoris ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Melalui pendekatan fenomenologi dan struktural fungsional, memusatkan telaahnya pada proses kehidupan sosial masyarakat dalam upaya untuk berintegrasi diantara masyarakat asli Tolaki, masyarakat transmigran dan pendatang lain di daerah tersebut. Untuk dapat menemukan dan mendeskripsikan serta menjelaskan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara terarah yang mendalam, observasi, dokumentasi.

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa (1) Masyarakat Kecamatan Landono merupakan pembauran antara masyarakat asli Tolaki, transmigran asal Jawa-Bali dan pendatang lain merupakan perwujudan dari masyarakat majemuk yang memiliki keragaman etnis, agama, bahasa dan budaya. (2) Proses integrasi masyarakat majemuk di Landono di dukung oleh faktor-faktor sebagai berikut (a) Faktor budaya yang berasal dari nilai-nilai budaya yang bersumber dari akar kebudayaan bangsa yang tertuang dalam nilai-nilai Pancasila (b) Faktor kekerabatan melalui perkawinan antar suku bangsa yang berbeda (c) Faktor kepatuhan masyarakat pada pejabat pemerintahan sehingga setiap permasalahan yang dapat bersinggungan dengan keberadaan etnis tertentu dapat segera dinetralisir lewat kearifan lokal setempat (3) Konflik dianggap sebagai faktor penghambat dalam proses integrasi masyarakat di Kecamatan Landono (4) Upaya Pemerintah Kecamatan Landono dalam peningkatan integrasi sosial masyarakat dilakukan lewat sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 untuk mengembangkan toleransi melalui pendekatan sistem sosial dan sistem budaya sehingga tercipta kerukunan hidup masyarakat Kecamatan Landono

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Landono dapat terintegrasi dengan baik di tengah kemajemukan yang ada di daerah tersebut.

Kata kunci : Integrasi Sosial dan Masyarakat Majemuk.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, adat-istiadat dan agama. Menurut Yaqin (2005 : 203-205) saat ini setidaknya penduduk Indonesia terdiri dari 101 suku (kelompok etnis) yang tersebar di seluruh nusantara dengan keadaan/geografis yang membagi wilayah Indonesia atas kurang lebih 17.508 pulau terdiri atas berbagai suku, bahasa, adat istiadat dan agama. Keanekaragaman sosial budaya, merupakan realitas alamiah yang dimiliki tanah air kita sehingga bangsa Indonesia disebut sebagai masyarakat yang majemuk. Keanekaragaman ini, merupakan kenyataan yang harus kita terima sebagai khzanah kekayaan bangsa, namun disisi lain di dalam keanekaragaman dan pluralitas suku, bahasa, adat istiadat dan agama juga mengandung kerawanan-kerawanan yang dapat menimbulkan konflik-konflik kepentingan antar kelompok, antar etnis, antar agama dan antar wilayah (Zubir, 2001 : 47).

Tiap kesatuan suku bangsa terdiri dari sejumlah orang yang dipersatukan oleh ikatan-ikatan emosional, serta memandang diri mereka masing-masing sebagai suatu jenis tersendiri. Dengan perkecualian yang sangat kecil, mereka pada umumnya memiliki bahasa dan warisan kebudayaan yang sama. Lebih daripada itu, mereka biasanya mengembangkan kepercayaan bahwa mereka memiliki asal-usul keturunan yang sama, suatu kepercayaan yang seringkali di dukung oleh mitos-mitos yang hidup di dalam masyarakat (Tomatsu Shibutani, 1963 : 39-40).

Masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai budaya secara logis akan mengalami berbagai permasalahan, persentuhan nilai-nilai budaya sebagai manifestasi dinamika kebudayaan tidak selamanya berjalan secara mulus. Permasalahan silang budaya dalam masyarakat majemuk (heterogen) dan jamak (pluralistis) seringkali bersumber dari masalah komunikasi, kesenjangan tingkat pengetahuan, status sosial, geografis, adat kebiasaan dapat merupakan kendala bagi tercapainya suatu consensus yang perlu disepakati dan selanjutnya ditaati secara luas. Ditambah lagi dengan posisi Indonesia sebagai negara berkembang, akan selalu mengalami perubahan yang pesat dalam berbagai aspek kehidupan. Persentuhan antar budaya yang terjadi secara dinamis dalam proses tawar menawar bisa mewujudkan perubahan tata nilai yang tampil sekedar sebagai pergeseran *(shift)* antar nilai, atau peresengketaan *(conflict)* antar nilai atau bahkan dapat berupa benturan *(clash)* antar nilai tersebut.

Kebudayaan Etnis yang kadangkala sedemikian kuat membelenggu, perlu dipahami sebagai kebudayaan sekumpulan individu yang bersatu kedalam etnis tertentu oleh karenanya permasalahan silang budaya, hanya dapat terjembatani dengan pemahaman bahwa keutuhan suatu bangsa dapat terbentuk dengan kesadaran setiap individu dan kesadaran setiap etnis yang terhimpun dalam suatu bangsa , sehingga perlu membina kesadaran individu dan kesadaran etnis sebagai himpunan individu.

Masyarakat Indonesia memiliki karakteristisk yang cukup unik, di mana pluralitas menjadi ciri utama. Kemajemukan di satu sisi diakui sebagai aset masyarakat, tetapi di sisi lain menimbulkan konflik yang dipicu oleh perbedaan yang ada pada masyarakat.

Sejak awal abad ke-20, struktur masyarakat majemuk Indonesia mulai terbangun dengan muculnya “ide nasionalisme” di setiap pergerakan masyarakat majemuk Indonesia. Masyarakat majemuk Indonesia terbangun bukan berdasarkan konsepsi masyarakat majemuk sebagaimana yang digambarkan oleh J.S Furnivall (1967 : 446-469), tetapi menjadi masyarakat majemuk yang “Bhineka Tunggal Ika” yaitu sebuah masyarakat bangsa yang terdiri dari berbagai kelompok suku bangsa dengan hak kulturalnya masing-masing. Slogan tersebut secara prinsip memberikan penjelasan bahwa meskipun masyarakat bangsa Indonesia secara sosio-kultural terdiri dari berbagai suku-bangsa, namun hak kultural masing-masing suku-bangsa adalah sama, dan secara politik mereka semua adalah mengakui berada di bawah naungan negara Republik Indonesia.

Abad ke-21 melahirkan tantangan beragam. Isu globalisasi, demokratisasi, pluralisme dan dalam keadaan tertentu berbagai benturan kebudayaan diramalkan akan terjadi. Tokoh agama dan masyarakat sesungguhnya mempunyai peran-peran strategis di era global tersebut dan dakwah Islam mempunyai cita moral dalam pembangunan peradaban manusia. Saat ini kehidupan bergerak begitu cepat ke arah pluralitas dengan beragam budaya bahasa dan agama, sebagai akibat dari perkembangan modernisasi, liberalisasi dan globalisasi. Di tengah gemerlap perubahan yang dahsyat itu, bangsa Indonesia memperlihatkan sebaliknya, yakni kekerasan, hilangnya toleransi (*zero tolerance*) dan konflik (Idris, 2008 : 4). Konflik muncul, sebagian besar dipicu oleh minimnya pemahaman keberagamaan, keanekaragaman etnik dan budaya yang pluralistik.

Ide mendatangkan transmigrasi di daerah Kendari telah ada sejak penjajahan Belanda yaitu tahun 1938 (Thalha dalam Nur, 1999 : 72), pada saat itu Landono masih masuk dalam onder Afdeling Kendari (Thalha, 1982: 301-302). Pengadaan transmigrasi petani sawah asal Sulawesi Selatan yang terdiri dari etnis Bugis, Makassar dan Mandar untuk tujuan peningkatan produksi beras dan alih teknologi. Para transmigran tersebut di tempatkan di Konda, kurang lebih 10 Km kearah selatan Kota Kendari (Nur, 1999 : 71-73). Dengan kedatangan transmigran ini, dapat diketahui bahwa sebenarnya orang Tolaki di Kendari telah mengalami *transfer skill and technology* dalam bidang pertanian sejak tahun 1938.

Walaupun kedatangan para transmigran asal Sulawesi Selatan telah menggeser pola pertanian orang Tolaki di Kendari, namun belum memberikan kontribusi apa-apa terhadap orang-orang Tolaki di Landono. Hal ini disebabkan oleh jarak antar Konda dan Landono yang relatif jauh yaitu ± 40 Km serta susahnya sarana transportasi saat itu. Oleh karena itu, pada tahun 1970 Landono dijadikan salah satu daerah tujuan Transmigrasi di Sulawesi Tenggara dalam upaya pemerataan persebaran penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ditolak atau diterimanya warga transmigran oleh penduduk lokal dalam hal ini adalah orang Tolaki Landono, senantiasa berkaitan dengan ada atau tidaknya pembauran diantara kedua kelompok masyarakat itu. Selain itu, program transmigrasi juga berfungsi sebagai sarana peningkatan baik taraf hidup, cara, hidup, maupun ketrampilan penduduk setempat. Fungsi itu dapat tercapai apabila para transmigran dan penduduk lokal telah terjadi integrasi sosial sebagai dasar adopsi, adaptasi dan proses akulturasi. Proses ini dapat terjadi oleh adanya jalinan hubungan diantara mereka yang menimbulkan kekuatan

baru, yaitu kekuatan yang dapat mempererat hubungan antara sesama, saling menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam konteks masyarakat transmigrasi di Sulawesi Tenggara, sebagaimana tipologi masyarakat daerah lain di Indonesia memiliki pluralitas yang tinggi dalam budaya, sebab secara demografi daerah transmigrasi dihuni oleh beragam etnik yang dibawa oleh masyarakat transmigrasi sebagai warga pendatang dan penduduk lokal yang merupakan penduduk asli daerah tersebut. Keragaman tampak dalam ikatan kesukuan, bahasa, etnis budaya, agama, dan berbagai varian lainnya.

Selain masyarakat transmigrasi dan penduduk asli Tolaki, Landono juga di huni oleh pendatang lain yang bermigrasi bukan melalui program transmigrasi melainkan karena adanya oleh faktor pendorong, yaitu mencari pekerjaan dan peningkatan taraf hidup. Hal ini disebabkan oleh kesulitan ekonomi yang dialami di daerah asal, mereka tidak mempunyai pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan mereka secara layak. Kebanyakan dari masyarakat migran tersebut berasal dari daerah yang berbeda-beda, seperti Buton, Muna, Bulukumba, Jeneponto, Pinrang, Luwu, Toraja, dan beberapa daerah lain di Sulawesi Selatan.

Dengan kedatangan para transmigran dan para pendatang lain, membuat Landono memiliki tingkat kemajemukan yang relatif tinggi, meliputi suku, agama dan kebudayaan. Setidaknya terdapat sepuluh suku di dalam masyarakat Landono yaitu Tolaki, Bali, Jawa, Madura, Sunda, Buton, Muna, Bugis, Toraja dan Makassar yang tersebar di seluruh Kecamatan Landono. Sementara dari segi agama terdapat tiga agama yang dianut masyarakat yaitu Islam, Hindu, dan Kristen Protestan. Dengan

jumlah sarana ibadah sebanyak 24 mesjid, 8 surau, 3 gereja Kristen Protestan dan 14 pura. Agama Islam merupakan agama mayoritas penduduknya dengan 76,78 % kemudian Hindu dengan 21,13 % dan Kristen Protestan dengan 2,09 % sedangkan agama Kristen Katholik dan Budha masing-masing 0 %. Dari adanya kemajemukan suku bangsa dan agama maka secara tidak langsung masyarakat Landono juga memiliki kemajemukan budaya yang dibawa oleh masing-masing etnis. Susunan masyarakat majemuk seperti itu, merupakan suatu kondisi yang rentan terhadap konflik, dalam proses pembauran antara penduduk asli Tolaki dengan para transmigran dan pendatang lain. Namun demikian, masyarakatnya hidup berdampingan dan proses integrasi di kecamatan tersebut berjalan dengan baik walaupun terdapat riak-riak konflik namun hal itu tidak mengganggu keharmonisan hidup di masyarakatnya.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana proses integrasi sosial masyarakat majemuk yang ada di Landono?

Untuk mendapatkan jawaban yang tuntas terhadap permasalahan pokok tersebut diperlukan penjabaran dalam bentuk pertanyaan penelitian yang dirumuskan sebagai berikut:

a. Bagaimana gambaran proses integrasi sosial masyarakat Kecamatan Landono?
b. Faktor-faktor apakah yang mendukung integrasi sosial masyarakat Kecamatan Landono?

c. Faktor-faktor apakah yang menghambat integrasi sosial masyarakat Kecamatan Landono?

d. Bagaimana upaya peningkatan integrasi sosial masyarakat Kecamatan Landono?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empirik proses integrasi sosial pada masyarakat majemuk di Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan sebagai gambaran kehidupan masyarakat majemuk di Indonesia.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui secara mendalam gambaran proses integrasi sosial masyarakat Kecamatan Landono.

b. Untuk mengetahui faktor pendukung integrasi sosial masyarakat Kecamatan Landono.

c. Untuk mengetahui faktor penghambat integrasi sosial masyarakat Kecamatan Landono.

d. Untuk mengetahui upaya peningkatan integrasi sosial masyarakat Kecamatan Landono.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Pertama, sebagai informasi atau referensi dan data banding bagi para peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis.

Kedua, sebagai upaya pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang sosial dan kewarganegaraan.

2. Kegunaan Praktis

Pertama, bagi para penentu kebijakan, khususnya pihak-pihak terkait seperti Pemerintah Daerah dan Departemen Transmigrasi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai data atau informasi penting guna melakukan upaya-upaya preventif bagi kemungkinan terjadinya konflik agar hubungan harmonis antar masyarakat tetap terpelihara.

Kedua, bagi masyarakat pada umumnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi upaya menjadikan masyarakat hidup dengan rukun, damai dan adil, serta memiliki rasa tanggung jawab dalam hidup bersama di tengah pluralitas kultur dan agama. Orang yang memiliki rasa tanggung jawab tidak akan melakukan perbuatan semena-mena yang merugikan dirinya dan orang lain. Ia merasa bertanggung jawab agar tugasnya terlaksana dengan baik. Ia jujur dan berani untuk menunjukkan siapa dirinya dan untuk menyatakan keyakinannya. Kejujuran adalah keutamaan yang amat mendasar dalam kehidupan bersama, dan untuk bisa bekerjasama orang harus bisa saling mempercayai. Adanya rasa saling percaya menumbuhkan sikap adil dalam masyarakat. Keadilan merupakan keutamaan yang

paling mendasar dalam kehidupan antar manusia. Bersikap baik tetapi dengan melanggar keadilan, tidak akan dikatakan baik. Keadilan juga memungkinkan manusia menyelesaikan konflik dan perselisihan secara damai dan beradab serta lebih memupuk rasa nasionalisme, mengembangkan perasaan sebangsa dan setanah air diatas perbedaan suku, agama dan adat.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Pola tingkah laku yang melekat pada masyarakat Landono yang merupakan pembauran dari masyarakat lokal, transmigran dan pendatang lain, tergambar dari tindakan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang tampak sekarang merupakan hasil dari suatu perubahan sosial budaya yang telah terjadi dan dialami oleh mereka sejak awal. Untuk lebih mengetahui lebih mendalam tentang perubahan itu, maka secara bersamaan hendaklah dipahami tentang terjadinya perubahan stuktur masyarakat yang berkelanjutan. Dan, perubahan sistem nilai budaya yang dianut dan dimengerti oleh orang yang mendukung budaya itu. Hubungan timbal balik antara kedua aspek yang saling mempengaruhi perlu dikenal secara tepat untuk memahami perubahan yang tejadi dalam berbagai perantara sosial budaya pada suatu suku bangsa (Smelser, 1971 : vi).

Hal yang menarik kemudian dinyatakan Pierre L. van den Berghe dalam Leo Kuper dan M.G. Smith (1969 : 67-68) seputar ciri dasar dari masyarakat majemuk seperti yang terjadi pada masyarakat Landono, yaitu : (1) terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki subkebudayaan yang berbeda-beda satu sama lain; (2) memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat nonkomplementer; (3) kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar; (4) secara relative seringkali mengalami konflik-konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain; (5) secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan

(*coercion*) dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi; (6) adanya dominasi politik oleh suatu kelompk atas kelompok-kelompok yang lain.

Mengungkap perubahan struktur masyarakat di satu pihak dan perubahan sistem nilai pihak lain memberi arti yang penting pada pemahaman sitem nilai budaya yang dianut. Pengertian itu dapat ditemukan dan terakomodasi di berbagai perantara sosial budaya masyarakat Kecamatan Landono. Benturan itu menimbulkan pergeseran nilai budaya yang dipercepat oleh adanya orientasi nilai yang berdimensi kognitif. Hal itu akan terbaca dalam berbagai simbol yang telah dimengerti dan dikenal secara baik, berdasarkan arti dan makna simbol yang telah dilegalisasi oleh masyarakat Kecamatan Landono. Keadaan itu terlukis secara jelas dan mewarnai kehidupan mereka sehari-hari sehingga masyarakat Kecamatan Landono menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar ketika menanggapi dan menghadapi berbagai tantangan yang di temui dalam menyongsong berbagai perubahan. Kewajaran itu sangat diperlukan untuk mengenal berbagai perubahan sistem nilai budaya yang tetap bertranformasi dalam konfigurasi budayanya. Pijakan teori secara mendasar perlu dikenal dan digunakan sebagai alat analisis. Teori ini adalah fungsional stuktural (*stuctural-functionalism)*, konflik dan integrasi yang keduanya melandasi penulisan karya ini.

1. Fungsional Struktural

Pendekatan fungsional struktural digunakan secara awal, berdasarkan penglihatan bahwa masyarakat Landono yang terdiri atas masyarakat lokal (tolaki), masyarakat transmigrasi asal Jawa-Bali dan masyarakat pendatang lain yang

merupakan masyarakat majemuk dalam wujud nyata di masyarakat merupakan unit sosial yang sebenarnya saling kait dan bergantung satu dengan yang lainnya secara erat. Penglihatan pada keadaan empirik pada masyarakat majemuk dapat diduga pada awalnya terkait secara dinamik kedalam bentuk equilibrium yang terpadu dan terintegrasi. Bahkan mereka saling berhubungan secara fungsional. Dengan perkataan lain, bagian itu masing-masing mempunyai nilai budaya tersendiri, namun satu dengan lainnya saling mempengaruhi, bersifat ganda, timbal balik dan terikat dalam suatu nilai nasionalisme yang lebih luas.

Disfungsi, ketegangan, dan konfik yang terjadi antara masyarakat majemuk di Landono tidak dapat dielakkan. Namun dalam jangka panjang akan kelihatan, keduanya akan berintegrasi berdasarkan nilai budaya yang telah disepakati oleh pendukung kebudayaan itu melalui penyesuaian dan proses institusionalisasi. Proses ini dapat dilihat secara gradual dalam mengahadapi pengaruh luar yang memperlihatkan berbagai hal yang bersifat penyesuaian.

Dari gambaran tersebut di atas, permasalahan masyarakat Landono dapat dianalisis pada tahapan awal dengan menggunakan teori fungsional struktural *(structural- functionalism)*. Teori itu telah dikembangkan oleh pakar antropologi. A.R Radlliffe-Brown (lihat Staner, 1972 (1968), 13-14 : 285-289) dan Bronislaw Malinowski (Bohannan dan Glazer, 1973 : 272-275). Pendekatan itu dikembangkan berdasarkan cara pandang yang menyamakan masyarakat dengan organisme biologis *(organismic aproach)*. Pikiran yang serupa juga dipakai oleh Herbert Spencer dan Emile Durkheim (Parson, 1972 (1968), 3-4 : 311-319). Akhirnya pendekatan itu

mencapai perkembangan yang sangat populer dan berpengaruh dalam dunia sosiologi yang dimotori oleh Talcold Parsons (Inkeles, 1964 : 34).

Untuk jelasnya, Radiliffe-Brown menyatakan bahwa : "*the life of a society can be conceived of as a dynamic fiduicary sytem of interdependent element, functionally consistent with one another"* (Stanner, 1972 (1968), 13-14 : 287). Selanjutnya dinyatakan bahwa hubungan di antara anggota dari satu group masyarakat selalu disebutkan dalam pernyataan : *"unity", "harmony", "consisteney", atau solidarity*", bahkan secara tegas dikatakan : "*we may define it as a conditional in which all parts of the social system work together with a sufficient degree harmonyor internal consistency...*" (Radeliffe- Brown, 1952 : 181). Di samping itu, Malinowski dalam berbagai tulisannya menyatakan bahwa element kebudayaan di dalam suatu masyarakat menurut pandangan fungsional : *" denotes a relationship or interdependence between the parts of a large whole, in that if one the elements is changed or removed the others will be affected"* (Hatch, 1973 : 315). Demikian juga pendapat Malinowski tentang integrasi *(integrationalism)* disebutkan melalui pandangan, "*organic presentations*" menghasilkan *"integrations between them*" (lihat selanjutnya tulisannnya tahun 1935, 1961/1922).

Dasar cara pandang kedua pakar antropologi di atas mempunyai kesamaan yang dilakukan oleh pakar sosiologi Parson. Dia juga menyatakan bahwa masyarakat harus dilihat sebagai satu sistem yang komponennya berhubungan, bergantung, dalam saling mengait yang secara fungsional terintegrasi dalam bentuk equilibrium yang bersifat dinamis. Apabila ada pertentangan, akan muncul nilai budaya yang akan mengintegrasikannya. Pemunculan nilai budaya yang melandasi dalam rangka

integrasi masyarakat transmigrasi dan masyarakat lokal juga pendatang lain yang unik serta bagaimana mereka melakukan proses integrasi, perlu ditemukan dan diungkap. Dengan demikian teori struktur fungsional sangat relevan dalam analisis tahapan awal dengan mempergunakan berbagai pandangan dasar untuk mengenal masalah masyarakat majemuk.

Para penganut paham fungsionalisme struktural (Nasikun, 2004 : 13-15) menyatakan bahwa sistem sosial terintegrasi di atas dua landasan yaitu, masyarakat yang terintegrasi di atas tumbuhnya konsensus di antara sebagian besar anggota masyarakat mengenai nilai-nilai kemasyarakatan yang bersifat fundamental dan masyarakat yang terintegrasi oleh karena anggota masyarakat sekaligus menjadi anggota dari berbagai kesatuan sosial. Hal tersebut dikenal dengan *cross cuting affiliations* yaitu adanya loyalitas ganda para anggota masyarakat. Hal ini akan meminimalisir terjadinya suatu konflik karena dengan adanya loyalitas ganda maka konflik yang akan segera dinetralkan.

2. Konflik dan Integrasi

Dalam penelitian antropologi dan sosial, teori konflik dan integrasi juga biasa dipakai. Misalnya fokus penelitian yang dilakukan oleh Malinowski yang dinilai oleh Hatch, (1973 : 313) bahwa *"malinowski's focus on the individual was leading him to the view that social equilibrium or stability is the outcome of competitive self interst".* Demikian juga cara itu digunakan oleh Spradley dan Mecurdy (1930, 1977), dengan istilah *comformity and conflict* dan dalam pendekatan sejarah disebut *conflict and accomodation* (Sutherland, 1976 : 106). Pengamatan konflik dan integrasi yang

difokuskan pada masalah masyarakat majemuk di Kecamatan Landono akan dapat dilihat dinamika keseharian mereka. Berarti konflik dan integrasi melekat pada masyarakat itu sendiri dimana masyarakat lokal dan pendatang merupakan unit dari sistem sosial yang nampak di masyarakat. Pandangan itu menambah kekosongan yang merupakan kekurangan dari teori fungsional struktural utamanya dalam melihat perubahan sosial. Para sosiolog melihat bahwa menggunakan kedua teori ini mempunyai banyak manfaat dalam melihat secara utuh suatu perubahan. Nasikun, berdasarkan pendapat van den Berghe dan Devid Lockwood menyatakan bahwa kedua teori itu saling melengkapi (2004 : 33-34).

Melalui pandangan para sosiolog, maka masalah masyarakat majemuk perlu mendapat penajaman pandangan melalui teori konflik dan integrasi. Karena konflik pada masyarakat majemuk di Kecamatan Landono, apabila dilihat dari teori konflik dan integrasi adalah merupakan konflik sosisal. Struktur sosial itu berhadapan dalam batas terpisah, seimbang, mempunyai aspek yang sama, setara dalam realitas dan seimbang dengan kekuatan masing-masing. Dalam realitas yang dapat dibaca pada berbagai tingkah laku masyarakat Kecamatan Landono, ia tidak hanya berhadapan untuk bertentangan, tetapi sekaligus mendorong terwujudnya integrasi dalam rasa persatuan dan kesadaran untuk hidup berdampingan dalam menata masyarakat.

Baik Coser (1956), Gluckman (1973), Andaya (1984), dan lain-lainnya yakin bahwa integrasi yang terjadi akibat konflik memungkinkan adanya kesamaan dalam struktur sosial yang lebih luas. Kesamaan itu dianut oleh masing-masing pihak disebabkan adanya unsur-unsur yang meredam konflik berupa sistem agama, politik, dan adat istiadat bahkan sistem nilai budaya yang lebih luas sifatnya (Rahman, 1988 :

14). Dengan demikian, dapat dimengerti mengapa konflik yang terjadi antara masyarakat lokal dan pendatang di Landono tumbuh juga, diantaranya sesuatu nilai yang positif dan integratif yang membantu terciptanya unsur-unsur yang dapat menghilangkan pertentangan antara hubungan sosial.

Masalah integrasi dan konflik di pemukiman transmigrasi merupakan dua sisi dari mata uang, maka menurut Rahardjo (1984 : 32) menjelaskan bahwa masalah yang paling rawan menyangkut konflik adalah masalah perbedaan agama. Namun di lain pihak berdasarkan penelitian Litbang Departemen Transmigrasi di tahun 1978 menunjukan bahwa agama di samping sebagai salah satu faktor untuk mempercepat proses integrasi, sekaligus sebagai faktor penunjang proses interaksi yang asosiatif di kalangan para transmigran itu sendiri maupun dengan penduduk asli. Sedangkan menurut Martono (1985 : 45) aspek lain yang juga sangat penting dalam proses integrasi di pemukiman transmigrasi adalah adaptasi nilai-nilai positif yang merupakan dasar bagi terwujudnya kemajuan dalam pembangunan yaitu *transfer of skill and technology*.

Hal demikian itu nyata bila kita ingin mengamati berbagai hal yang mendorong pula terjadinya dinamisasi. Orientasi yang berbeda antara masyarakat lokal dan pendatang ada kalanya muncul pada tahapan yang sangat kritis dan dapat membahayakan kehidupan sosialnya. Pada tahapan itu muncul pula nilai budaya yang merupakan alat integrasi, dimana nilai budaya tersebut secara gradual mengalami penyesuaian untuk mempersatukan masyarakat Landono demi keharmonisan hidup mereka. Integrasi yang muncul akibat adanya penyesuaian nilai budaya itu, sekaligus merupakan cerminan simbol dari masyarakat lokal dan pendatang baik itu

transmigrasi ataupun pendatang lain di Kecamatan Landono sebagai simbol yang bermakna dan berarti bagi mereka sendiri. Perubahan ini disebabkan adanya konflik dan kontradiksi internal. Dengan kata lain, perubahan sosial yang terjadi justru banyak ditentukan dan terjadi dalam masyarakat itu sendiri dimana konflik melekat padanya. Dengan demikian setiap kali masyarakat Landono berhadapan untuk konflik juga sekaligus berhadapan untuk integrasi.

B. Kerangka Konsep

1. Konsep Masyarakat Majemuk

Sulit dipungkiri, Indonesia ditinjau dari aspek manapun merupakan sebuah bangsa yang majemuk. Ini terlebih jika dikontraskan dengan bangsa-bangsa lain seperti Jepang, Korea, Thailand, ataupun Anglo Saxon (Inggris). Kemajemukan ini tampak dalam manifestasi kebudayaan bangsa Indonesia yang tidak “satu.” Budaya Indonesia dapat dengan mudah dipecah ke dalam budaya Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, atau pun Toraja, sebagai misal. Kemajemukan juga termanifestasi dalam masalah agama, lokasi domestik, tingkat ekonomi, ataupun perbedaan-perbedaan sikap politik.

Kajian mengenai masyarakat majemuk merupakan hal yang signifikan terutama di dalam masyarakat yang memang terdiri atas aneka pelapisan sosial dan budaya yang satu sama lain saling berbeda seperti di Indonesia. Oleh sebab itu Indonesia, mengembangkan slogan Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu). Slogan tersebut bersifat filosofis-politis, oleh sebab tanpa adanya unsure

pemersatu, akan mudah kiranya memecah-belah kohesi politik masyarakat yang mendiami sekujur kepulauan nusantara ini.

J.S. Furnivall (1967 : 446-469) termasuk orang yang pertama kali menyebut Indonesia selaku bangsa majemuk. Selaras dengan Furnifall, Parsudi Suparlan *(http://setabasri01.blogspot.com/masyarakat-majemuk-indonesia.html* akses senin 15 Februari 2010) secara tegas juga menyebut masyarakat Indonesia sebagai masyarakat majemuk. Hal yang mencolok dari kemajemukan masyarakat Indonesia adalah penekanan pada pentingnya kesukubangsaan yang terwujud dalam bentuk komunitas-komunitas suku bangsa, dan digunakannya kesukubangsaan sebagai acuan utama bagi jati diri bangsa. Suparlan menandaskan bahwa masyarakat majemuk ini memiliki kesulitan tersendiri dalam melakukan integrasi nasional.

Cyril S. Belshaw (1963 : 97), juga mengungkapkan bahwa masyarakat majemuk merupakan suatu masyarakat di mana sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya adalah sedemikian rupa sehingga para anggota masyarakat kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat berbagai keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain.

Ciri dari masyarakat majemuk adalah secara struktural memiliki sub-sub kebudayaan yang bersifat *diverse* (Nasikun, 2004 : 40). Ia kurang mengalami perkembangan dalam hal sistem nilai atau *consensus* yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat. Kurang pula ditandai oleh berkembangnya sistem nilai dari kesatuan-kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya dengan penganutan para anggotanya masing-masing secara tegar dalam bentuknya yang relatif murni serta

oleh sering timbulnya konflik-konflik sosial, atau setidak-tidaknya oleh kurangnya integrasi dan saling ketergantungan di antara kesatuan-kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya.

Bagi seorang ahli lain, Clifford Geertz (1963 : 105-157), masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam sub-sub sistem yang kurang lebih berdiri sendiri-sendiri, dimana masing-masing sub sistem terikat ke dalam ikatan-ikatan yang bersifat primordial.

Sedangkan masyarakat majemuk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam bentuk komunitas-komunitas suku bangsa, dan digunakannya kesukubangsaan sebagai acuan utama bagi jati diri masing-masing komunitas tersebut, yang terikat ke dalam ikatan-ikatan yang bersifat primordial, sehingga mereka kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat secara keseluruhan dan kurang memiliki homogenitas kebudayaan atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain.

Untuk mengatasi kemajemukan Indonesia ini, secara historis *founding fathers* merumuskan Pancasila. Lima kalimat singkat dalam Pancasila digunakan sebagai basis *consensus* yang diyakini merupakan *common will* dari subkultur-subkultur yang hidup di masyarakat majemuk Indonesia. Sulit dibayangkan jika *consensus* dasar (Pancasila) ini kemudian berubah.

Nasikun (2004 : 35-39) menandaskan keragaman ini kemudian mengimbas pada aspek-aspek kehidupan lainnya. Dengan mengkontraskan antara apa yang ia sebut sebagai “masyarakat majemuk” *(plural society)* dengan “masyarakat homogen” *(homogeneus society)*, Nasikun mengetengahkan beberapa konflik yang muncul

akibat ketiadaan *"common will"* (kehendak bersama). Pada masyarakat homogen, *common will* relative ada. Ini akibat serupanya asal usul etnis, agama, dan tata adat istiadat. Sementara pada masyarakat plural, *common will* menjadi suatu yang jarang akibat adanya perbedaan asal usul etnis, agama, dan tata adat istiadat (budaya).

2. Konsep Integrasi Sosial

Integrasi sosial dikonsepkan sebagai suatu proses ketika kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat saling menjaga keseimbangan untuk mewujudkan kedekatan hubungan-hubungan sosial, ekonomi maupun politik.

Kelompok-kelompok sosial tersebut dapat terwujud atas dasar agama atau kepercayaan, suku, ras, dan kelas. Dalam konteks ini, integrasi tidak selamanya menghilangkan *diferensiasi* tetapi yang terpenting adalah memelihara kesadaran untuk menjaga keseimbangan hubungan.

Pokok-pokok integrasi sosial menurut Dahrendoof (1986) adalah (a) Stabilitas, (b) Fungsi koordinasi, (c) Konsensus, dan (d) Integrasi yang terstruktur dengan baik *(http://fauzi.ngeblogs.com/2009/12/16/konflik-sosial-dan-integrasi-sosial/;* akses 2 Februari 2010).

Ralf Dahrendorf dalam Poerwanto (1990 : 32-33) menawarkan model masyarakat sebagai berikut :

1. Setiap masyarakat relatif terdiri dari konfigurasi unsur-unsur.
2. Setiap masyarakat terintegrasi dengan baik dalam konfigurasi unsur-unsur.
3. Setiap unsur dalam masyarakat memberikan kontribusi fungsional.
4. Setiap anggota masyarakat pada konsensus yang telah disepakatinya

Integrasi sosial juga merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan sosial, sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi bagi masyarakat tersebut. Dimana integrasi sosial dapat terbentuk apabila para anggota masyarakat bersepakat mengenai stuktur kemasyarakatan, nilai-nilai, dan norma serta pranata sosial yang berlaku dalam masyarakat tersebut dan di perlukan agar masyarakat tidak bubar meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik berupa tantangan fisik maupun konflik yang terjadi secara sosial budaya.

Di samping itu juga diperlakukan adanya kesepakatan mengenai batas teretorial / wilayah yang jelas akan tempat / negara yang mereka tinggali. William F. Ogburn dan Mayer Nimkoff *(http://smatengaran.blogspot.com/2008/06/konflik-dan-integrasi-sosial.html,* akses 10 januari 2010) mengemukakan tentang syarat berhasilnya suatu integrasi sosial yaitu :

(1) Kemampuan untuk mengisi kebutuhan anggota masyarakat satu dengan lainnya, sehingga terjalin hubungan yang baik dan saling menjaga keterikatan satu dengan yang lain,
(2) Keberhasilan menciptakan kesepakatan *(consensus)* mengenai norma dan nilai-nilai sosial sebagai pedoman dalam menjalin interaksi satu dengan yang lain,
(3) Nilai-nilai dan norma-norma sosial tersebut berlaku dalam waktu yang cukup lama dan telah dilaksanakan secara konsisten.

Namun demikian integrasi sosial yang dimaksud dalam karya ini, merupakan pernyataan dari kenyataan sosial masyarakat Landono yang menganut berbagai sistem, dimana satu sistem dengan sistem lain selalu berhubungan dan saling membutuhkan.

Bentuk-bentuk integrasi sosial menurut *Wikipedia bahasa Indonesia (http://id.wikipedia.org/wiki/bentuk-bentuk-integrasi-sosial akses 10 januari 2010)* adalah terdiri dari *asimilasi* dan *akulturasi*.

2.1 Asimilasi

Asimilasi menurut Koentjaraningrat (1993:160) adalah :

> Suatu proses sosial yang terjadi pada berbagai golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda setelah mereka bergaul secara intensif, sehingga sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan golongan itu masing-masing berubah menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Biasanya suatu asimilasi terjadi antar suatu golongan mayoritas dengan minoritas.

Proses asimilasi biasanya menyebabkan golongan minoritas berubah dan menyesuaikan diri dengan golongan mayoritas dengan adanya pergeseran sifat-sifat khas dari kebudayaan golongan minoritas yang lambat laun berubah dan menyatu dengan kebudayaan golongan mayoritas. Suatu proses asimilasi juga ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara golongan atau kelompok. Untuk mengurangi perbedaan itu, asimilasi meliputi usaha-usaha mempererat kesatuan tindakan, sikap, dan perasaan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama.

Sedangkan menurut wikipedia Indonesia *(http://socius3.wordpress.com/ 2007/10/18/asimilasi-sosial/* akses 2 februari 2010) yang dimaksud asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Hasil dari proses asimilasi adalah semakin tipisnya batas perbedaan antar individu dalam suatu kelompok, atau bisa juga batas-

batas antar kelompok. Selanjutnya, individu melakukan identifikasi diri dengan kepentingan bersama. Artinya, menyesuaikan kemauannya dengan kemauan kelompok. Demikian pula antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain.

Asimilasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu penyesuaian atau penyelarasan proses sosial dalam taraf lanjutan yang ditandai dengan adanya usaha – usaha yang dilakukan untuk mengurangi perbedaaan yang terdapat pada orang perorangan atau kelompok.

Pernikahan adalah salah satu cara yang paling efektif untuk melakukan proses asimilasi budaya. Proses ini membuat orang tidak lagi bersandar melulu pada nilai kultural mereka yang spesifik, tetapi juga mampu melihat realitas dari sudut pandang kultur yang berbeda. Rex berpendapat, bahwa proses asimilasi setidaknya memiliki empat akibat (1997 : 217) yaitu :

> Pertama, proses asimilasi dapat menolong suatu kultur untuk mampu melepaskan diri dari isolasi sosial yang mungkin saja mereka alami. Kedua, proses asimilasi juga memungkinkan diselesaikannya berbagai dilema moral ataupun sosial, yang muncul akibat dari benturan budaya di dalam masyarakat multikultur. Ketiga, proses asimilasi juga memungkinkan kultur yang bersangkutan untuk menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka dengan menggunakan ‘bahasa-bahasa’ yang bisa dimengerti secara publik, tepat karena interaksi di antara kultur yang berbeda tersebut telah terjadi sebelumnya. Dan keempat, proses asimilasi juga memungkinkan terciptanya nilai-nilai dan identitas baru, yang didasarkan pada interseksi berbagai nilai kultural yang beragam di dalam masyarakat majemuk.

Nilai dan aturan moral, yang merupakan hasil dari proses interseksi berbagai kultur yang beragam tersebut, nantinya akan menjadi sistem nilai yang bersifat otonom yang mampu menjelaskan pola ideal hubungan antar manusia, maupun hubungan dasar antara manusia dengan alam. Tentu saja, nilai hasil proses interseksi

berbagai kultur tersebut tidaklah dapat menggantikan seluruhnya peran yang tadinya dimiliki oleh identitas kultural. Sebut saja bahwa, nilai-nilai masyarakat modern tidak akan pernah sepenuhnya dapat menggantikan nilai-nilai tradisional yang telah diyakini sebelumnya. Akan tetapi, nilai-nilai modern hasil interseksi beragam kultur tersebut tetap mampu berperan di dalam menciptakan solidaritas bagi masyarakat sebagai keseluruhan, maupun kenyamanan eksistensial bagi individu yang terkait. Dua hal yang kiranya menjadi kebutuhan utama dari sebuah masyarakat majemuk.

Nilai-nilai modern itulah yang, menurut Parsons dalam Poerwanto (1990 : 36-40), akan menjadi alat untuk mempertahankan pola-pola berlaku di masyarakat, dan mengatur tegangan-tegangan sosial yang muncul akibat benturan antar kultur. Nilai-nilai tersebut memberikan identitas bagi individu-individu di dalam masyarakat multikultur, sekaligus membantu mereka untuk mengatasi berbagai problematika yang muncul, baik dalam konteks moral maupun material. Jika semua anggota masyarakat sudah menjalankan nilai-nilai tersebut ke dalam praktek sosial, maka nilai-nilai modern akan menjadi bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan.

Keberadaan kultur minoritas tidak pernah dapat dipandang sebagai ancaman bagi kesatuan sebuah masyarakat. Keberadaan kultur minoritas, menurut Rex, juga tidak pernah dapat dianggap sebagai suatu celah bagi terjadinya ketidaksetaraan kultural (1997 : 218). Masyarakat majemuk haruslah menerima perbedaan kultural yang ada di dalamnya, sekaligus menjamin terciptanya kesempatan yang sama bagi setiap warganya. Jika yang pertama terlalu ditekankan, maka yang terjadi adalah ketidaksetaraan kultural yang akan bermuara pada kesenjangan ekonomi, sosial, maupun politik. Sementara, penekanan berlebihan pada aspek kedua justru akan

menciptakan suatu bentuk pemerintahan totaliter baru yang tertutup pada semua bentuk perbedaan. Keduanya tidaklah boleh terjadi di dalam masyarakat majemuk.

2.2 Akulturasi

Akulturasi menurut Koentjaraningrat (http://teoriantropologi.Blogspot. com/2009/11/pola-pola-perubahan-sosial-budaya-ada.html akses 2 februari 2010) adalah :

> Suatu proses sosial yang timbul dimana suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu yang mereka miliki dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing. Sehingga kebudayaan asing itu lambat laun akan diterima/diresap dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan asli dari kelompok itu sendiri.

Proses akulturasi itu memang ada sejak dahulu kala dalam sejarah kebudayaan manusia, tetapi proses akulturasi yang mempunyai sifat yang khusus baru timbul ketika kebudayaan bangsa-bangsa di Eropa Barat mulai menyebar ke semua daerah lain di muka bumi ini. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sejak dahulu kala dalam sejarah kebudayaan manusia ada gerak migrasi yaitu gerak perpindahan dari suku-suku bangsa di muka bumi. Migrasi tentu mengakibatkan pertemuan-pertemuan antara kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda-beda dan akibatnya ialah bahwa individu-individu dalam kelompok-kelompok itu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing. Dengan demikian terjadilah akulturasi budaya di antara kelompok-kelompok itu. Sedangkan akulturasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fenomena yang timbul sebagai akibat pertemuan (kontak budaya) secara langsung dan terus – menerus antar kelompok manusia yang memiliki

kebudayaan berbeda namun tidak menghilangkan ciri atau sifat asli dari masing – masing kebudayaan.

Di dalam masyarakat majemuk, anggota masyarakat yang mayoritas memandang keluarga dan komunitas mereka sebagai bagian integral dari keseluruhan masyarakat. Anggota masyarakat ini berfungsi secara maksimal di dalam dinamika sistem sosial yang ada. Proses pendidikan di dalam keluarga pun relatif tidak bermasalah, karena nilai-nilai pendidikan di dalam keluarga searah dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

Sementara itu, anggota masyarakat yang berasal dari kultur minoritas mengalami nasib yang sama sekali berbeda. Bagi mereka, keluarga dan komunitas mereka merupakan bagian yang berbeda dari sistem sosial yang lain. Mereka seolah berasal dari kebudayaan yang sama sekali berbeda dari kebudayaan yang dominan di dalam masyarakat. Mereka harus menyeimbangkan antara pendidikan nilai-nilai kultural mereka yang khas di satu sisi, dan pendidikan berkaitan dengan nilai-nilai publik yang lebih luas di sisi lain dan mereka pernikahan tidak pernah bisa menjadi melulu soal individu. Pernikahan, bagi mereka, adalah soal pertukaran nilai antara satu kultur dengan kultur lainnya.

Kemajemukan masyarakat Indonesia dilihat dari latar belakang suku, agama dan adat merupakan realitas yang tidak bisa dielakkan. Adanya perbedaan suku, agama dan adat yang ada mengandung potensi terjadinya konflik dalam kaitannya dengan hubungan masyarakat. Ralf Dahrendorf menyatakan pada hakekatnya masyarakat memiliki dua sisi ialah konflik di suatu pihak dan pada pihak lain adalah stabilitas, harmoni dan konsensus. Untuk menjelaskan pandangannya, Ralf

Dahrendorf mengusulkan sebuah model konflik yang dikaitkan dengan kekuasaan. Dengan kata lain berbagai jenis konflik dapat dijelaskan dengan menunjuk pada kedudukan struktur sosial tertentu (Poerwanto, 1990 : 32-33).

Pada dasarnya suatu konflik tidak selamanya mempunyai implikasi negatif. Menurut Lewis A. Coser, menyatakan konflik yang terjadi dalam konteks perubahan sosial mengandung beberapa fungsi. Apakah dapat berfungsi mengarahkan perubahan sistem sosial atau bahkan pecah dan berfungsi membentuk sistem baru. Hal ini sangat tergantung pada kekuatan dan resistensi suatu perubahan.

Sejalan dengan pandangan Dahrendorf, Talcott Parson dalam Poerwanto (1990 : 33-40) menyatakan bahwa fungsi suatu perubahan dimaksudkan untuk lebih memahami terjadinya suatu perubahan yang pada gilirannya juga dimaksudkan agar suatu keseimbangan dapat selalu terjaga, antara lain melalui usaha mengeliminasi berbagai sumber konflik.

Pandangan Parson tersebut, dimulai berdasarkan titik pangkal konsep stabilitas atau ekuilibrium yang dianggapnya sebagai ciri utama dari suatu stuktur. konsep ekuilibrium yang stabil mengimplikasikan bahwa melalui mekanisme integratif, berbagai sumber daya yang berasal dari dalam dapat terjaga sampai pada batas-batas yang harmonis dengan cara memelihara pola-pola struktural yang utama. Hal ini dapat dilakukan, antara lain melalui mekanisme fluktuasi hubungan yang adaptif antara sistem dan lingkungannya. Dengan cara itu pula suatu harmoni dapat terjaga (Poerwanto, 1990 : 39).

Di dalam proses integrasi terdapat dua macam mobilitas sosial yaitu vertikal dan horisontal. Yang vertikal berhubungan dengan perpindahan posisi ke atas atau ke

bawah, sedangkan yang horisontal berhubungan dengan perpindahan dari satu bidang atau dimensi ke bidang atau dimensi lainnya dalam kelas yang sama. Namun di dalam penelitian ini lebih menekankan kepada proses integrasi secara horisontal.

Pengendalian sosial (kontrol sosial) adalah kontrol yang bersifat psikologik dan nonfisik, yaitu merupakan tekanan mental terhadap individu, sehingga individu akan bersikap dan bertindak sesuai dengan penilaian kelompok, karena ia tinggal dalam kelompok. Adapun hasil dari pengendalian sosial adalah (a) proses pembentukan kepribadian sesuai dengan keinginan kelompok, dan (b) kelangsungan hidup atau kesatuan kelompok lebih.

Dalam suatu integrasi pastilah terjadi suatu keadaan di mana antara individu maupun kelompok tersebut saling bertentangan / terjadi ketidaksepakatan, kondisi demikian disebut dengan konflik. Konflik sosial dapat dimaknai ke dalam 2 sudut pandang yaitu yang pertama adalah bahwa konflik merupakan pertikaian terbuka seperti revolusi, pemogokan dan gerakan perlawanan. Sedangkan sudut pandang yang kedua memaknai konflik sebagai sautu hal yang selalu ada dan mewarnai segenap aspek interaksi manusia dan struktur sosialnya.

Apapun bentuk integrasi, baik yang berdimensi vertikal dan horisontal dan dimanapun integrasi itu terjadi (di pemukiman trasmigrasi,di kota-kota besar maupun di pemukiman kawasan industri dan ditempat-tempat lain), maka paling penting adalah melakukan pengkajian secara mendalam dan mencermati segala variabel serta perspektifnya dimasa yang akan datang. Namun tidaklah mudah dan tidak sederhana di dalam memahami integrasi. Sunyoto Usman (1994 : 94) menyimpulkan bahwa usaha menciptakan integrasi dalam kehidupan masyarakat berlilit dengan banyak hal.

Integrasi sejati tidak dapat dibangun diatas perlakuan yang represif, karena berkaitan dengan sosialisasi nilai, distribusi peran serta interdependensi ekonomi. Dengan kata lain pengikat integrasi tentang dalam kesatuan *subjective-objective continuum*, artinya bisa berupa variabel-variabel yang dapat diamati dan diukur, atau juga bisa berupa variabel-variabel yang hanya dapat diidentifikasi secara kualitatif.

Rahardjo (1984 : 58-60) mensinyalir bahwa belum terwujudnya integrasi di pemukiman transmigrasi, salah satu faktornya adalah benturan-benturan nilai budaya ini bisa terjadi ketika antara kelompok etnik nilai budayanya sangat superior dari pada nilai budaya kelompok lain . Sejalan dengan itu diketahui bahwa ketidak rukunan antara kelompok etnik di pemukiman transmigrasi yang mengarah pada konflik umum di sebabkan pada perbedaan sistem nilai-nilai sosial budaya yang meliputi norma dan *image*.

Sangat peka dan sensitifnya unsur-unsur nilai budaya tersebut menyebabkan masing-masing kelompok etnik sulit untuk menyesuaikan diri dan berintegrasi. Tetapi hal itu tidak berarti integrasi di pemukiman transmigrasi tidak bisa terwujud. Seyogyanya melalui *politicial will* dari pemerintah yang berupa *policy integrated pluralism* diharapkan integrasi akan cepat terwujud. Disisi lain Mubyarto menyatakan bahwa dalam masyarakat transmigrasi pola apapun selalu akan terjadi kemungkinan benturan dan konflik antara dua atau lebih kebudayaan yaitu antara yang asli dan pendatang maupun sesama pendatang, sehingga hal ini merupakan masalah berat (Swasono dan Singarimbun, 1986 : 156).

Blau (1977), menekankan dua hal khusus berhubungan dengan konsep integrasi masyarakat majemuk yaitu integrasi bergantung pada adanya hubungan-

hubungan kelompok yang luas, bukan pada pertalian-pertalian (hubungan) kelompok dalamnya yang kuat dan integrasi itu bergantung pada hubungan-hubungan langsung antara individu-individu dari kelompok dan strata yang berbeda. Selain itu dijelaskan juga bahwa semakin besar jumlah kelompok-kelompok etnis dalam sebuah komunitas, maka semakin besar heterogenitas etnis atau horisontal diferensiasi.

Di lain pihak aspek ekonomi juga sangat besar pengaruhnya terhadap integrasi, Evers dalam Harahap (1985 : 2-3) menjelaskan bahwa penyebab terhambatnya integrasi adalah persaingan mengenai kesempatan memperoleh sumber ekonomi, namun sebaliknya integrasi ekonomi melalui perdagangan justru betul-betul dirasakan. Pendapat tersebut juga dikemukakan dan diperjelas oleh Harahap (1985 : 3), bahwa :

> Dari berbagai masalah integrasi yang mungkin timbul di daerah transmigrasi, nampaknya sumber masalahnya adalah pada perbedaan aspirasi dan kepentingan ekonomi antara kelompok penduduk yang terlibat. Ini tidak berarti aspek kehidupan lain dikesampingkan, tetapi perhatian kegiatan-kegiatan ekonomi diutamakan, karena ia paling menentukan dalam proses integrasi sebab : (1) kepentingan bersama itu, lewat mana orang akan terdorong untuk membuat konsensus-konsensus, paling jelas kelihatan dalam kegiatan ekonomi, (2) motivasi transmigrasi yang utama adalah motif ekonomi dan (3) secara teoritik norma dan nilai itu bermula dari sistem kegiatan ekonomi.

Menurut Sheriff dalam Ancok (1984 : 3), terjadinya benturan antara para transmigran dengan penduduk setempat adalah karena persaingan untuk memperoleh *economic recources.* Untuk menghindari persaingan tersebut Ancok (1984 : 3-4) menawarkan alternatif antara lain :

(1) memberikan penerangan yang intensif tentang transmigrasi kepada penduduk setempat,
(2) mengundang tokoh masyarakat setempat yang kurang positif sikapnya terhadap para transmigran untuk mengunjungi daerah asal transmigran dan

(3) memberikan keterampilan komunikasi kepada transmigran melalui pengenalan kebudayaan setempat dan bila mungkin memberikan pelajaran bahasa lokal.

Majemuknya penduduk yang menempati pemukiman trasmigrasi memungkinkan diantara mereka akan terjadi interaksi. Apabila hal itu dapat berjalan lancar, maka pada akhirnya akan tercipta integrasi antara penduduk lokal dan trasmigran pendatang.

3. Faktor-faktor Pendukung Integrasi

Terdapat banyak faktor pendukung terjadinya integrasi sosial. Faktor-faktor tersebut menurut Afif Rifai (http://dakwah.uin-suka.ac.id/file_ilmiah/ jurnalbaru-edit.doc akses 2 februari 2010) adalah :

3.1 Faktor Budaya

Faktor budaya dalam hal ini budaya bangsa Indonesia yang mengandung ajaran betapa pentingnya toleransi antar sesama umat manusia, membuat masyarakat memahami betul pentingnya mewujudkan toleransi. Walaupun ada perbedaan agama dan suku diantara mereka, namun karena adanya persamaan budaya yang dibingkai lewat nilai-nilai budaya luhur Pancasila yang telah tertanam didalam kehidupan sehari-hari masyarakat, membuat mereka tetap dapat menjalin kerjasama yang baik di tengah masyarakat.

Persamaan budaya ini membuat mereka bisa saling memahami, menghargai dan menghormati. Dengan persamaan budaya pula tentu membuat mereka bisa

menjalin komunikasi yang lebih baik. Kalau seandainya ada konflik kecil diantara mereka, maka dengan segera bisa diselesaikan lewat bahasa budaya.

3.2 Faktor Kekerabatan

Faktor berikutnya, yaitu hubungan kekerabatan yang ada diantara mereka juga menjadi faktor penting terwujudnya integrasi sosial. Hubungan kekerabatan diantara mereka yang berbeda agama dan suku terjadi karena adanya proses asimilasi lewat pernikahan antara pendatang dan penduduk lokal.

3.3 Faktor Kepatuhan Masyarakat Pada Pejabat Pemerintahan

Faktor lain yang mendukung integrasi sosial masyarakat adalah kepatuhan masyarakat pada administrasi pemerintahan yang disampaikan oleh pengurus RT/RW hingga kepala desa. Artinya, ketika masyarakatnya patuh kepada pemerintah maka perbedaan agama dan suku tidak menjadi penghalang dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan gotong-royong, masyarakat akan mudah di atur dan akan menjunjung tinggi azas musyawarah mufakat di dalam setiap perbedaan yang terjadi di dalam kehidupan bersosialnya.

4. Faktor-faktor Penghambat Integrasi

Sementara faktor penghambat integrasi sosial adalah persaingan *(competition),* kontraversi dan pertentangan/pertikaian *(conflict) (http://smate ngaran.blogspot.com/2008/06/konflik-dan-integrasi-sosial.html,* akses 10 januari 2010).

4.1 Persaingan atau Competition

Persaingan atau *competition* dapat diartikan sebagai suatu proses sosial dimana individu atau kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian publik/dengan mempertajam prasangka yang telah ada tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan. Persaingan mempunyai dua tipe umum yaitu bersifat pribadi; Individu, perorangan, bersaing dalam memperoleh kedudukan (*rivalry)* dan bersifat tidak pribadi.

Bentuk-bentuk persaingan terdiri atas (a) persaingan ekonomi yaitu timbul karena terbatasnya persediaan dibandingkan dengan jumlah konsumen, (b) persaingan kebudayaan yaitu dapat menyangkut persaingan bidang keagamaan, pendidikan, dan sebagainya, (c) persaingan kedudukan dan peranan yaitu di dalam diri seseorang maupun di dalam kelompok terdapat keinginan untuk diakui sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kedudukan serta peranan terpandang, dan (d) persaingan ras yaitu merupakan persaingan di bidang kebudayaan. Hal ini disebabkan karena ciri-ciri badaniyah terlihat dibanding unsur-unsur kebudayaan lainnya.

4.2 Kontraversi

Kontraversi merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Tipe umum kontravensi adalah (a) kontraversi generasi masyarakat yaitu lazim terjadi terutama pada zaman yang sudah mengalami perubahan yang sangat cepat, (b) kontraversi seks yaitu menyangkut hubungan suami dengan istri dalam keluarga dan (c) kontraversi parlementer yaitu hubungan antara golongan mayoritas dengan golongan minoritas dalam masyarakat.

4.3 Pertentangan/Pertikaian *(Conflict)*

Dalam suatu integrasi pastilah terjadi suatu keadaan di mana antara individu maupun kelompok tersebut saling bertentangan / terjadi ketidaksepakatan, kondisi demikian disebut dengan konflik. Konflik sosial dapat dimaknai ke dalam 2 sudut pandang yaitu yang pertama adalah bahwa konflik merupakan pertikaian terbuka seperti revolusi, pemogokan dan gerakan perlawanan. Sedangkan sudut pandang yang kedua memaknai konflik sebagai suatu hal yang selalu ada dan mewarnai segenap aspek interaksi manusia dan struktur sosialnya Konflik adalah sesuatu yang tak terhindarkan, konflik merekat erat dalam jalinan kehidupan manusia. Umat manusia selalu berjuang dengan konflik, oleh karena itu, hingga saat ini dituntut untuk memperhatikan konflik, dan mencari jalan untuk meredam ketakutan terhadap konflik, sebagai suatu kewajaran, pertentangan atau konflik akan selalu ada, selama manusia itu ada. Baik secara individu maupun anggota kelompok atau dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengertian Konflik dikemukakan oleh peter Condliffe (1995:3) bahwa "....*a form of relating or interacting where we find our selves (either as individuals or groups) under some sort of perceived threat to our personal or collective goals. These goals are usually to do with our interpersonal wants. These parcieved threat may be either real or imagined* ".

Banyak definisi konflik yang dkemukakan oleh para pakar. Dari berbagai definisi dan berbagai sumber yang ada istilah konflik, Alo Liliweri merangkumnya sebagai berikut:

> (1) konflik adalah bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok karena mereka yang terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai-nilai, serta kebutuhan; (2) hubungan pertentangan antara dua pihak atau lebih (individu maupun kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran tertentu, namun diliputi pemikiran, perasaan, atau perbuatan yang tidak sejalan; (3) pertentangan atau pertikaian karena ada perbedaan dalam kebutuhan, nilai, dan motifasi pelaku atau yang terlibat di dalamnya; (4) suatu proses yang terjadi ketika satu pihak secara negatif mempengaruhi pihak lain, dengan melakukan kekerasan fisik yang membuat orang lain perasaan serta fisiknya terganggu; (5) bentuk pertentangan yang bersifat fungsional karena pertentangan semacam itu mendukung tujuan kelompok dan memperbarui tampilan, namun disfungsional karena menghilangkan tampilan kelompok yang sudah ada; (6) proses mendapatkan monopoli ganjaran, kekuasaan, pemilikan, dengan menyingkirkan atau melemahkan pesaing; (7) suatu bentuk perlawanan yang melibatkan dua pihak secara antagonis; (8) kekacauan rangsangan kontradiktif dalam diri individu (2005:249-250).

Uraian di atas juga menunjukkan bahwa dalam setiap konflik terdapat beberapa unsur sebagai berikut :

1. Ada dua pihak atau lebih yang terlibat.
2. Ada tujuan yang dijadikan sasaran konflik, dan tujuan itulah yang menjadi sumber konflik.
3. Ada perbedaan pikiran, perasaan, tindakan di antara pihak yang terlibat untuk mendapatkan atau mencapai tujuan.
4. Ada situasi konflik antara dua pihak yang bertentangan

(Barge dalam Liliweri, 2005:250)

Definisi di atas menunjukkan bahwa konflik tidak selalu berarti kekerasan atau peperangan. Hal itu karena banyak konflik yang sebenarnya masih tersimpan dan belum muncul ke permukaan atau yang sering kita sebut sebagai konflik laten (tersembunyi). Kita bisa menyimpulkan bahwa sekecil apapun perbedaan pendapat dalam masyarakat adalah suatu konflik, walaupun konflik ini belum begitu berdampak negatif kepada masyarakat. Namun demikian, jika hal ini tidak kita kelola dengan baik dan benar, tidak menutup kemungkinan perbedaan pendapat bisa berubah menjadi konflik kekerasan.

Setiap masyarakat memiliki cara pandang tersendiri atas konflik yang terjadi di lingkungannya. Cara pandang ini sangat tergantung pada kerangka konseptual umum, atau budaya masyarakat yang melingkupinya. Cara pandang yang berbeda-beda inilah yang kemudian menimbulkan perbedaan makna konflik antara masyarakat yang satu dan lainnya, yang kemudian memunculkan mitos-mitos tentang konflik (Sutaryo, 2000 : 246).

Untuk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat, tentunya harus diketahui penyebab konflik yang terjadi. Dengan mengetahui sebabnya, konflik diharapkan segera bisa diselesaikan. Dalam pandangan teori konflik (Dahrendorf dalam Mandan, 1980 : 34) bahwa masyarakat selalu dalam kondisi perubahan, dan setiap elemen dalam masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya konflik di masyarakat. Dalam pandangan teori ini bahwa masyarakat disatukan oleh "ketidakbebasan yang dipaksakan". Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta kehidupan sosial ini mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan distribusi kekuasaan dan otoritas "selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis" (Geoge Ritzer dan Douglas J Goodman, 2004 : 154).

Dengan adanya perbedaan distribusi kekuasaan inilah kemudian memunculkan dua kelompok yang berbeda posisi, yakni kelompok dominan dan kelompok pada posisi subordinat. Mereka yang berada pada posisi dominan cenderung mempertahankan status quo sementara yang berada pada posisi subordinat selalu berupaya mengadakan perubahan terus-menerus. Konflik kepentingan dalam

suatu kelompok selalu ada sepanjang waktu, setidaknya yang tersembunyi (Geoge Ritzer dan Douglas J Goodman, 2004 : 154).

Agak berbeda dengan para teoritisi konflik di atas, Collins (1990 : 68-71), seorang ahli sosiologi, lebih menekankan bahwa konflik lebih berakar pada masalah individual karena akar toretisnya lebih pada fenomenologis dan etnometodologi. Dia lebih memilih konflik sebagai fokus berdasarkan landasan yang realistik, konflik adalah proses sentral dalam kehidupan sosial.

Liliweri (2005 : 260-264) menyederhanakan penyebab konflik sebagai berikut :

1. Konflik Nilai
   Kebanyakan konflik terjadi karena perbedaan nilai. Nilai merupakan sesuatu yang menjadi dasar, pedoman, tempat setiap manusia menggantungkan pikiran, perasaan, dan tindakan. Yang termasuk dalam kategori ini adalah konflik yang bersumber pada perbedaan rasa percaya, keyakinan, bahkan ideologi atas apa yang diperebutkan.
2. Kurangnya Komunikasi
   Kita tidak bisa menganggap sepele komunikasi antarmanusia karena konflik bisa terjadi hanya karena dua pihak kurang berkomunikasi. Kegagalan berkomunikasi karena dua pihak tidak dapat menyampaikan pikiran, perasaan, dan tindakan sehingga membuka jurang perbedaan informasi di antara mereka, dan hal semacam ini dapat mengakibatkan terjadinya konflik.
3. Kepemimpinan yang Kurang Efektif
   Secara politis kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang kuat, adil, dan demokratis. Namun demikian, untuk mendapatkan pemimpin yang ideal tidah mudah. Konflik karena kepemimpinan yang tidak efektif ini banyak terjadi pada organisasi atau kehidupan bersama dalam suatu komunitas. Kepemimpinan yang kurang efektif ini mengakibatkan anggota masyarakat “mudah bergerak”.
4. Ketidakcocokan Peran
   Konflik semacam ini bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Ketidakcocokan peran terjadi karena ada dua pihak yang mempersepsikan secara sangat berbeda tentang peran mereka masing-masing.
5. Produktivitas Rendah
   Konflik seringkali terjadi karena out put dan out come dari dua belah pihak atau lebih yang saling berhubungan kurang atau tidak mendapatkan keuntungan dari hubungan tersebut. Oleh karenanya muncul prasangka di

antara mereka. Kesenjangan ekonomi di antara kelompok masyarakat, termasuk dalam konflik ini.

6. Perubahan Keseimbangan
   Konflik ini terjadi karena ada perubahan keseimbangan dalam suatu masyarakat. Penyebabnya bisa karena faktor alam, maupun faktor sosial.
7. Konflik atau Masalah yang Belum Terpecahkan
   Banyak pula konflik yang terjadi dalam masyarakat karena masalah terdahulu tidak terselesaikan. Tidak ada proses saling memaafkan dan saling mengampuni sehingga hal tersebut seperti api dalam sekam, yang sewaktu-waktu bisa berkobar.

Tujuh penyebab konflik di atas adalah penyebab yang sifatnya umum, dan sebenarnya masih bisa diperinci lebih detail lagi. Namun demikian, jika mencermati konflik-konflik yang terjadi khususnya masyarakat Indonesia akhir-akhir ini, bisa merunut, paling tidak ada salah satu penyebab seperti di atas. Dengan mengetahui penyebab terjadinya konflik bisa berharap bahwa konflik akan bisa dikelola, dan diselesaikan dengan baik.

Setelah mengetahui penyebab terjadinya konflik, kini bisa dimulai untuk mencoba berbagai alternatif teoretis untuk menyelesaikan konflik yang tejadi. Secara umum menurut Fisher (2001 : 14) untuk menyelesaikan konflik dikenal beberapa istilah, yakni :

1. Pencegahan konflik; pola ini bertujuan untuk mencegah timbulnya kekerasan dalam konflik,
2. Penyelesaian konflik; bertujuan untuk mengakhiri kekerasan melalui persetujuan perdamaian,
3. Pengelolaan konflik; bertujuan membatasi atau menghindari kekerasan melalui atau mendorong perubahan pihak-pihak yang terlibat agar berperilaku positif
4. Resolusi konflik; bertujuan menangani sebab-sebab konflik, dan berusaha membangun hubungan baru yang relatif dapat bertahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan,
5. Transformasi konflik; yakni mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas, dengan mengalihkan kekuatan negatif dari sumber perbedaan kepada kekuatan positif.

Selain memahami istilah-istilah penyelesaian konflik tersebut, adalah juga penting untuk memahami; (1) tahapan konflik; (2) tahap penyelesaian konflik; dan (3) asumsi penyelesaian konflik (Fisher, 2001 : 293-294). Tahapan-tahapan konflik tersebut antara lain potensi oposisi atau keadaan pendorong, kognisi dan personalisasi, penyelesaian-penanganan konflik, perilaku konflik yang jelas, dan hasil. Untuk tahapan penyelesaian konflik menurut Johnson & Johnson dalam Fisher (2001: 293-294) adalah pengumpulan data, verifikasi, mendengar kedua belah pihah yang berkonflik, menciptakan kesan pentingnya kerjasama, negosiasi, dan menciptakan kerukunan. Sementara itu, asumsi-asumsi dalam penyelesaian konflik adalah (1) Kalah-Kalah; setiap orang yang terlibat dalam konflik akan kehilangan tuntutannya jika konflik terus berlanjut, (2) Kalah–Menang; salah satu pihak pasti ada yang kalah, dan ada yang menang dari penyelesaian konflik yang terjadi. Jika yang kalah tidak bisa menerima sepenuhnya, maka ada indikasi munculnya konflik baru; (3) Menang-Menang: dua pihak yang berkonflik sama-sama menang. Ini bisa terjadi jika dua pihak kehilangan sedikit dari tuntutannya, namun hasil akhir bisa memuaskan keduanya. Istilah ini lebih popular dengan nama win-win solution di mana kedua belah pihak merasa menang dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Selain asumsi-asumsi di atas, juga perlu untuk mengetahui strategi- strategi untuk mengakhiri konflik. Setidaknya ada sepuluh strategi untuk mengakhiri konflik menurut Diane Schilling dalam Fisher (2001 : 296-297), yakni *abandoning* atau meninggalkan konflik, *avoiding* atau menghindari, *dominating* atau menguasai, *obliging* atau melayani, *getting help* atau mencari bantuan, humor atau bersikap humoris dan santai, *postponing* atau menunda, *compromise* atau berkompromi,

integrating atau mengintegrasikan, *problem solving* atau bekerjasama menyelesaikan masalah.

Sementara itu, untuk menyelesaikan konflik, secara teoretis ada banyak sekali model, namun dalam tulisan ini hanya akan di sajikan beberapa model saja. Di antaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, model penyelesaian berdasarkan sumber konflik. Dalam model ini, untuk bisa penyelesaian konflik dituntut untuk terlebih dahulu diketahui sumber-sumber konflik: apakah konflik data, relasi, nilai, struktural, kepentingan dan lain sebagainya. Setelah diketahui sumbernya, baru melangkah untuk menyelesaikan konflik. Setiap sumber masalah tentunya memiliki jalan keluar masing-masing sehingga menurut model ini, tidak ada cara penyelesaian konflik yang tunggal.

Kedua, model *Boulding*. Model *Boulding* menawarkan metode mengakhiri konflik dengan tiga cara, yakni menghindar, menaklukkan, dan mengakhiri konflik sesuai prosedur. Menghindari konflik adalah menawarkan kemungkinan pilihan sebagai jawaban terbaik. Akan tetapi, harus diperhatikan bahwa ini hanya bersifat sementara agar kedua pihak dapat memilih jalan terbaik mengakhiri konflik. Menaklukkan adalah pengerahan semua kekuatan untuk mengaplikasikan strategi perlawanan terhadap konflik. Mengakhiri konflik melalui prosedur rekonsiliasi atau kompromi adalah metode umum yang terbaik dan paling cepat mengakhiri konflik.

Ketiga, model pluralisme budaya. Model pluralisme budaya, dapat membantu untuk melakukan resolusi konflik. Misalnya, individu atau kelompok diajak memberikan reaksi tertentu terhadap pengaruh lingkungan sosial dengan mengadopsi kebudayaan yang baru masuk. Inilah yang kemudian disebut sebagai

asimilasi budaya. Selain asimilasi, faktor yang bisa membuat kita menyelesaikan konflik adalah akomodasi. Dalam proses akomodasi menurut Soekanto (1998 : 239), dua kelompok atau lebih yang mengalami konflik harus sepakat untuk menerima perbedaan budaya, dan perubahan penerimaan itu harus melalui penyatuan penciptaan kepentingan bersama.

Keempat, model intervensi pihak ketiga. Dalam model ini ada beberapa bentuk, yakni *coercion, arbitrasi, dan mediasi* (Soekanto, 1998 : 241). *Coercion* adalah model penyelesaian konflik dengan cara paksaan, di mana masing-masing pihak dipaksa untuk mengakhiri konflik. *Arbitrasi* adalah penyelesaian konflik dengan cara mengambil pihak ketiga untuk memutuskan masalah yang terjadi, dan keputusan pihak ketiga harus dipatuhi oleh masing-masing pihak. Sementara itu, *mediasi* berarti pihak ketiga hanya berfungsi untuk menjembatani penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat.

Keempat hal di atas hanyalah sebagian dari berbagai model penyelesaian konflik yang ada. Masih banyak lagi model-model penyelesaian konflik yang lain. Namun demikian, satu hal yang harus diingat adalah setiap konflik memiliki kompleksitas yang berbeda-beda sehingga harus dipahami secara sungguh-sungguh kerumitan dan kompleksitas konflik yang akan dicari jalan keluarnya apalagi bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang memiliki keragaman budaya. Menurut Konjtaraningrat (1993 : 31), setiap budaya memiliki kearifan-kearifan tersendiri dalam menyikapi permasalahan hidup yang dihadapi, termasuk di dalamnya kearifan dalam menyelesaikan konflik. Kearifan-kearifan seperti inilah yang sering disebut sebagai kearifan lokal *(local wisdom)*. Namun demikian, penyelesaian konflik sering

melupakan adat dan budaya lokal tersebut. Untuk itulah penting untuk menggali kembali kekayaan budaya sendiri.

Umumnya konflik tentang identitas dalam suatu masyarakat cenderung lebih rumit, bertahan lama serta sulit dikelola, sedangkan konflik yang berciri primordial sulit dipecahkan karena sangat emosional. Untuk mengatasi itu semua, tidak ada resep mujarab yang langsung menyembuhkan karena selalu muncul interaksi rumit antarkekuatan berbeda di samping variabel kondisi sosial wilayah tanah air. Pola penyelesaian konflik di suatu daerah tak mungkin diterapkan di daerah lain. Oleh karena itu, dalam menentukan langkah penyelesaian berbagai peristiwa konflik perlu dicermati dan dianalisis, tidak saja berdasarkan teori-teori konflik universal, tetapi perlu juga menggunakan paradigma nasional atau lokal agar objektivitas tetap berada dalam bingkai kondisi, nilai, dan tatanan kehidupan bangsa kita. Faktor-faktor sebagai pendukung analisis pemecahan konflik tersebut antara lain: aktornya, isu, faktor penyebab, lingkupnya, usaha lain yang pernah ada, jenis konflik, arah/potensi, sifat kekerasan, wilayah, fase dan intensitas, kapasitas dan sumbernya, alatnya, keadaan hubungan yang bertikai, dan sebagainya.

5. Upaya Peningkatan Integrasi Sosial Masyarakat

Dalam masyarakat majemuk di Kecamatan Landono dibutuhkan upaya untuk meningkatkan integrasi sosial masyarakatnya dimana terdapat perbedaan suku agama dan adat-istiadat. Oleh karena itu dibutuhkan hal yang merekatkan hubungan agar tercipta suatu keharmonisan di tengah masyarakat. Dari sekian banyak hal yang dapat

merekatkan hubungan masyarakat tersebut, penelitian ini memfokuskan kepada toleransi masyarakat, ketaatan terhadap norma-norma sosial, dan solidaritas.

5.1 Toleransi

Toleransi merupakan salah satu bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formil. Kadang-kadang toleransi timbul secara tidak sadar dan tanpa direncanakan, hal mana disebabkan karena adanya watak orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia, untuk sedapat mungkin menghindarkan diri dari suatu perselisihan (Soekanto, 1998 : 71). Dari sejarah dikenal bangsa Indonesia adalah bangsa yang toleran yang sedapat mungkin menghindarkan diri dari perselisihan-perselisihan.

Disamping itu toleransi juga termasuk salah satu faktor yang dapat mempermudah terjadinya asimilasi. Toleransi terhadap kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan sendiri, hanya mungkin dicapai dalam akomodasi. Apabila toleransi tersebut mendorong terjadinya komunikasi, maka faktor tersebut dapat mempercepat asimilasi.

Halim (2008) dalam arikel yang berjudul "Menggali Oase Toleransi", menyatakan "Toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu *tolerantia,* berarti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan, dan kesabaran". Secara umum, istilah ini mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan kelembutan. *United Nations Educational,Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) mengartikan toleransi sebagai sikap "saling menghormati, saling menerima, dan saling menghargai di tengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan karekter manusia". Untuk itu,

toleransi harus didukung oleh cakrawala pengetahuan yang luas, bersikap terbuka, dialog, kebebasan berfikir dan beragama. Singkatnya toleransi setara dengan bersikap positif dan menghargai orang lain dalam rangka menggunakan kebebasan asasi sebagai manusia. Ada dua model toleransi, yaitu : Pertama, toleransi pasif, yakni sikap menerima perbedaan sebagai sesuatu yang bersifat faktual. Kedua, toleransi aktif, melibatkan diri dengan yang lain ditengah perbedaan dan keragaman. Toleransi aktif merupakan ajaran semua agama. Hakikat toleransi adalah hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai di antara keragaman.

Misrawi (2008 : 18) mengutip pendapat Rainer Forst dalam *Tolerantion and Democracy* (2007) menyebutkan ada dua cara pandang tentang toleransi, yaitu konsepsi yang dilandasi pada otoritas negara (*permission conception*) dan konsepsi yang dilandasi pada kultur dan kehendak untuk membangun pengertian dan penghormatan terhadap yang lain *(respect conception)*.

Dalam hal ini, Forst lebih memilih konsepsi kedua, yaitu toleransi dalam kontek demokrasi harus mampu membangun saling pengertian dan saling menghargai ditengah keragaman suku, agama, ras, dan bahasa. Namun, Christopher (2005 : 5) dalam bukunya yang berjudul *"Lebih Tajam Dari Pedang-Repleksi Agama-Agama Tentang Paradoks Kekerasan"*, menyebutkan permasalahan yang dihadapi sekarang bahwa toleransi dalam kehidupan bersama semakin lemah, dan anti toleransi serta anti pluralisme semakin menguat. Untuk itu toleransi perlu dikembangkan, dan cara mengembangkan toleransi dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan sistem sosial dan sistem budaya.

Di Indonesia, praktik toleransi mengalami pasang surut. Pasang surut ini dipicu oleh pemahaman *distingtif* yang bertumpu pada relasi “mereka” dan “kita”. Tak pelak, dalam berbagai diskursus kontemporer, sering dikemukakan bahwa, radikalisme, ekstremisme, dan fundamentalisme merupakan baju kekerasan yang ditimbulkan oleh pola pemahaman yang eksklusif dan antidialog atas teks-teks keagamaan. Seluruh agama harus bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian. Hal ini tidak akan tercapai hanya dengan mengandalkan teologi eksklusif yang hanya berhenti pada klaim kebenaran, tetapi membutuhkan teologi pluralisme yang berorientasi pada pembebasan. Toleransi yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah: sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling menerima ditengah keragaman budaya, suku, agama dan kebebasan berekspresi. Dengan adanya sikap toleransi, warga suatu komunitas dapat hidup berdampingan secara damai, rukun, dan bekerja sama dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungannya.

5.2 Ketaatan terhadap Norma Sosial

Proses integrasi sosial dapat berjalan dengan baik apabila ditunjang oleh norma-norma sosial dan adat istiadat yang baik. Norma-norma sosial dan adat istiadat merupakan unsur yang mengatur perilaku dengan mengadakan tuntutan mengenai bagaimana orang harus bertingkah laku. Apabila proses integrasi sosial tidak tercapai maka didalam masyarakat akan terjadi disintegrasi sosial.

Agar didalam masyarakat, proses integrasi dapat berjalan dengan baik dan normal, masyarakat harus memperhatikan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi

kehidupan sosial dari masyarakat tersebut. Faktor-faktor sosial tersebut menentukan arah kehidupan sosial untuk menuju integritas sosial. Faktor sosial tersebut adalah tujuan masyarakat, sistem sosial, sistem tindakan dan sistem sanksi. (Waridah, 2004 : 14).

Ketaatan terhadap norma sosial termasuk norma agama akan membentuk integrasi sosial yang kuat. Seorang yang memegang teguh ajaran agamanya masing-masing tidak akan mengganggu ajaran agama lain, begitupun seorang yang telah mengkristal dalam dirinya nilai-nilai sosial yang tertanam sejak kecil di keluarga akan memiliki rasa empati terhadap sesama dan akan melahirkan solidaritas sosial yang tinggi.Integrasi sosial terjadi karena unsur-unsur sosial saling berinteraksi.

5.3 Solidaritas

Kehidupan sosial masyarakat yang diharapkan agar bisa harmonis kembali sangat tergantung pada besarnya keinginan dan kesadaran dari para anggota-anggota kelompok masyarakat secara keseluruhan untuk bersama-sama menyesuaikan diri dari keanekaragaman faham mengenai tujuan-tujuan kelompok masyarakat itu. Apabila reaksi anggota masyarakat terhadap suatu perbedaan faham itu mengalami keseimbangan, maka besar kemungkinan akan terjadi fase solidaritas di tengah masyarakat.

Dengan demikian berarti memungkinkan intensitas integrasi sosial akan meningkat, yaitu tercapainya suatu situasi dimana setiap anggota kelompok masyarakat mempunyai kesediaan untuk bekerjasama dengan koordinasi yang relatif lama. Jika keinginan dan kesadaran itu bisa dipelihara dengan baik demi

kelangsungan hidup sosialnya, maka fase integrasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan-tujuan bersama melalui komunikasi bersama, dan terkoordinasi segala tindakan yang dilakukan oleh para anggota kelompok masyarakat tersebut.

Sebagai ukuran terjaminnya kelangsungan hidup suatu kelompok sosial adalah jika proses integrasi telah dapat menghasilkan suatu keadaan yang homogen. Homogenitas kelompok merupakan indikator bahwa kelangsungan hidup kelompok dalam batas waktu tertentu dapat dipertahankan. Proses Integrasi ini menurut Oqburn dan Nimkoff dalam Soerjono Soekanto (1998 : 98), adalah bukan suatu proses yang dapat berjalan dengan cepat. Integrasi merupakan suatu ikatan berdasarkan norma kelompok, artinya tingkah laku individu sebagai anggota kelompok dituntut harus sesuai dengan kehendak kelompok dan direstui pula atas nama kelompok.

Dalam penelitian ini akan di lihat apakah di Kecamatan Landono yang terdiri dari berbagai suku dan agama mampu menciptakan suatu keadaan yang homogen sehingga tercipta solidaritas kelompok dan hidup berdampingan antar kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain dalam keadaan rukun dan damai.

C. Penelitian yang Relevan

Hari Poerwanto dalam Disertasinya yang berjudul “Orang Khek di Singkawang. Suatu Kajian Mengenai Masalah Asimilasi Orang Cina dalam Rangka Integrasi Nasional di Indonesia” menjelaskan suatu masyarakat yang terintegrasi dengan baik, cenderung memiliki toleransi atau bahkan membiarkan suatu konflik terjadi sebaliknya, apabila masyarakat tersebut lemah derajat integrasinya maka

cenderung bersikap hati-hati terhadap munculnya suatu konflik (Poerwanto, 1990 : 35).

Selain itu Evers et al (1988 : 2) didalam penelitiannya mengenai masalah integrasi keluarga trasmigran ke dalam lingkungan sosial ekonomi setempat di Kalimantan Timur menjelaskan :

> Agar dapat dicapai tujuan untuk memberi bantuan bagi pembangunan wilayah di daerah-daerah pemukiman, para trasmigran harus diintegrasikan kedalam lingkungan sosial dan ekonomi mereka. Terdapat bukti dari berbagai daerah pemukiman yang menunjukkan bahwa proses integrasi ini bukannya tanpa masalah dan konflik antara penduduk transmigran dan penduduk asli sering bertemu

Dari hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan bahwa, ternyata di pemukiman transmigrasi dalam proses integrasi mengalami hambatan. Secara jelas dikemukakan Evers (1988: 3) :

> Pemukiman-pemukiman transmigrasi di satu pihak dan pemukiman penduduk pribumi dilain pihak memiliki kesamaan, namun mereka mempunyai latar belakang masyarakat yang sangat berbeda, yakni mempunyai dasar yang sempit bagi keperluan integrasi disebabkan nilai-nilai, norma, tradisi, bahasa dan kadang-kadang golongan agama. Terlepas dari perbedaan-perbedaan ini, persaingan dalam kesempatan memperoleh sumber daya ekonomi, seperti lot tanah mungkin akan mempengaruhi hubungan ini. Sebagai suatu tindakan pemerintah untuk mengurangi kemungkinan pertentangan dan untuk meningkatkan integrasi, pedoman yang baru saja dilaksanakan untuk transmigrasi menetapkan bahwa 10 % dari pada keluarga di pemukiman diambil dari pada penduduk pribumi daerah-daerah pemukiman, APPDT (Alokasi pemukiman bagi penduduk Daerah transmigran)

Untuk memperlancar proses integrasi tersebut, Evers (1988 : 3) menjelaskan:

> Disamping tindakan ini, perkawinan antara suku didalam lingkungan sosial dan pembauran penduduk dalam pasar-pasar yang ada untuk keperluan barang-barang dan tenaga buruh dan juga pembangunan pasar-pasar yang baru

dilingkungan ekonomi nampak sebagai sarana yang paling penting bagi penyatuan para transmigran.

Dari beberapa tulisan tersebut di atas, dapat dilihat bahwa penelitian tentang integrasi masyarakat majemuk khususnya pada masyarakat majemuk di Kecamatan Landono maupun Sulawesi Tenggara pada umumnya belum pernah dibahas secara komprehensif baik itu mengenai proses integrasi masyarakat majemuk, faktor penghambat dan pendukung integrasi serta upaya peningkatan integrasi masyarakat majemuk, terutama dalam bentuk tesis. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian pertama yang berupaya mengungkap fenomena tersebut yang berupaya mengisi ruang kosong tempat merangkai kajian penelitian ini dan diharapkan memberikan kontibusi pada Daerah Sulawesi Tenggara untuk mempertahankan kehidupan harmonis di tengah masyarakat tanpa membedakan etnis, agama dan adat-istiadat.

D. Kerangka Fikir

Masyarakat majemuk yang berada di Kecamatan Landono merupakan pembauran dari masyarakat lokal (Tolaki Landono), masyarakat transmigran asal Bali, Jawa, Jawa Barata (Sunda), Madura dan pendatang lain (Buton, Muna, Bugis, Toraja dan Makassar). Mereka hidup berdampingan dan berintegrasi melalui proses asimilasi dan akulturasi.

Dalam proses integrasi masyarakat terdapat faktor-faktor pendorong sehingga proses integrasinya berjalan cepat, yaitu faktor budaya yang dipersatukan

oleh Pancasila sebagai nilai luhur budaya bangsa, faktor kekerabatan dan faktor kepatuhan masyarakat terhadap pejabat pemerintahan.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa ada juga faktor yang menghambat terjadinya integrasi tersebut, yaitu adanya persaingan (*competition),* kontraversi dan pertentangan/pertikaian (*conflict*). Namun yang harus diwaspadai adalah adanya konflik (*conflict*) yang berujung kekerasan.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu upaya dalam meningkatkan integrasi sosial masyarakat, dimana ketika upaya tersebut dijalankan dengan baik oleh masyarakat dapat meminimal faktor penghambat integrasi masyarakat dan mempercepat terjadinya proses integrasi sosial di masyarakat. Upaya peningkatan integrasi sosial dilakukan dengan cara memupuk dan menumbuhsuburkan toleransi masyarakat sebagai salah satu warisan luhur nenek moyang bangsa Indonesia, ketaatan terhadap norma sosial dan mempererat solidaritas di tengah masyarakat. Dengan mempercepat proses integrasi masyarakat maka mempercepat pula terwujudnya integrasi sosial.

Gambar 1
Kerangka Konseptual Proses Integrasi Masyarakat Majemuk

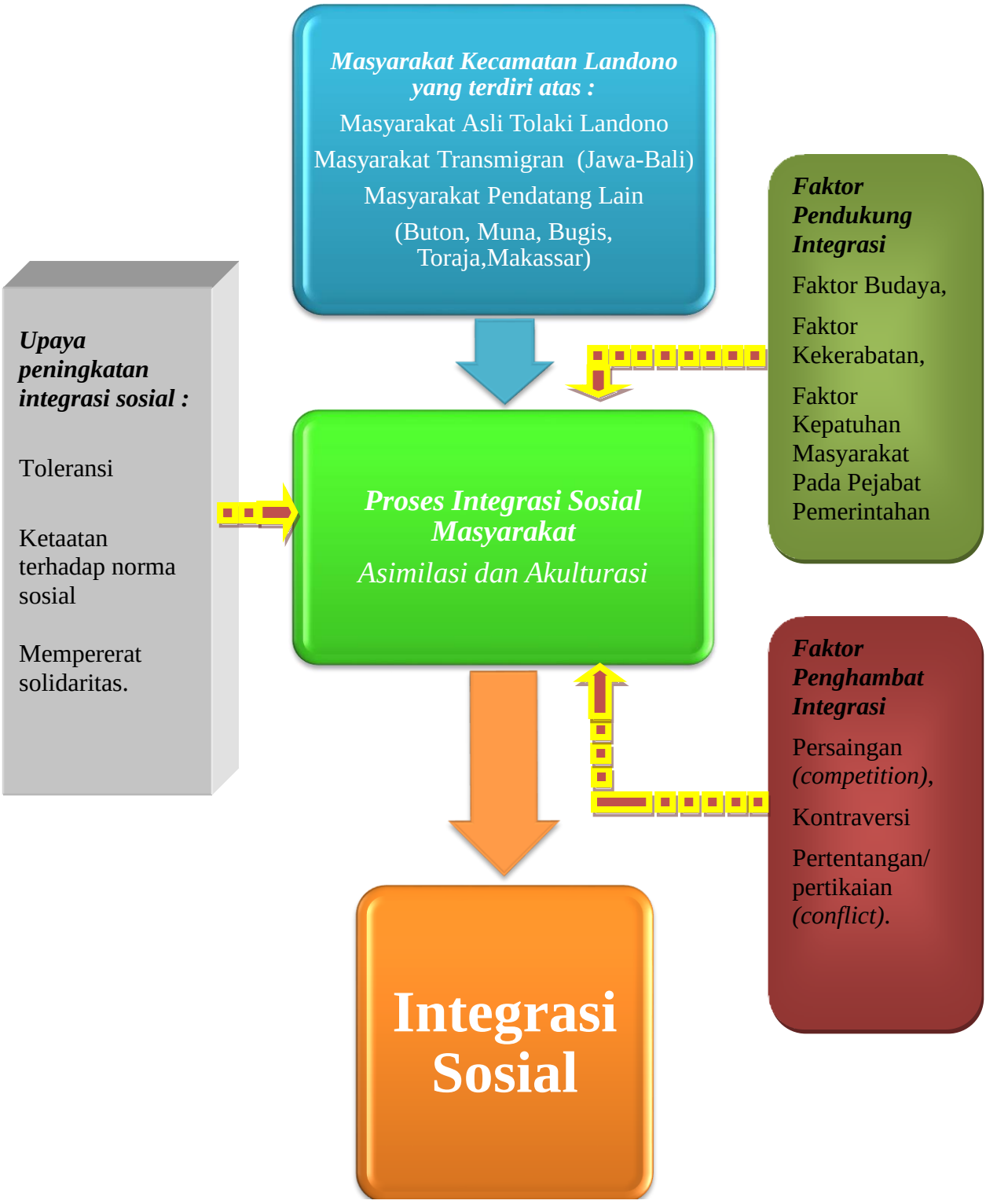

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya bersifat eksplanatoris, yaitu mencari kejelasan data mengenai bagaimana proses integrasi masyarakat majemuk di Landono, dimana jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam mencari dan mengumpulkan data atau masalah yang diteliti tidak terikat untuk membuktikan suatu hipotesis atau benar tidaknya suatu teori yang pernah dikemukakan oleh para ahli, meskipun ketika berangkat ke lapangan telah memiliki konsep-konsep yang merupakan generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga bisa dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama mengenai masalah integrasi masyarakat pada masyarakat majemuk berdasarkan teori-teori para ahli yang dipakai sebelumnya.

Cara ini menjadikan peneliti di lapangan tidak saja mengumpulkan data, akan tetapi sekaligus memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh. Penggunaan cara ini didasarkan atas suatu pandangan, bahwa sebuah penelitian eksplanatoris yang bersifat "awal" *(preliminary research),* diharapkan dapat memperkaya data tentang konsep-konsep sosial baru dan dapat mengembangkan tilikan ilmiah secara otonom. Hal ini dilakukan mengingat orientasi utama penelitian ini adalah sebagai upaya memahami persepsi-persepsi serta sikap sosial (atau konsep dan gagasan), ide-ide sosial yang hendak diwujudkan, atau sikap kultural yang dipengaruhi oleh berbagai motivasi di mana satu sama lain saling berkaitan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Landono. Pemilihan Landono sebagai lokasi penelitian dikarenakan tingkat kemajemukan masyarakatnya cukup tinggi, di mana masyarakat Kecamatan Landono terdiri dari masyarakat asli yang bersuku tolaki Landono, masyarakat transmigran asal Jawa-Bali dan masyarakat pendatang lain (Buton, Muna, Bugis, Toraja dan Makassar). Informasi yang di dapat melalui koordinator statistik Kecamatan Landono di ketahui bahwa dari jumlah keseluruhan penduduk Landono yang sebesar 11.451 jiwa, di dapat perbandingan sebesar 45% jumlah penduduk asli tolaki, 35% para transmigran dan 20 % pendatang lain. Dari prosentase tersebut diketahui bahwa jumlah pendatang secara keseluruhan lebih banyak dari jumlah penduduk asli tolaki yaitu 55% pendatang dan 45% penduduk asli tolaki

Waktu penelitian dilaksanakan selama tiga bulan mulai awal maret 2010 sampai dengan awal Juni 2010.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian, yaitu :

a. Data primer

Data primer penelitian ini adalah proses integrasi masyarakat transmigran dan penduduk asli Tolaki Landono serta beberapa penduduk pendatang lain di Kecamatan Landono. Data primer ini bersumber dari wawancara dan observasi beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan beberapa masyarakat yang dianggap layak untuk dijadikan informan sebagai subjek penelitian ini baik

yang berasal dari masyarakat transmigrasi, penduduk asli Tolaki Landono maupun masyarakat pendatang lain yang tinggal dan menetap di Kecamatan Landono dengan berdasarkan pertimbangan bahwa orang-orang tersebut mengetahui banyak tentang apa yang akan diteliti juga mudah untuk melakukan komunikasi dengan mereka. Namun demikian, dari beberapa informan ada beberapa orang yang tidak mau disebutkan namanya.

Penentuan subjek penelitian didasarkan pada pertimbangan situasi sosial *(social situation)* yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*space*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis serta pada keterbatasan kemampuan peneliti dan ketercakupan informasi data yang dibutuhkan dengan tetap mempertimbangkan keterwakilan para tokoh adat, tokoh masyarakat dan unsur pemerintah setempat, baik dari Kecamatan, Desa, Kepolisian dan Koramil.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah gambaran umum lokasi penelitian. Data sekunder ini bersumber dari dokumen-dokumen tertulis yang diperoleh dari Kantor Kecamatan Landono, Kantor Badan Pusat Statistik Konawe Selatan dan Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara serta Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara.

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi dan pendekatan fungsional struktural. Kedua pendekatan ini digunakan dengan pertimbangan bahwa:

Pertama, pendekatan fenomenologi digunakan karena penelitian ini bersifat fenomenologi sosial yang berusaha menerapkan metodologi ilmiah dalam meneliti fakta-fakta sosial yang bersifat subjektif seperti pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, ide-ide, emosi-emosi, maksud-maksud, pengalaman dan sebagainya dari seseorang yang diungkapkan dalam tindakan luar baik perkataan dan perbuatan (Suprayogo dan Tabroni, 2003 : 103-104). Oleh karenanya, pendekatan fenomenologi ini digunakan ketika melakukan wawancara dengan subjek penelitian maupun ketika melakukan observasi pada saat yang bersangkutan melakukan aktivitas dan fenomena sosial masyarakat secara umum di Kecamatan Landono.

Kedua, pendekatan struktural fungsional digunakan dalam penelitian ini karena pendekatan tersebut memiliki anggapan dasar sebagai berikut: (1) Masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem dari pada bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain; (2) hubungan pengaruh mempengaruhi di antara bagian-bagian tersebut adalah bersifat ganda dan timbal balik; (3) sekalipun integrasi sosial tidak dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial cenderung bergerak ke arah ekuilibrium yang bersifat dinamis, menanggapi perubahan-perubahan yang datang dari luar dengan kecenderungan memelihara agar perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sebagai akibatnya hanya akan mencapai derajat minimal.

Pendekatan struktural fungsional ini, memandang masyarakat terbentuk dari keseluruhan status-status dan peranan-peranan beserta sarana-sarananya yang tersusun secara terpola. Setiap individu menduduki tempat tersendiri, mempunyai kewajiban terhadap orang lain dan menuntut haknya dari orang lain. Masyarakat

dilihat sebagai jaringan status-status dan peranan-peranan, yang dalam pandangan fakta sosial setiap kelompok sosial pada dasarnya terdiri dari seperangkat status dan peranan yang saling berhubungan. Selain itu pendekatan ini dapat menjadi alat pembenaran terhadap proses di atas dengan teori keharusan fungsional (*functional imperative*) atau syarat-syarat fungsional (*functional requisite*) dalam struktur masyarakat.

Dengan demikian, pendekatan ini menekankan anggapan-anggapan dasarnya pada peranan unsur-unsur normatif dan tingkah laku sosial, khususnya pada proses-proses dimana hasrat-hasrat perseorangan diatur secara normatif untuk menjamin terpeliharanya stabilitas sosial. Oleh karenanya, maka pengaplikasian pendekatan struktural fungsional dalam penelitian ini, sebelum peneliti memasuki tahap lapangan atau menemui tokoh masyarakat, adat dan agama yang menjadi subjek penelitian, ada beberapa prosedur terstruktur yang dilalui dengan mendekati atau menemui beberapa unsur yang memiliki fungsi atau peran menempati struktur tertentu dan terkait yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pertama, peneliti melakukan konfirmasi dengan Kepala Badan Riset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mendapatkan izin penelitian.

Kedua, setelah mendapatkan izin penelitian, selanjutnya melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat, yaitu Bupati Konawe Selatan. Dari Bupati Konawe Selatan, lewat Kepala Badan Kesbang Konawe Selatan selanjutnya izin penelitian direkomendasikan kepada Camat Landono.

Ketiga, terkait dengan data-data penelitian yang sifatnya dokumenter, peneliti melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi Pemerintahan Daerah (Kasi. PMD)

Kecamatan Landono, Kepala Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) Landono, Kapolsek Landono, Danramil Landono, Kepala Kandepag Kabupaten Konawe Selatan, Kanwil Depag Sulawesi Tenggara, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kepala Disnakertrans Provinsi Sulawesi Tenggara.

Keempat, untuk mengetahui proses integrasi antara masyarakat pendatang dan lokal sejak awal kedatangan para transmigrasi di Kecamatan Landono, peneliti mencari keberadaan tokoh dan saksi hidup untuk dimintai keterangannya baik itu dari suku asli tolaki maupun para transmigran, peneliti juga mendekati atau berkoordinasi dengan para tokoh adat dan keagamaan. Di samping itu, peneliti juga menemui pihak-pihak tertentu untuk melakukan konfirmasi tentang kejadian dan fenomena yang terjadi di masyarakat dengan pertimbangan bahwa orang tersebut mengetahui betul kejadian yang terjadi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam studi ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan, yaitu wawancara tidak berstruktur atau wawancara mendalam. Wawancara tidak berstruktur tersebut terdiri dari wawancara terarah dan wawancara tidak terarah. Melalui wawancara terarah diungkap berbagai persoalan yang berkaitan dengan proses integrasi pada masyarakat di Kecamatan Landono. Sementara dari wawancara tidak terarah diungkap berbagai informasi yang

mendukung data yang diperoleh melalui wawancara terarah. Untuk mendukung wawancara tidak berstruktur tersebut dilakukan juga wawancara sambil lalu *(casual interview)*, di mana subjek studi atau informan yang diwawancarai tidak diseleksi lebih dahulu dan wawancara tersebut dilakukan secara informal dan spontanitas. Sedangkan untuk menggali gagasan, ide, pendapat dan pandangan tokoh masyarakat, agama, dan adat serta unsur pemerintah menggunakan wawancara terbuka *(open-ended)* yang dilakukan pada waktu dan konteks yang dianggap tepat guna keakuratan data yang diperoleh.

Di samping itu, studi ini menggunakan wawancara yang dilakukan secara langsung kepada para tokoh dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh para tokoh dan beberapa masyarakat tentang proses integrasi di Kecamatan Landono. Kemudian yang menjadi instrumen pokok dari penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara yang dipersiapkan sebelumnya dan buku catatan kecil. Kesemuanya ini dipakai guna mempermudah reproduksi data agar data yang diperoleh betul-betul dapat memenuhi standar keabsahan data.

2. Observasi

Teknik ini digunakan untuk mengetahui secara jelas apa yang dipikirkan, dilakukan, dan dihasilkan oleh subyek penelitian. Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung fenomena-fenomena (gejala-gejala) yang difokuskan pada masalah yang menjadi perhatian studi dalam hal ini tentang pelaksanaan proses integrasi antara masyarakat asli Tolaki Landono, para transmigran dan pendatang lain di Kecamatan Landono sebagai gambaran proses integrasi pada masyarakat

majemuk yang terjadi di Indonesia. Di dalam melakukan observasi peneliti menggunakan buku catatan kecil.

3. Dokumentasi

Data dokumentasi ini digunakan di samping untuk mengetahui gambaran daerah penelitian, latar belakang agama dan sosio kultural masyarakat di Landono, juga digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi yang dilakukan pada masyarakat majemuk di Kecamatan Landono.

F. Teknik Analisis Data

Dalam studi ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Hal ini didasari beberapa alasan :

Pertama, yang dikaji adalah makna dari suatu tindakan atau apa yang berada di balik tindakan seseorang. Kedua, di dalam menghadapi lingkungan sosial, individu memiliki strategi bertindak yang tepat bagi dirinya sendiri, sehingga memerlukan pengkajian yang mendalam. Penelitian kualitatif memberikan peluang bagi pengkajian mendalam terhadap suatu fenomena. Ketiga, penelitian tentang keyakinan, kesadaran dan tindakan individu di dalam masyarakat sangat memungkinkan menggunakan penelitian kualitatif karena yang dikaji ialah fenomena yang tidak bersifat eksternal dan berada di dalan diri masing-masing invidu. Keempat, penelitian kualitatif memberikan peluang untuk meneliti fenomena secara holistik. Fenomena yang dikaji merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan karena tindakan yang terjadi di kalangan masyarakat bukanlah tindakan yang diakibatkan oleh satu dua faktor, akan tetapi adalah melibatkan sekian banyak faktor yang saling terkait. Kelima, penelitian kualitatif

memberikan peluang untuk memahami fenomena menurut *emic view* atau pandangan aktor setempat. Di sini peneliti hanyalah orang yang belajar mengenai apa yang menjadi pandangan, ide, gagasan dan tindakannya, terutama terkait proses integrasi masyarakat majemuk di daerah yang masyarakatnya plural. Keenam, proses tindakan yang di dalamnya terkait dengan makna subjektif haruslah dipahami di dalam kerangka "ungkapan" mereka sendiri, sehingga perlu dipahami dari kerangka penelitian kualitatif.

Setelah data ditelaah secara cermat, dilakukan penjabaran data ke dalam kategori-kategori dan karateristiknya berdasarkan beberapa tema sesuai dengan tujuan penelitian kemudian membangun kerangka konseptual dalam bentuk proposisi-proposisi sebagai penyederhanaan dari data yang diperoleh tersebut.

Untuk membangun keyakinan bahwa data yang diperoleh betul-betul dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dilakukan uji keabsahan data lewat triangulasi data, yaitu dengan cara membandingkan hasil observasi/pengamatan dengan data hasil wawancara, data hasil wawancara dengan data dokumentasi, dan data hasil observasi/pengamatan dengan data dokumentasi.

Untuk memahami data, baik mengenai pandangan tokoh dan informan lain terhadap keberadaan pihak lain dalam memelihara hubungan harmonis antar masyarakat, menggunakan konten analisis yang holistik dengan tetap memperhatikan objektivitas, generalisasi, sekaligus mencakup upaya klasifikasi dengan menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi. Kemudian data-data yang terkumpul diseleksi, disusun, diberi atau dikurangi tekanan, dan ditempatkan dalam suatu macam urutan kausal dan pemaparan yang argumentatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Terbentuknya Kecamatan Landono dan Sistem Pemerintahannya

Sebelum tahun 1960 wilayah Kecamatan Landono masuk dalam wilayah Distrik Konda yang terdiri dari 4 kepala kampung, yaitu Landono, Endanga, Wuura dan Sabulakoa. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang terbentuknya Daerah TK II Kendari dengan diangkatnya Drs. Abdullah Silondae selaku Bupati Kendari, maka pada tahun 1960 sistem pemerintahan telah berubah dengan penghapusan sistem kedistrikan dengan dibentuknya Kecamatan-Kecamatan dan Desa-Desa. Pada awalnya wilayah Kabupaten Kendari terdiri dari 7 Kecamatan, kemudian berkembang menjadi 12 Kecamatan dan terus bertambah menjadi 18 Kecamatan. Saat itu Landono masuk dalam wilayah Kecamatan Ranomeeto.

Selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 1987 Kecamatan Landono diresmikan yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari. Seiring dengan perkembangan yang begitu pesat, maka pada tanggal 2 Mei 2003 diresmikanlah Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kendari yang terdiri dari 11 Kecamatan yang hingga kini telah menjadi 22 Kecamatan, dan Kecamatan Landono adalah salah satunya.

Wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Landono dengan Ibukotanya Landono terdiri dari 22 desa dengan status hukum 3 Desa persiapan dan 19 Desa yang sudah definitif. Walaupun ibukotanya tetap bernama Landono namun secara administratif kantor

Kecamatan Landono dan kantor pelayanan umum lainnya seperti Puskesmas, kantor Polsek Landono, dan kantor Koramil Landono berada dalam wilayah desa Tridanamulya.

Dalam setiap desa di Kecamatan Landono telah terbentuk 4 Dusun dengan membawahi 8 RT setiap Desa. Disetiap desa telah dilengkapi dengan aparat desa, mulai dari Sekretaris Desa (Sekdes) sampai dengan Kepala Urusan (Kaur) dan dalam menjalankan tugas sehari-hari semua desa memiliki Kantor.

Data tentang status pemerintahan dan jumlah SLS menurut desa/keluruhan tahun 2008 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Status Pemerintahan dan Jumlah SLS
Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2008

	Desa/Kelurahan	Status Pemerintahan	Jumlah SLS Dusun/Lingk.	RT
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Endanga	Desa	4	8
2.	Amotowo	Desa	4	8
3.	Kel. Landono	Kelurahan	4	8
4.	Arongo	Desa	4	8
5.	Tridanamulya	Desa	4	8
6.	Lalonggapu	Desa	4	8
7.	Watabenua	Desa	4	8
8.	Abenggi	Desa	4	8
9.	Landono II	Desa	4	8
10.	Asaria	Desa	4	8
11.	Wawobende	Desa	4	8
12.	Talumbinga	Desa	4	8
13.	Tetenggabo	Desa	4	8
14.	Sabulakoa	Desa	4	8
15.	Wonuakoa	Desa	4	8
16.	Watu-watu	Desa	4	8
17.	Koronua	Desa	4	8
18.	Wonuasangia	Desa	4	8
19.	Morinimulya *)	Persiapan	4	8
20.	Lakomea	Desa	4	8
21.	Ulu Sabulakoa *)	Persiapan	4	8
22.	Upt. Watu-watu *)	Persiapan	3	6
	Jumlah		87	174

Sumber : BPS Konsel, 2009
*catatan : *) Desa persiapan*

Dari tabel 1 diketahui bahwa di Kecamatan Landono terdapat 21 Desa dan 1 Kelurahan yang terdiri dari 87 dusun dan 174 rukun tetangga. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dibidang pemerintahan, pembangunan maupun pembinaan Kemasyarakatan Kecamatan Landono Memiliki beberapa fasilitas antara lain:

1. Kantor Kecamatan 1 (Satu) buah dengan jumlah pegawai sebanyak 30 orang, diantaranya : Pegawai Negeri Sipil 27 orang dan Pegawai Insentif sebanyak 3 orang.
2. Kantor Lurah / Desa adalah 22 buah dengan jumlah aparat Desa/ Kelurahan adalah 411 orang.
3. Lembaga Kelurahan dan Desa adalah (BPD dan LPM) sebanyak 330 orang dengan jumlah pengurus masing-masing sebagai barikut :
   - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 220 orang.
   - Badan Perwakilan Desa (BPD) 110 orang.
   - Lembaga Kepemudaan baik tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa berjumlah 22 buah dengan jumlah pengurus 432 orang.
4. Kantor Urusan Agama (KUA) 1 (satu) buah dengan jumlah pegawai 3 orang ditambah dengan pembantu PPN Desa 22 orang.
5. Kantor Koramil 1 (Satu) buah dengan jumlah Personil 30 orang.
6. Kantor Polsek 1 (Satu) buah dengan jumlah Personil 20 orang.
7. Dinas Cabang Pendidikan Nasional 1 (satu) buah dengan jumlah pegawai 15 orang.

8. Organisasi Politik Tingkat Kecamatan 23 orang.
9. Puskesmas 1 (Satu) buah dengan jumlah Pegawai 39 orang yaitu PNS 39 orang.
10. Polindes 7 buah.
11. Puskesmas Pembantu 4 buah.

2. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Wilayah Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, secara geografis terletak di bagian Selatan Garis Katulistiwa berada di antara 4^0 00'00" – 4^0 10'00" Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur di antara 122^0 14' – 122^0 40" Bujur Timur.

Letak wilayah Kecamatan Landono, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pondidaha (Kab. Konawe), sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ranomeeto, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Palangga dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Angata.

Luas wilayah Kecamatan Landono adalah 326 Km^2 atau 3,26 persen dari luas Kabupaten Konawe Selatan. Kecamatan Landono memiliki 21 desa dan 1 kelurahan dengan luas wilayah setiap desa yang sangat beragam. Kelurahan Landono merupakan wilayah yang paling luas disusul desa Landono II dan desa persiapan UPT Watu-Watu merupakan desa tersempit wilayahnya namun memiliki tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi dibandingkan desa lain dengan jumlah penduduk 763 jiwa (lihat tabel 2). Akses Kecamatan Landono dari Kota Kendari (Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara) keseluruh desa di wilayah Kecamatan Landono relatif lancar.

Kecamatan Landono merupakan wilayah dengan topografi berbukit dan dataran. Terdapat 14 desa yang memiliki topografi berbukit dan 8 desa merupakan dataran. Rata-rata ketinggian desa dari permukaan laut berkisar antara 40 hingga 137 m diatas permukaan laut, hasil ini sesuai dengan pengukuran GPS (BPS Konsel, Kecamatan Landono dalam Angka 2009 : 1).

3. Iklim, Curah Hujan, dan Suhu Udara

Sebagaimana daerah-daerah lain di Sulawesi Tenggara, di Kabupaten Konawe Selatan khususnya Kecamatan Landono hanya dikenal dua musim, yakni musim kemarau dan musin hujan. Keadaan musim ini sangat dipengaruhi oleh arus angin yang bertiup di atas wilayah Landono.

Pada bulan November sampai dengan Maret angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Benua Asia dan Samudera Pasifik. Pada bulan-bulan tersebut terjadi musim penghujan. Sekitar bulan April, arus angin selalu tidak menentu dengan curah hujan yang tidak merata. Musim ini dikenal dengan musim pancaroba atau peralihan antara musim hujan dan musim kemarau. Pada bulan Mei sampai dengan bulan Agustus, angin bertiup dari arah Timur berasal dari benua Australia yang kurang mengandung uap air. Hal ini mengakibatkan kurangnya curah hujan di daerah ini dan pada bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober terjadi musim kemarau. Namun keadaan musim juga sering menyimpang dari kebiasaan. (BPS Konsel, 2009 : 7).

Curah hujan pada tahun 2008 mencapai mencapai 2.301 mm dalam 242 Hari Hujan (HH). Dibanding tahun 2007 curah hujan menurun namun Hari Hujan (HH)

meningkat, masing-masing 2.366 mm dalam 203 HH (BPS Konsel, 2009 : 7). Suhu udara di daerah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Perbedaan ketinggian permukaan laut mengakibatkan perbedaan suhu yang sedikit berbeda untuk masing-masing tempat, namun secara keseluruhan wilayah Kecamatan Landono merupakan daerah bersuhu tropis. Menurut data yang diperoleh dari Pangkalan Udara Haluoleo Kendari, selama tahun 2009 sampai dengan bulan april 2010 suhu udara maksimum 32 ^{o}C dan minimum 21 ^{o}C. Tekanan udara rata-rata 1.008,9 milibar dengan kelembaban udara rata-rata 79 persen. Kecepatan angin di Landono selama tahun 2009 sampai dengan bulan april 2010 pada umumnya berjalan normal mencapai 4 m/detik (wawancara, 12 April 2010).

4. Keadaan Demografi

a. Pertumbuhan dan Persebaran Penduduk

Hasil registrasi/pendataan potensi desa tahun 2008 jumlah penduduk Kecamatan Landono sebanyak 11.451 jiwa yang terdiri dari 5.722 laki-laki dan 5.729 perempuan dengan laju pertumbuhan penduduk 0,96 dan persebaran sebesar 4,77 % (BPS Konsel, Konawe Selatan Dalam Angka 2009 : 64-65).

Berikut informasi tentang jumlah penduduk dan kepadatan penduduk menurut desa dan kelurahan kecamatan Landono tahun 2008, dapat dilihat pada tabel 2

Tabel 2
Kepadatan Penduduk Kecamatan Landono
Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2008

	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah*) (Km2)	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km2)
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Endanga	17	362	21,29
2.	Amotowo	7	922	131,71
3.	Kel. Landono	50	700	14,00
4.	Arongo	25,5	279	10,94
5.	Tridanamulya	2,28	399	175,00
6.	Lalonggapu	2,4	346	144,17
7.	Watabenua	32	484	15,13
8.	Abenggi	5,86	586	100,00
9.	Landono II	26,14	540	20,66
10.	Asaria	45	465	10,33
11.	Wawobende	7	679	97,00
12.	Talumbinga	4,19	546	130,31
13.	Tetenggabo	9,05	511	56,46
14.	Sabulakoa	8,76	620	70,78
15.	Wonuakoa	5,98	460	76,92
16.	Watu-watu	9	217	24,11
17.	Koronua	12	444	37,00
18.	Wonuasangia	20	685	34,25
19.	Morinimulya *)	3,7	508	137,30
20.	Lakomea	24,58	472	19,20
21.	Ulu Sabulakoa *)	6,48	463	71,45
22.	Upt. Watu-watu *)	2,14	763	356,54
	Jumlah	326	11.451	1.754,56

Sumber : BPS Konsel, 2009
*catatan : *) Desa persiapan*

Dari tabel 2 diketahui bahwa penduduk terbanyak berada di desa Amotowo yaitu sebanyak 922 jiwa tetapi kepadatan penduduk terbesar terletak di desa Upt

Watu-watu dengan kepadatan 356,54 jiwa/km^2. Untuk wilayah terluas berada di Kelurahan Landono dengan 50 km^2 dan Desa Upt Watu-watu menempati wilayah terkecil dengan 2,14 km^2.

Untuk mengetahui perkembangan penduduk Kecamatan Landono maka berikut disajikan data perkembangan penduduk Kecamatan Landono dari tahun 2004-2008 dalam tabel 3 berikut :

Tabel 3
Perkembangan Penduduk Kecamatan Landono
2004 - 2008

Kecamatan ***Sub districts***	**Tahun / *Year***				
	2004	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**
Landono	20.029	20.431	20.682	11.342	11.451
Mowila	-	-	-	10.165	10.250

Sumber : BPS Kabupaten Konawe Selatan, 2009

Dari tabel 3 diatas di ketahui pada tahun 2004 jumlah penduduk di Kecamatan Landono sebanyak 20.029 jiwa. Lalu bertambah menjadi 20.431 jiwa di tahun 2005 dan naik menjadi 20.682 jiwa. Pada tahun 2007 penduduk di Kecamatan Landono mengalami penurunan secara kuantitas dikarenakan adanya pemekaran wilayah Kecamatan dengan dipecahnya wilayah Kecamatan Landono menjadi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Landono (induk) dan Kecamatan Mowila (pecahan Kecamatan Landono), sehingga menjadi 11.342 jiwa. Dan di tahun 2008, penduduk Kecamatan Landono naik menjadi 11.451 jiwa.

b. Kemajemukan Penduduk Berdasarkan Suku Bangsa

Diferensiasi sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa menunjukkan bahwa masyarakat terdiri atas berbagai suku bangsa dan bahasa dengan kebudayaan masing-masing. Suku bangsa (*ethnic group*) merupakan suatu golongan manusia yang terikat oleh suatu kesadaran dan identitas "kesatuan kebudayaan", sedangkan kesadaran dan identitas tersebut seringkali (tetapi tidak selalu) dikuatkan oleh kesatuan bahasa.

Berdasarkan data terakhir (Sensus Penduduk 2000), setidaknya ada 8 (delapan) suku bangsa yang mendiami Kabupaten Kendari yaitu Buton 6.883 jiwa, Bugis 58.525 jiwa, Tolaki 218.208 jiwa, Muna 8.081 jiwa, Jawa 71.631 jiwa, Bali 22.124 jiwa, Bajao 10.102 jiwa, Madura 465 jiwa, dan lainnya 48.881 jiwa, dari jumlah total penduduk Kabupaten Kendari pada saat itu sebanyak 444.910 jiwa. Delapan suku bangsa tersebut tidak termasuk suku bangsa Makassar dan Sunda yang belum teridentifikasi dengan baik, padahal kedua suku bangsa tersebut sudah lama mendiami Kabupaten Kendari. Dalam data sensus 2000 terdapat suku bangsa Jawa namun tidak memasukkan suku bangsa Sunda, sementara kedua suku bangsa tersebut berbeda. Keberadaan suku bangsa Sunda (Jawa Barat) di Kabupaten Kendari sejak tahun 1968 lewat program transmigrasi. Begitu pula dengan suku bangsa Makassar yang banyak menjadi pendatang di Kabupaten kendari. Sementara suku bangsa terbesar adalah suku bangsa asli yaitu Tolaki dengan 218.208 jiwa yaitu sebesar 49 % dari jumlah penduduk Kabupaten Kendari.

Kecamatan landono pada saat dilaksanakannya sensus penduduk tahun 2000 secara administratif masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kendari, sebab pada saat itu kabupaten Konawe Selatan belum berdiri. Untuk mengidentifikasi jumlah suku

bangsa yang mendiami Kecamatan Landono belum dapat dilakukan sebab data sensus 2000 tidak diklasifikasikan berdasarkan Kecamatan namun di klasifikasikan menurut Kabupaten, kecuali untuk Kota Kendari dilakukan klasifikasi berdasarkan Kecamatan. Walaupun demikian suku bangsa penduduk Kecamatan Landono dapat diidentifikasi melalui kedatangan para transmigran yang datang di daerah tersebut yaitu suku bangsa Tolaki Landono yang merupakan penduduk asli, kemudian lewat program penempatan transmigrasi Landono I membawa suku bangsa Jawa, Madura dan Bali. Dilanjutkan dengan program transmigrasi Landono II yang membawa suku bangsa Sunda (Jawa Barat) dan pendatang lain yang terdiri dari suku bangsa Buton, Muna, Bugis, Toraja dan Makassar. Namun demikian, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Koordinator Statistik Kecamatan Landono, Risman Bumbung H diketahui perbandingan etnis di Landono adalah 55% pendatang dan 45% penduduk asli Tolaki Landono.

Tabel 4
Jumlah Penduduk Kecamatan Landono berdasarkan suku bangsa

Penduduk Asli Tolaki	Pendatang		Jumlah Penduduk Kecamatan Landono (jiwa)
	Transmigran asal Jawa-Bali	Pendatang Lain (Buton, Muna, Bugis, Toraja Makassar)	
5153	4008	2290	11.451
45%	35%	20%	100%

Sumber : wawancara dengan Koordinator Statistik Kecamatan Landono, 2010

Berdasarkan tabel 4, diketahui bahwa jumlah pendatang lebih besar dari jumlah penduduk asli Tolaki di Kecamatan Landono saat ini, dengan klasifikasi penduduk asli sebesar 45%, pendatang 35% Jawa-Bali yang merupakan para transmigran dan keturunannya serta 20% pendatang lain yaitu suku Buton, Muna,

Bugis, Toraja, Makassar dan lain-lain yang etnisnya belum teridentifikasi (wawancara, Senin 7 Juni 2010).

c. Kemajemukan Penduduk Berdasarkan Agama

Diferensiasi sosial berdasarkan perbedaan agama terwujud dalam kenyataan sosial bahwa masyarakat terdiri dari orang-orang yang menganut suatu agama tertentu termasuk dalam suatu komunitas atau golongan yang disebut umat.

Berdasarkan data pada tabel 1, jumlah penduduk Kecamatan Landono pada tahun 2008 sebanyak 11.451 jiwa. Data ini berbeda dengan data penduduk menurut agama tahun 2008 yang dikeluarkan oleh BPS Konawe Selatan dalam Konawe Selatan dalam Angka 2009 sebagaimana pada tabel 4 yang berjumlah 21.701 jiwa. Hal ini disebabkan data yang dikeluarkan oleh BPS Konsel tersebut masih menggabungkan data penduduk Kecamatan Landono dan Kecamatan Mowila yang memang dulunya tergabung dalam satu kecamatan yaitu Kecamatan Landono namun saat ini telah dipisah menjadi dua Kecamatan. Sedangkan data penduduk pada tabel 1 bersumber dari data yang berada di Kantor Kecamatan Landono, namun datanya belum di lengkapi dengan jumlah pemeluk agama di masing-masing desa. Jika mengacu pada jumlah penduduk menurut agama sebagaimana pada tabel 5, penduduk Kecamatan Landono di antaranya 16.662 orang (76,78 %) adalah pemeluk agama Islam, sebanyak 454 orang (2,09 %) pemeluk agama Kristen Protestan, sebanyak 4.585 orang (21,13 %) pemeluk agama Hindu, dan masing-masing 0 % untuk pemeluk Katholik dan Budha.

Dengan demikian, dalam hal jumlah penduduk berdasarkan agama, maka Islam merupakan agama mayoritas yang dipeluk oleh penduduk Kecamatan Landono dengan jumlah 16.662 orang (76,78 %).

Berdasarkan data terakhir yang diperoleh dari BPS Konawe Selatan (2009: 139), jumlah pemeluk agama yang tersebar di kecamatan Landono dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5
Banyaknya Pemeluk Agama di Kecamatan Landono
Tahun 2008

Kecamatan	Agama					
	Islam	Protestan	Katholik	Hindu	Budha	Jumlah
Landono	16.662	454	0	4.585	0	21.701

Sumber : Departemen Agama Kab. Konawe Selatan, 2009

Berdasarkan tabel 5 diatas Departemen Agama Kabupaten Konawe Selatan belum mengadakan pemisahan data pemeluk agama Kecamatan Mowila dan Kecamatan Landono. Dari data di tabel 5 diatas terlihat jumlah pemeluk agama sebanyak 21.701 yang terdiri dari 11.451 orang penduduk Kecamatan Landono dan 10.250 orang penduduk Kecamatan Mowila.

Keadaan Sarana Ibadah

Pembangunan di bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diarahkan untuk menciptakan keselarasan hubungan antara manusia dan penciptanya, antara manusia dan alam sekitarnya, serta keharmonisan hubungan antara manusia dengan sesamanya.

Kegiatan pembangunan di bidang agama seperti sarana peribadatan yang juga berfungsi sebagai tempat pembinaan umat beragama dan kegiatan keagamaan lainnya dapat dilihat pada tabel 6 berikut :

Tabel 6
Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan
di Kecamatan Landono Tahun 2008

Kecamatan	Tempat Peribadatan					
	Masjid	Surau	Gereja Katolik	Gereja Protestan	Pura	Vihara
Landono	24	8	0	3	14	0

Sumber : PODES 2008, BPS

Walaupun jumlah pemeluk agama masih menggabungkan data dari dua Kecamatan yaitu Kecamatan Landono dan Kecamatan Mowila, namun dalam jumlah sarana peribadatan telah diadakan pemisahan antara Kecamatan Landono dan Kecamatan Mowila. Dari banyaknya sarana peribadatan pada tabel 6 diatas terlihat bahwa di Kecamatan Landono, sarana peribadatan umat Islam yang terbanyak dengan 24 mesjid dan 8 surau, disusul 14 Pura yang merupakan sarana peribadatan umat Hindu dan terakhir tempat peribadatan umat Kristen Protestan sebanyak 3 Gereja. Jumlah ini tentu saja berbanding lurus dengan jumlah pemeluk agama di Kecamatan Landono.

d. Pola Pemukiman Masyarakat Landono

Pada awalnya pola pemukiman masyarakat transmigrasi yang diatur oleh pemerintah menempatkan lokasi transmigran asal Bali dibagian pinggir dan agak masuk kedalam dan transmigran Jawa di tengah berdekatan dengan pemukiman penduduk asli tolaki. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan terjadinya segregasi.

Segradasi yang timbul merupakan segregasi yang disengaja dan sukarela. Hal ini bukan dikarenakan transmigran asal Bali ingin memisahkan diri dan tidak mampu berbaur dengan etnis, suku dan agama lain namun lebih disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah terkait menghindari terjadinya riak-riak konflik yang kemungkinan bisa timbul akibat adanya perbedaan karakteristik dan pola hidup dengan penduduk yang beretnis, suku dan agama lain khususnya dalam hal hewan peliharaan. Seorang informan yang beretnis Bali mengatakan " hal itu wajar, karena sebagian dari kami beternak babi, yang merupakan hewan yang diharamkan dalam agama Islam. Jadi walaupun kami mengandangkan babi kami namun seandainya kami bertetangga dengan orang muslim, kami tetap merasa tidak enak hati karena bau kotorannya pasti tercium oleh mereka". Pemisahan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan melakukan pengelompokan orang-orang yang sama karakteristiknya dalam suatu daerah dan sekaligus memisahkan diri dari orang-orang atau kelompok-kelompok yang berlainan karakteristiknya ini disebut dengan segregasi ekologis (Rahardjo, 1989 : 47).

Segregasi ekologis memiliki peluang bagi terjadinya gesekan-gesekan antar kelompok yang berbeda, hal ini pernah terjadi pada tahun 1980-an di desa Amotowo dan desa Lalonggapu antara etnis Bali dan Tolaki, konflik yang disebabkan karena kesalahfahaman ini dipicu oleh perkelahian anak SMP. Anak yang beretnis Bali dipukul oleh seorang anak beretnis Tolaki, ketika anak yang beretnis tolaki ini akan disidang secara adat oleh masyarakat beretnis Bali di desa Lalonggapu (saat itu masih masuk desa Tridanamulya) mereka melewati perkampungan beretnis tolaki yang merupakan kampung sang anak. Pada saat itulah bentrok fisik tidak dapat dielakkan,

walaupun tidak ada korban jiwa namun beberapa warga yang beretnis Bali mengalami luka-luka. Namun hal ini tidak berlangsung lama dan tidak menyebabkan konflik horizontal yang lebih luas karena adanya kesigapan pemerintah dan para tokoh agama dan adat masing-masing dalam upaya penyelesaian konflik pada saat itu

Adanya segregasi, di satu pihak menyebabkan tingginya solidaritas di tengah masyarakat yang memiliki karakteristik sama karena mengganggap gangguan dari luar merupakan musuh bersama. Namun di lain pihak dapat membahayakan integrasi pada masyarakat yang majemuk seperti pada peristiwa Amotowo. Kondisi ini nampaknya akan memberi ruang bagi terjadinya sentimen etnis di kemudian hari, olehnya itu diperlukan upaya-upaya preventif. Fakta sosial yang terjadi di Ambon menunjukkan bahwa sentimen etnis memiliki potensi pengaruh yang kuat terhadap keterikatan-keterikatan sosial lainnya, termasuk agama, dan tentu saja hal ini sekaligus memberi ruang bagi terjadinya konflik sosial. Terkait dengan hal tersebut, tesis Dahrendraf menyebutkan bahwa konsensus dan konflik hadir sekaligus dalam masyarakat sebagai hubungan sebab akibat. Masyarakat tidak akan memiliki konflik tanpa ada konsensus atau kesepakatan sebelumnya. Konflik terjadi karena telah melanggar konsensus (George Ritser dan Douglas J. Goodman, 2003 : 154).

Oleh karena itu, masyarakat diharapkan selalu berada dalam situasi integratif, stabil dan teratur, karena dalam masyarakat ada nilai, norma, dan aturan yang disepakati bersama oleh para anggotanya. Sistem sosial dalam masyarakat dapat tetap bertahan dan *survive* memerlukan pengkondisian-pengkondisian yang dapat memenuhi tujuan integratif dan stabilitas serta keharmonisan hubungan sosial.

Dalam rangka mewujudkan kondisi yang harmonis di dalam masyarakat majemuk sebagai akibat adanya program transmigrasi, Kanwil Departemen Transmigrasi dan PPH Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 1999 pernah menyelenggarakan seminar sehari yang membahas tentang konsep pembangunan pemukiman berwawasan Bhineka Tunggal Ika. Tujuan pembangunan unit pemukiman transmigrasi berwawasan Bhineka Tunggal Ika (UPT BHINTUKA) tersebut adalah terwujudnya pemukiman transmigrasi yang mengintegrasikan berbagai suku bangsa yang saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat Landono saat ini adalah adanya pergeseran pola pemukiman dimana masyarakat transmigran Bali sudah banyak yang keluar dan berbaur dengan etnis lain. Hal ini disebabkan oleh banyaknya transmigran asal Bali yang membeli tanah ditempat yang mayoritas penduduknya beragama dan beretnis yang berbeda dengan mereka, tentu saja dengan kesadaran dan toleransi yang tinggi terhadap perbedaan dengan menjaga kenyamanan masyarakat yang bersuku dan beragama lain disekitarnya. Hampir sebagian tanah di daerah strategis yang memungkinkan berkembangnya modal usaha telah dikuasai oleh para masyarakat transmigran baik itu dari Bali dan Jawa, padahal lokasi dan tanah tersebut sebelumnya kebanyakan dimiliki oleh masyarakat Tolaki Landono. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan suku bangsa Tolaki Landono sebagai pemilik tanah adat atau tanah leluhur menjual tanah mereka yang terletak di lokasi-lokasi strategis atas kemauannya sendiri karena terpengaruh oleh harga tanah yang mahal. Kondisi

tersebut menjadikan suku asli daerah ini semakin tergeser dan akhirnya membuat lokasi pemukiman baru dengan lokasi agak mundur kebelakang.

Adanya fakta sosial tersebut menyebabkan berubahnya sebagian pola pemukiman masyarakat di Kecamatan Landono. Apalagi dengan kedatangan suku bangsa lain seperti Buton, Muna, Bugis, Toraja dan Makassar. Perpindahan kelompok etnis Buton, Muna, Bugis, Toraja dan Makassar ke Kecamatan Landono pada umumnya untuk memperbaiki taraf hidup mereka, melalui kegiatan perdagangan dan perkebunan. Dalam pemilihan lokasi tempat tinggal orang Buton, Muna, Bugis, Toraja dan Makassar relatif sama yaitu adanya keterikatan dengan kelompoknya, namun sebagian besar orang Bugis, Muna dan Buton biasanya memilih lokasi yang dekat dengan kegiatan perekonomian. Orang Muna, Buton dan Bugis yang ada di Landono, mayoritas menetap di Desa Wonua Sangia disekitar pasar Kecamatan Landono. Walaupun begitu banyak juga orang Bugis yang menetap di desa Talumbinga, Asaria dan Koronua, mereka berkebun bersama-sama dengan orang Makassar. Sementara orang Toraja dan Makassar kebanyakan bertempat tinggal yang sama dengan lahan perkebunannya. Orang Makassar biasanya membuka lahan perkebunan agak masuk kedalam. Kebanyakan dari mereka menanam tanaman jangka pendek yang bisa segera dijual seperti pisang dan sayur-sayuran. Pemilihan lokasi tempat tinggal ini selain karena kegiatan perkebunannya juga karena alasan ekonomi, yaitu efesiensi. Orang Makassar banyak menetap di Desa Talumbinga dan Koronua. Sedangkan orang Toraja kebanyakan menetap di desa Tridana Mulya dan Abenggi dikarenakan faktor kekerabatan, spiritual dan ekonomi.

Nampaknya motif ekonomi merupakan faktor dominan yang membuat seseorang mengambil keputusan untuk melakukan perpindahan (migrasi), namun alasan ekonomi bukanlah satu-satunya alasan, tetapi didukung pula oleh alasan-alasan yang lain yang saling berkaitan, misalnya karena perkawinan antar suku bangsa dan adanya perasaan tidak nyaman di kampung halaman juga merupakan salah satu faktor mereka melakukan migrasi dari daerah asal menuju Kecamatan Landono. Seperti yang dituturkan oleh Nurhayati asal Pinrang Sulawesi Selatan, "kedatangan saya ke Landono ini bukan semata-mata persoalan ekonomi tapi lebih kepada persoalan sakit hati karena penipuan dalam kasus KOSPIN yang terkenal beberapa tahun lalu. Saya kemudian ke sini mengikuti keluarga 11 tahun yang lalu. Awalnya saya berniat cuma jalan-jalan menghilangkan stress namun karena suasananya yang nyaman dan penerimaan masyarakat yang bersahabat, saya menjadi betah lalu membuka usaha dan menetap sampai sekarang". Hal sama diungkapkan pula oleh Naisyah (48 tahun) seorang penjual di pasar Landono yang merupakan pendatang beretnis Bugis bahwa faktor kenyamanan merupakan alasan kepindahannya ke Landono, karena di daerah sebelumnya sering terjadi perkelahian antar warga hingga perasaan was-was seringkali muncul.

B. Integrasi Sosial Masyarakat Landono

1. Proses Integrasi Sosial Masyarakat Landono

Keberadaan masyarakat transmigrasi membawa cerita tersendiri terhadap keberadaan Kecamatan Landono. Sebab justru dengan kedatangan para transmigran, Kecamatan Landono mampu merubah muka dari sebuah daerah yang sulit baik secara ekonomi maupun sosial menuju daerah yang lebih maju perekonomian, transportasi dan kehidupan sosialnya. Awal kedatangan masyarakat transmigrasi umum asal Jawa-Bali di desa Landono adalah pada tanggal 31 desember 1970 tepat sehari sebelum tahun 1971. Hal ini diungkapkan oleh I Gede Sunarko (wawancara, Rabu 17 maret 2010), hal yang sama dikatakan juga oleh R. Muslikin (wawancara, Sabtu 13 februari 2010). Pada awal kedatangan ini para transmigran yang berasal dari Jawa Timur dan Bali ditempatkan di Landono secara bertahap. Selanjutnya, mereka menempati pemukiman yang disediakan oleh pemerintah diatas lahan seluas masing-masing 2 hektar per-KK yang dibagi dalam 1 hektar lahan kering dan 1 hektar lahan basah yang dimanfaatkan sebagai sawah oleh para transmigran. Pada saat itu lokasi pemukiman para transmigrasi dianggap angker dan keramat oleh masyarakat lokal setempat, dikarenakan lokasi transmigran tersebut masih dikelilingi hutan dan alang-alang, hal ini diungkap oleh salah seorang transmigran asal Jawa Timur yang bernama R. Muslikin (wawancara, Sabtu 13 februari 2010).

Pada perkembangan selanjutnya, pada tanggal 1 Januari 1972 Landono kedatangan lagi transmigrasi spontan bersubsidi asal Bali dengan Made Reka sebagai ketua rombongan. Para transmigran ini meninggalkan tanah kelahirannya akibat adanya kesulitan ekonomi dan terjadi kepadatan penduduk di pulau Bali, seperti apa

yang dituturkan oleh Made Reka “sebelum kami melakukan transmigrasi kehidupan ekonomi kami di Bali sangat sulit diakibatkan susahnya mencari pekerjaan dan sempitnya lahan yang kami punya, sementara anak-anak kami banyak”. (wawancara, Jum’at 23 April 2010). Hal ini diungkapkan pula oleh transmigran spontan lain yang bernama Ketut Simir “pada saat mengikuti program ini kehidupan kami sangat sulit, pada saat itu untuk mencari nafkah di Bali sangat susah jadi kami mengikuti program transmigrasi ini dengan meninggalkan tanah kelahiran walaupun kami sadar bahwa transmigrasi spontan ini tidak sepenuhnya dibantu oleh pemerintah seperti pada transmigrasi umum tapi keinginan untuk mengubah nasib lebih kuat karena kabar yang kami dengar bahwa teman-teman kami yang telah melakukan program transmigrasi ini banyak yang telah berhasil” (wawancara, Selasa 16 februari 2010).

Selanjutnya di pertengahan tahun 1973, Pemerintah lewat Departemen Transmigrasi menempatkan lagi transmigrasi asal Jawa Barat di Kecamatan Landono. Dari fakta yang di dapat dilapangan, mayoritas para transmigran melakukan migrasi karena adanya motif ekonomi sebagai motivasi utamanya meninggalkan tanah kelahiran mereka.

Untuk lebih jelas tahap awal kedatangan para transmigran ke Landono seperti yang telah di uraikan di atas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7
Jumlah Kepala Keluarga Tahap Kedatangan Masyarakat Transmigrasi Ke Kecamatan Landono

No	Tahap Kedatangan	Daerah asal			Jumlah	Keterangan
		Jawa Barat	Jawa Timur	Bali		
1.	Tahap I, 31-12-1970	-	150 (695 jiwa)	25 (157 jiwa)	175 KK (852 jiwa)	✓ Transmigrasi Tahap I adalah transmigrasi umum asal Jawa-Bali, tahap II adalah transmigrasi spontan asal Bali dan tahap III adalah transmigrasi umum asal Jawa Barat
2.	Tahap II, 1-1-1972	-	-	49 (219 jiwa)	49 KK (219 jiwa)	
3.	Tahap III, 1973	51 (270 jiwa)	-	-	51 KK (270 jiwa)	
	Total	51 (270 jiwa)	150 (695 jiwa)	74 (376) jiwa)	275 KK (1341 jiwa)	

Sumber : Analisis Hasil Wawancara dan data Disnakertrans Prov. Sultra, data primer diolah Mei 2010.

Berdasarkan tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa awal keberadaan transmigrasi asal Jawa-Bali di Kecamatan Landono adalah sejak 31 Desember 1970. Kedatangan mereka tersebut berlangsung secara bertahap dari akhir tahun 1970 sampai tahun 1973, dari data yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2010, diketahui jumlah transmigran yang ditempatkan di Landono adalah 275 kepala keluarga dengan 1.341 jiwa

(Disnakertrans Prov. Sultra, 2010 : 1.1). Dari jumlah tersebut, terjadi tiga tahap kedatangan para transmigran ke Landono, tahap I berjumlah 175 kepala keluarga yang terdiri dari 852 jiwa dengan rincian 150 KK dengan 695 jiwa berasal dari Jawa Timur dan 25 KK dengan 157 jiwa yang berasal dari Bali, tahap II lewat transmigrasi spontan asal Bali yang terdiri dari 49 KK dan 219 jiwa dan tahap III yang merupakan transmigrasi umum asal Jawa Barat yang terdiri dari 51 kepala keluarga dengan jumlah 270 jiwa. Selanjutnya mereka berbaur dengan penduduk asli (tolaki Landono) dan pendatang lain asal Sulawesi Selatan dan daerah lain bahkan terus bertambah.

Ketiga tahapan kedatangan para transmigran ke Landono tersebut mengalami pergeseran waktu dengan target tahun penempatan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Data Realisasi Penempatan Transmigran Di Provinsi Sulawesi Tenggara Sejak Pra PELITA s.d 31 desember 2009, berikut disajikan data yang dikeluarkan oleh disnakertrans Provinsi Sulawesi Tenggara.

Tabel 8
Realisasi Penempatan Transmigran Umum/Sisipan Perdesaan
Di Sulawesi Tenggara Sejak Pra Pelita

No	Nama Lokasi	Target tahun penempatan	Jawa Barat		Jawa Timur		Bali	
			Kk	jiwa	Kk	jiwa	kk	jiwa
1.	Landono I	1971/1972	-	-	150	695	25	157
2.	Landono II	1973/1974	51	270	-	-	49	219
	Total		51	270	150	695	74	376

Sumber : Disnakertrans Prov. Sultra, data realisasi penempatan transmigran 2010.

Dari tabel 8 diketahui bahwa transmigran asal Jawa Timur merupakan transmigran terbanyak yang ditempatkan di Landono dengan jumlah 150 KK dengan 695 jiwa, kemudian disusul transmigran asal Bali yang berjumlah 74 KK dengan 376 jiwa lalu Jawa Barat sebanyak 51 KK dengan 270 jiwa. Penempatan para transmigran di Landono cuma di bagi dalam 2 target tahun penempatan yaitu 1971/1972 dan 1973/1974. Jika dibandingkan antara tabel 7 dan tabel 8, maka terlihat perbedaan antara awal kedatangan para transmigran ke Landono dengan target penempatannya. Hal ini dikarenakan para transmigran yang berasal dari Jawa Timur 150 KK dan Bali 25 KK dikirim secara bertahap ke lokasi penempatan di Landono dari tanggal 31 desember 1970 sampai tahun 1971 sebagai tahap I penempatan para transmigran di Landono. Berdasarkan fakta awal kedatangan masyarakat transmigrasi di Landono, terjadi kemajuan satu hari yaitu terjadi pada tanggal 31 Desember 1970.

Begitupun dengan tahap kedua kedatangan para transmigran, menurut data dari Disnakertrans Provinsi Sulawesi Tenggara, transmigrasi asal Bali sebanyak 49 KK dan Jawa Barat dengan 51 KK ditargetkan penempatannya tahun 1973/1974. Namun kenyataannya kedatangan transmigrasi asal Bali yang merupakan transmigrasi spontan bersubsidi lebih cepat setahun dari target penempatan. Hal ini dikarenakan para transmigran spontan ini awalnya akan bermohon untuk dikirim ke Donggala, Sulawesi Tengah. Dikarenakan pada saat itu pemerintah Sulawesi Tengah belum siap untuk kedatangan mereka dan meminta diberi waktu 3 bulan untuk mempersiapkan kedatangan para transmigran ini, maka Ketua rombongan transmigran mengajukan kembali permohonan kepada Pemerintah lewat Dinas Transmigrasi Denpasar untuk segera dikirim ke lokasi transmigrasi di mana saja di tanah air yang siap menerima

mereka. Kemudian pada tanggal 27 desember 1971 berangkatlah para transmigran tersebut dari Bali menuju Sulawesi Tenggara dan tiba di Kendari pada tanggal 1 januari 1972 (wawancara).

Setelah tiba di Kendari, mereka di kirim ke Landono dan ditempatkan di penampungan sementara selama satu bulan. Para transmigrasi spontan ini diberikan lahan seluas 2 Hektar per KK oleh pemerintah namun dengan fasilitas yang berbeda dengan transmigran umum, mereka harus membuat rumah sendiri dan merintis jalan yang saat itu masih hutan ke lokasi pemukiman yang disediakan untuk mereka. Pada saat itu karena kondisi penampungan yang tidak memadai banyak dari para transmigran yang tinggal di rumah penduduk asli tolaki setempat. Keadaan ini mempercepat proses integrasi diantara para transmigran dengan penduduk asli bahkan banyak diantara mereka yang mengganggap kondisi ini sebagai awal dari tersambungnya tali silahturahmi diantara mereka dalam ikatan persaudaraan (wawancara).

Selanjutnya di tahun 1973 datanglah transmigran asal Jawa Barat. Pada saat itu menurut Ketut Simir, mereka ikut bergotong royong dalam pembukaan lahan para transmigran tersebut. Dengan demikian pada tahun 1973 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara lewat Dinas Transmigrasi telah berhasil mencapai target penempatan para transmigran sesuai dengan program yang direncanakan bahkan lebih awal dari target yaitu tahun 1974.

Kondisi sosial budaya masyarakat lokal (asli tolaki Landono) sebelum kedatangan masyarakat transmigrasi dengan setelah kedatangan para transmigran mengalami pergeseran-pergeseran melalui proses asimilasi dan akulturasi dan

kemudian berintegrasi dengan masyarakat Tolaki Landono. Kesulitan pertama masyarakat asli dan pendatang adalah masalah komunikasi. Kebanyakan masyarakat Tolaki Landono menggunakan bahasa tolaki sebagai alat komunikasi diantara mereka di Landono. Sangat sedikit sekali yang mengetahui bahasa Indonesia. Begitupun masyarakat pendatang yang sebagian masih menggunakan bahasa daerah mereka masing-masing. Oleh karena itu, mereka melakukan bahasa tubuh sebagai alat komunikasi dan membiasakan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia untuk berinteraksi diantara mereka. Kemauan untuk mempelajari bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia mempercepat proses integrasi diantara para pendatang dengan masyarakat asli tolaki Landono. Bahkan ada juga masyarakat Tolaki Landono dan pendatang yang saling mempelajari bahasa daerah diantara mereka (wawancara).

Begitupun dengan pola hidup masyarakat, dimana kedatangan para transmigran mampu menggeser kebiasaan masyarakat asli tolaki Landono dalam memanfaatkan lahan dan alam. Seperti yang diungkap oleh Laduma bahwa " Orang Tolaki di sini (Landono) dulu hidup dari ladang berpindah dimana lahan yang bisa diolah di situ dibuka setelah itu ditinggalkan lagi, mereka betul-betul bergantung pada alam " (Wawancara, Sabtu 15 mei 2010). Begitupun pernyataan yang dilontarkan Istri dari mantan kepala Desa Landono periode 1970-1990 (alm. Moch. Kasim R), Becce Fatimah mengatakan bahwa " Sebelum kedatangan para transmigran masyarakat lokal sangat susah mencari makan karena sangat tergantung pada alam, dengan kedatangan teman-teman tranmigran orang tolaki setempat mulai belajar membuka ladang menetap dan mengurangi ketergantungan mereka pada alam " (wawancara, Jum'at 23 April 2010). Selain itu akibat dari ladang berpindah, masyarakat asli tolaki

Landono hidup terpencar-pencar di dalam hutan. Pergeseran pola hidup masyarakat Tolaki di Landono tersebut karena adanya *transfer of skill and technology* dari para transmigran kepada masyarakat asli tolaki dengan mengadaptasi pola hidup para transmigran yang memanfaatkan alam dan tidak tergantung pada alam sehingga memberi efek positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat setempat. Adanya *transfer of skill and technology* merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam proses integrasi di pemukiman transmigrasi (Martono, 1985 : 45). Namun walaupun terjadi *transfer of skill and technology* antara masyarakat Tolaki Landono dan para pendatang dalam bidang pertanian dan perkebunan, namun terdapat perbedaan yang mencolok antara petani yang beretnis Tolaki Landono dan petani pendatang, pada tingkat kesejahteraan. Ini terjadi karena kebanyakan para pendatang lebih ulet dan tekun dalam bekerja dibandingkan masyarakat asli tolaki Landono. Menurut Ernawati dan R. Muslikin, “Hal itu disebabkan oleh budaya orang tolaki Landono apalagi anak muda laki-lakinya yang cenderung lebih malas dibandingkan suku pendatang dan memiliki gengsi yang tinggi untuk turun berkebun dan bersawah“ (observasi dan wawancara).

Perubahan juga terjadi pada bentuk dan model rumah masyarakat asli tolaki di Landono. Awalnya model rumah masyarakat tolaki landono adalah rumah panggung dengan dinding yang terbuat dari bambu tetapi setelah kedatangan para transmigran lambat laun mengalami perubahan. Selain itu menurut penuturan Becce Fatimah “sebelum kedatangan mereka, kami harus berjalan kaki puluhan kilometer karena alat transportasi sangat sulit untuk sekedar ke pasar sebab di Landono belum ada pasar tapi setelah kedatangan mereka, kami pun membuka pasar disini pada tahun

1971 walaupun saat itu masih dikelilingi alang-alang tapi kami senang karena tidak perlu berjalan jauh lagi seperti sebelumnya" (wawancara, Jum'at 23 April 2010). Selain belum adanya pasar dan susahnya alat transportasi, sulitnya akses jalan juga merupakan kondisi sosial yang terjadi saat itu. Hal ini diungkapkan juga oleh para transmigran ketika mereka menuju ke lokasi transmigrasi di Landono. Menurut R. Muslikin (45 tahun), " awal kedatangan kami ke lokasi ini (landono) dengan menggunakan truk dumping 3/4 , jalanannya masih kerikil dan belum di aspal ", senada dengan itu I Gede Sunarko salah seorang peserta transmigrasi asal Bali juga memberi kesaksian bahwa" pada saat itu jembatan belum ada, kami lewat diatas batang kelapa yang sesekali harus turun melewati sungai bila jalannya kelihatan agak licin, gunung merah pun pada saat itu lebih tinggi 4 m dari yang ada sekarang sebab yang sekarang sudah mengalami penggusuran" (wawancara, Rabu 17 maret 2010).

Seperti yang diungkapkan oleh para informan "Dengan adanya program transmigrasi di Landono justru mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan baik penduduk lokal (Tolaki Landono) maupun para transmigran" (Wawancara).

Masyarakat Kecamatan Landono yang majemuk (heterogen) menampakkan suatu ciri khusus yang membedakannya dengan masyarakat desa pada umumnya yang homogen akibat adanya program transmigrasi. Biasanya dalam pelapisan sosial ekonomi masyarakat yang majemuk berdampak pada persaingan yang kian meningkat dan adanya *individual group,* disebabkan oleh adanya perbedaan status sosial, ekonomi maupun kultur masyarakat yang variatif, namun hal tidaklah terjadi di Kecamatan Landono. Ini disebabkan oleh adanya sikap toleransi yang besar dan

sikap lebih mengalah dari warga transmigrasi sebagai warga pendatang seperti yang diungkap oleh Ni Gusti Ayu Karyani, S.Sos (wawancara, Senin 15 Maret 2010). Begitupun sikap masyarakat asli tolaki Landono yang sangat terbuka dan menganggap keberadaan masyarakat transmigrasi mempercepat proses sosial ekonomi dan pengembangan daerahnya, seperti yang dituturkan oleh Becce (wawancara, Jum'at 23 April 2010).

Sikap penduduk lokal dalam hal ini suku tolaki Landono yang terbuka dan sikap lebih mengalah yang ditunjukkan para transmigran serta adanya toleransi yang besar dan rasa saling membutuhkan diantara mereka membuat proses integrasi sosial diantara mereka berlangsung cepat. Ini terlihat pada perayaan Hari Raya Nyepi, dimana masyarakat yang non Hindu baik itu Islam dan Kristen berupaya menghormati perayaan tersebut dengan tidak membuat keributan maupun kunjungan-kunjungan ketempat masyarakat Bali yang sementara merayakan, seperti yang diungkap oleh I Gede Sunarko dalam wawancara, Kamis 18 maret 2010 bahwa " pada mulanya teman-teman yang bukan Hindu-Bali belum terlalu mengerti dengan pantangan-pantangan yang harus dihindari pada perayaan Nyepi, namun ketika mereka faham rasa toleransinya sungguh besar dan kami tidak merasa kesulitan sama sekali dalam melakukan ritual kami".

Begitu pula yang ditunjukkan oleh masyarakat Bali-Hindu dalam pergaulan dengan sangat menjunjung tinggi nilai toleransi antar umat beragama dengan menghargai perbedaan antara masyarakat yang berbeda suku, agama dan budaya. Sebagai contoh ketika mereka membuat perayaan ataupun pesta dengan mengundang tetangga maupun teman yang beragama Islam, mereka membuat jamuan terpisah

untuk tamu yang beragama Islam dengan melibatkan kerabat atau tetangga yang beragama Islam mulai dari memasak hingga penyajian hidangan tersebut untuk menghindari bercampurnya makanan yang halal dan haram bagi umat Islam. Selanjutnya di buat pembatas dari kain untuk membedakan seperti yang diungkap Ernawati " orang Bali kalau membuat perayaan dan mengundang kita, biasanya masaknya di buat terpisah dan jamuan untuk kita pun mereka minta tolong sama teman sesama muslim untuk memasak dan menghidangkan lalu tempatnya pun dibuat semacam pembatas antara yang muslim dan non muslim " (wawancara, sabtu 20 maret 2010). Senada dengan itu, Made Reka menjelaskan " setiap membuat perayaan dengan dana yang kecil kami tidak pernah mengundang teman-teman muslim sebab kami harus menyiapkan makanan yang berbeda dan membuat tirai untuk membedakan tamu yang muslim dan bukan. Kecuali dana kami besar maka pasti kami undang " (wawancara, Jum'at 23 April 2010). Penyataan Made Reka itu sebenarnya bukanlah merupakan bentuk diskriminasi terhadap suku maupun agama lain di landono. Fenomena tersebut justru merupakan bentuk toleransi yang besar yang ditunjukkan oleh mereka sebagai bukti bahwa mereka faham terhadap apa yang di larang oleh agama tertentu dan menghargai perbedaan yang ada.

Pada masyarakat transmigrasi asal Jawa Timur dan Jawa Barat proses integrasi masyarakatnya pada umumnya tidak terlalu menimbulkan gesekan-gesekan karena kultur budaya Jawa pada umumnya hampir sama dengan kultur budaya Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Puspito "saya melihat selama ini kehidupan antara kami dan masyarakat lain disini baik itu orang Tolaki maupun Bali, bahkan

dengan suku lain, tidak ada masalah. Intinya jika kita berlaku baik maka orang pun akan melakukan hal yang sama". (wawancara selasa 18 mei 2010).

Berikut adalah beberapa pergeseran nilai budaya masyarakat asli Landono (Tolaki Landono) dan masyarakat pendatang melalui proses asimilasi dan akulturasi dengan masyarakat pendatang.

Tabel 9
Pergeseran Nilai Budaya Masyarakat Di Kecamatan Landono

No	Pola Hidup Masyarakat Pada Awal Kedatangan Masyarakat Transmigrasi		Hasil proses asimilasi dan akulturasi
	Masyarakat Tolaki Landono	**Masyarakat Pendatang**	
1.	Masih menggunakan bahasa daerah tolaki dalam berinteraksi sosial baik oleh orang tua maupun anak-anaknya	Bahasa daerah dan bahasa Indonesia sudah dikenal baik kecuali oleh sebagian orang-orang tua	Penggunaan Bahasa Indonesia dilakukan untuk berinteraksi social
2.	Model Rumah Panggung dengan dinding Bambu	Model Rumah Tanah dengan dinding papan (model rumah yang disiapkan oleh Pemerintah)	Tidak ada lagi masyarakat yang menggunakan rumah panggung kecuali gubug di sawah untuk menjaga hama dan burung
3.	Pola hidupnya sangat tergantung pada alam dengan cara membuka ladang berpindah	Pola hidupnya memanfaatkan alam dengan mengolah lahan jatah (ladang menetap)	Kegiatan lahan berpindah sudah mulai ditinggalkan dengan membuka lahan menetap oleh penduduk asli dengan mengikuti cara masyarakat pendatang
4.	Hidup terpencar-pencar di hutan	Hidup bersatu dalam satu komunitas	Hidup berbaur dalam masyarakat yang majemuk
5.	Prosesi pernikahan menggunakan adat Tolaki	Prosesi pernikahan menggunakan adat sesuai dengan adatnya masing-masing	Apabila terjadi perkawinan campur maka prosesi pernikahan sesuai kesepakatan
6.	Makanan pokoknya adalah sagu, beras dianggap sebagai hal yang langka	Makanan pokoknya ubi dan beras	Masyarakat secara umum menjadikan beras sebagai makanan pokok dan masyarakat pendatang mulai mengkonsumsi sagu

Sumber : Hasil analisis wawancara dengan para informan.

Dari tabel 9 diketahui bahwa kehidupan masyarakat asli (Tolaki Landono) dan para pendatang mengalami proses perubahan setelah berinteraksi lama dan intens satu sama main. Pola hidupnya mengalami penyesuaian dan penyelarasan yang dilakukan untuk mengurangi perbedaan yang terdapat pada mereka seperti pada cara mereka berkomunikasi, model rumah yang mereka buat dan proses pernikahan campur diantara mereka. Adanya pernikahan diantara mereka memungkinkan terjadinya pertukaran nilai antara kultur dari masyarakat asli dengan kultur yang dibawa oleh para transmigran. Proses seperti inilah yang disebut dengan asimilasi.

Asimilasi merupakan suatu proses dalam taraf kelanjutan, yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Secara singkat, proses asimilasi ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama , walaupun kadang-kadang bersifat emosional, bertujuan untuk mencapai kesatuan, atau paling sedikit untuk mencapai suatu integrasi dalam organisasi, fikiran dan tindakan. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Soekanto (1982 : 74), proses asimilasi yang timbul di Kecamatan Landono diakibatkan oleh adanya perbedaan kebudayaan dari masyarakat asli dan para transmigran, lalu adanya proses interaksi diantara mereka dengan bergaul secara langsung dan intensif dalam jangka waktu yang lama sehingga kebudayaan-kebudayaan asli dari para masyarakat asli tolaki dengan para transmigran mengalami perubahan dan saling menyesuaikan diri.

Begitupun dengan bergesernya fenomena ladang berpindah yang menjadi tradisi bertani dan berkebun masyarakat tolaki menuju kepada cara bertani dan berkebun yang tidak lagi tergantung pada alam dan justru lebih memanfaatkan alam dengan bersama-sama para transmigran. Namun demikian, tingkat kesejahteraan masyarakat asli dan pendatang walaupun bersama-sama dalam mengolah lahan mengalami perbedaan. Para transmigran cenderung lebih sejahtera di banding penduduk asli, hal ini disebabkan lebih ulet dan lebih tekunnya para transmigran dibandingkan para penduduk asli. Hal ini disebabkan oleh budaya yang sudah mengakar kuat sehingga ciri dan sifat aslinya susah untuk mengalami perubahan diantara mereka.

Hal yang sama juga terjadi pada perubahan makanan pokok pada masyarakat. Pada awalnya masyarakat Jawa-Bali mengkonsumsi ubi yang mereka tanam sendiri dan beras hasil jatah dari pemerintah sebagai makanan pokok. Sementara, penduduk asli tolaki Landono mengkonsumsi sagu sebagai makanan pokok sehari-hari, meskipun mereka sudah mengenal beras namun beras merupakan sumber karbohidrat mewah pada saat itu. Dengan kedatangan masyarakat transmigrasi yang mulai membuka sawah dan menanam padi, masyarakat lokal pun mulai mengkonsumsi beras menggantikan sagu sebagai makanan pokok. Namun begitu, sampai sekarang masyarakat tolaki masih menjadikan sagu sebagai makanan pokok kedua setelah beras. Begitupun para transmigran yang semula cuma mengenal sagu setelah dijadikan tepung untuk bahan pembuatan kue, setelah berinteraksi dengan penduduk lokal mulai mengenal pengolahan sagu dengan cara yang berbeda yaitu dijadikan makanan pokok yang dimakan bersama sayur dan ikan yang disebut

‘sinonggi’. Namun demikian, dari sebagian masyarakat transmigran yang menyukai ‘sinonggi’ mengatakan bahwa makanan ini hanya dijadikan makanan pendamping bagi mereka karena sesudah memakannya biasanya mereka tetap memakan nasi. Hal ini berbeda dengan kebiasaan masyarakat tolaki (observasi dan wawancara).

Para transmigran asal Jawa-Bali dan pendatang lain yang berada di Kecamatan Landono tidak memerlukan waktu yang lama untuk dapat berintegrasi dengan masyarakat setempat. Akan tetapi meskipun mereka telah melakukan perkawinan dengan masyarakat setempat, namun imigran masih merasa terikat dengan adat istiadat daerah asal walaupun mereka sudah merasa cocok dengan adat istiadat setempat.

Sejalan dengan teori fungsional struktural yang menyatakan masyarakat harus dilihat sebagai satu sistem yang komponennya berhubungan, bergantung, dalam saling mengait yang secara fungsional terintegrasi dalam bentuk equilibrium yang bersifat dinamis. Apabila ada pertentangan, akan muncul nilai budaya yang akan mengintegrasikannya. Sangat terlihat dalam pola bermasyarakat yang terjadi di Kecamatan Landono antara masyarakat asli dan para transmigran ataupun pendatang lain. Kemajemukan yang meliputi agama, suku, budaya dan kebiasaan justru mendorong masyarakat di Kecamatan Landono untuk menjaga kerukunan hidup diantara mereka dan berintegrasi satu sama lain.

2. Faktor Pendukung Integrasi Sosial Masyarakat Kecamatan Landono

Majemuknya penduduk yang bermukim di Kecamatan Landono sebagai salah satu daerah tujuan transmigrasi memungkinkan terjadinya interaksi antara masyarakat asli Tolaki dengan pendatang (baik melalui program transmigrasi maupun bukan). Apabila hal itu dapat berjalan lancar, maka pada akhirnya akan tercipta integrasi antara penduduk asli Tolaki Landono dan pendatang. Terdapat banyak faktor pendukung terjadinya integrasi sosial diantara mereka, faktor-faktor tersebut adalah :

1. Faktor Budaya

Faktor budaya dalam hal ini adalah budaya bangsa Indonesia yang tertuang dalam konsensus dasar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila. Pemilihan nilai budaya yang tertuang dalam Pancasila dikarenakan pada dasarnya semua nilai-nilai Pancasila merupakan akar dari kebudayaan seluruh bangsa Indonesia yang diyakini mampu mempersatukan perbedaan yang terdapat pada masyarakat. Begitupun yang terjadi di Kecamatan Landono, diantara kemajemukan masyarakatnya namun perasaan sebangsa dan setanah air sangat kental dalam kehidupan bermasyarakat.

Nilai-nilai budaya Pancasila yang tidak lepas dari kelima silanya merupakan acuan hidup bermasyarakat di Kecamatan Landono. Hal ini terbukti dari sikap masyarakat yang tidak menganggap perbedaan agama merupakan hal yang dapat mengganggu proses integrasi diantara mereka. Semua elemen masyarakat Kecamatan Landono baik itu penduduk asli maupun pendatang, pemerintah maupun masyarakat biasa membuka tali silahturahmi dengan sangat baik kepada siapapun baik orang

yang sudah lama berinteraksi dengan mereka maupun yang baru mereka kenal. Hal ini sangat dirasakan langsung oleh peneliti dalam proses pengumpulan data dan observasi lapangan yang dilakukan.

Sikap ramah tamah, saling hormat-menghormati, saling harga-menghargai, tolong-menolong dan besarnya rasa toleransi di dalam masyarakat menjadi pengikis banyaknya perbedaan yang terjadi di masyarakat. Adanya pemahaman bahwa Kecamatan Landono berkembang justru dengan kedatangan para pendatang membuat satu ikatan batin antara penduduk asli dengan pendatang. Apalagi sekarang, banyak dari mereka yang sudah terbiasa dengan suku bangsa dan agama lain karena dari kecil sudah berinteraksi satu sama lain. Para pendatang pun sudah menganggap Landono sebagai kampung halamannya, bahkan sudah banyak dari keturunan mereka yang lahir dan besar di Landono.

2. Faktor Kekerabatan

Faktor berikutnya, yaitu hubungan kekerabatan yang ada diantara mereka juga menjadi faktor penting terwujudnya integrasi sosial. Berbicara mengenai kekerabatan tentu tidak lepas kaitannya dengan masalah pernikahan. Faktor kekerabatan merupakan pengelompokan atas sejumlah orang yang masih berhubungan, baik karena keturunan maupun perkawinan yang mencakup identitas dan peranan yang digunakan oleh individu-individu dalam interaksi sosial mereka. Dengan kata lain, sistem kekerabatan terjadi karena keturunan dan perkawinan. Melalui perkawinan antar suku bangsa yang berbeda, kekerabatan masyarakat

Landono ini menjadi luas. Simpul-simpul yang mengokohkan rasa kebersamaan di antara warga yang suku bangsanya berbeda menjadi semakin kuat (wawancara).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa hubungan kekerabatan yang terjadi akibat adanya perkawinan diantara masyarakat asli dan pendatang yang berbeda suku bangsa, menyebabkan terjadinya proses interaksi yang semakin meluas di antara kedua pasangan dan pihak-pihak keluarganya. Hubungan kekerabatan diantara mereka yang berbeda agama pun bisa ditemukan di daerah ini. Namun dalam pernikahan yang berasal dari keluarga yang berbeda agama biasanya kedua pasangan tinggal dan menetap dilingkungan orang tua yang diikuti keyakinannya, walaupun tidak memutuskan tali silahturahmi dengan orang tua yang berbeda keyakinan dengan mereka. Karena dalam kenyataannya, perbedaan agama tidak menjadi persoalan bagi hubungan sosial kemasyarakatan di Landono, sebab masyarakat menganggap bahwa perkawinan semacam itu adalah hal yang lumrah terjadi di masyarakat yang majemuk. Hal ini juga di dorong faktor kerukunan hidup antar umat beragama yang relatif tinggi dan tidak ditemuinya sikap fanatisme berlebihan pada agama tertentu di Kecamatan Landono.

3. Faktor Kepatuhan Masyarakat Pada Pejabat Pemerintahan

Faktor lain yang mendukung integrasi sosial masyarakat majemuk di daerah ini adalah kepatuhan masyarakat pada pemerintahan. Mayoritas masyarakat Landono adalah masyarakat yang sangat patuh kepada pemerintahnya baik itu di tingkat RT, Dusun, Desa dan Kecamatan. Hal ini terlihat pada berjalan lancarnya setiap program

pemerintahan baik itu tingkat Desa maupun Kecamatan, seperti ronda malam, kerja bakti dan sensus penduduk. Selain itu, apabila pemerintahannya turun tangan setiap masalah yang timbul di masyarakat dapat dengan cepat terselesaikan. Kasus di Amotowo dan Sabulakoa mencerminkan tingkat kepatuhan masyarakat sangat tinggi pada pemerintah setempat. Dengan adanya kepatuhan masyarakat pada pemerintah maka setiap permasalahan yang dapat bersinggungan dengan keberadaan etnis tertentu dapat segera dinetralisir sehingga konflik horizontal dapat dicegah dengan mengintegrasikan masyarakat lewat kearifan lokal yang dibingkai oleh nilai-nilai luhur Pancasila sebagai konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu permasalahan yang di selesaikan lewat kearifan lokal dan campur tangan pemerintah adalah kejadian pada tanggal 15 februari tahun 2002, dimana tewasnya Yappa warga desa Sabulakoa yang bersuku tolaki, akibat tikaman warga desa Talumbinga yang bersuku Bugis dan berimbas terhadap pembakaran rumah tersangka yang dilakukan oleh suku tolaki di desa Sabulakoa dan nyaris mengarah kepada permasalahan SARA. Namun dengan gerakan cepat aparat Desa dan Kepolisian menetralisir keadaan sehingga tidak menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat. Mantan Kepala Desa Sabulakoa, Risman Bumbung H yang menjabat diperiode itu (1999-2008) mengungkapkan :

> Faktor kepatuhan masyarakat kepada pemerintah sangat berperan penting dalam mencegah konflik horizontal yang nyaris terjadi pada saat itu. Selain itu kesigapan aparat desa dan Kepolisian dalam menetralisir keadaan juga berpengaruh. Penyelesaian masalah ini saya bawa ketingkat desa dengan melibatkan keluarga korban dan keluarga tersangka selanjutnya disepakati penyelesaian masalahnya sesuai adat yang berlaku dan pihak tersangka harus membiayai seluruh biaya pemakaman selanjutnya masalah dianggap selesai

> sampai disitu dan Alhamdulillah, semua bersepakat dan mematuhi hasil keputusan bersama itu (wawancara, minggu 16 mei 2010).

Senada dengan itu, Kanit Reskrim Polsek Landono Brig. Pol Ashar menyatakan :

> kasus tersebut memang telah diselesaikan lewat kearifan lokal agar tidak melebar kemana-mana oleh pemerintah desa setempat, namun perkara pidananya tetap harus diproses hukum sesuai KUHP (wawancara, senin 17 mei 2010)

Dari kejadian ini dapat diketahui bahwa penyelesaian masalah sosial melalui kearifan lokal lebih cepat dan lebih mudah diterima oleh masyarakat serta lebih dianggap sakral.

Berikut tabel faktor pendukung integrasi sosial masyarakat Kecamatan Landono

Tabel 10
Faktor Pendukung Integrasi Sosial Masyarakat Kecamatan Landono

No	Faktor Pendukung Integrasi Masyarakat	Deskripsi
1.	Budaya	Masyarakat Kecamatan Landono menerapkan nilai-nilai budaya Pancasila sebagai acuan hidup bermasyarakat. Hal ini terlihat pada sikap ramah tamah, saling hormat-menghormati, saling harga-menghargai, tolong-menolong dan besarnya rasa toleransi di dalam masyarakat.
2.	Kekerabatan	Adanya perkawinan campur antar etnis dan perkawinan dengan latar belakang agama yang berbeda pada masyarakat membuat simpul-simpul kekerabatan dalam masyarakat Kecamatan Landono semakin luas dan erat
3.	Kepatuhan Masyarakat pada Pejabat Pemerintahan	Masyarakat Kecamatan Landono memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi pada pejabat pemerintahan, mereka sangat menghargai baik itu di tingkat RT, RW, Dusun, Desa dan aparat yang lebih tinggi. Hal ini terlihat dari berjalan lancarnya setiap program pemerintahan (seperti ronda malam, kerja bakti, sensus penduduk) dan keberhasilan penyelesaian konflik yang melibatkan pemerintah.

Sumber : Observasi dan wawancara, 2010

Selain ketiga faktor pendukung itu, terdapat pula beberapa faktor pendorong yang mempercepat proses integrasi sosial masyarakat Landono, yaitu :

1. Perkawinan Campur

Adanya perkawinan campur yang terjadi di masyarakat Landono adalah hal yang sangat lumrah terjadi. Hal ini banyak didapati di dalam masyarakat baik antara yang berbeda etnis maupun berbeda agama. Tidak jarang dalam satu keluarga terdapat dua agama yang berbeda di antara anak dan orang tuanya, karena adanya perkawinan campur. Yang tentu saja dalam proses perkawinan diantara kedua mempelai ada yang mengalah dengan mengikuti agama salah satu agama pasangannya, karena Negara kita tidak mengijinkan adanya perkawinan beda agama. Ini dapat dicontohkan dalam perkawinan campur antara para transmigran asal Bali dengan suku tolaki ataupun suku lain. Dimana permasalahan diselesaikan dengan mengintegrasikan budaya kedua belah pihak. Hal ini diungkapkan oleh tokoh Agama Hindu I Gede Sunarko sebagai berikut :

> Apabila akan dinikahkan antara perempuan atau laki-laki yang salah satunya adalah orang Bali dan beragama Hindu kemudian sepakat untuk memeluk salah satu agama maka orang Bali tersebut haruslah dinetralkan terlebih dahulu lewat upacara *sudiwidani* sebagai upacara pelepasan selanjutnya membayar biaya administrasi sebagaimana yang telah disepakati (biasanya Rp. 1,5jt), setelah itu dia boleh melakukan prosesi adat sesuai suku pasangannya. Begitupun apabila salah satu mempelai ingin memilih Hindu sebagai agamanya maka dia diharuskan melakukan upacara *sudiwidani* namun biasanya biaya yang dikeluarkan pasangannya lebih mahal karena harus sesuai dengan permintaan dari orang tua mempelai yang akan dinikahi. Bagi kami perkawinan campur adalah hal yang wajar selama dilaksanakan menurut tata cara yang berlaku, kami pun sangat menghargai adat dan agama yang dianut oleh setiap etnis yang ada disini“ (wawancara, kamis 18 maret 2010).

Menurut para informan, pernikahan campur ini, baik antar agama maupun antar etnis mempererat hubungan kekerabatan diantara mereka dan mempercepat proses integrasi dalam masyarakat.

Berikut disajikan data perkawinan campur antar etnis yang terjadi di Kecamatan Landono dalam tiga tahun terakhir.

Tabel 11
Perkawinan Campur Antar Etnis di Kecamatan Landono Berdasarkan Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Landono
Tahun 2007 s.d Juni Tahun 2010

Etnis Pelaku Perkawinan Campur Tahun 2007 - Juni Tahun 2010					
Tolaki - Jawa/Sunda	Tolaki - Bugis/Makassar /Toraja/ Muna/Buton	Tolaki Bali	Jawa - Bugis/Makassar/ Toraja/ Muna/Buton	Jawa/Sunda- Bali	Bugis/ Makassar/Toraja/ Muna/ Buton – Bali
35	29	2	12	-	-

Sumber : Kantor KUA Kecamatan Landono, 2010

Berdasarkan data yang diambil dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Landono dari tahun 2007 sampai dengan Juni 2010, diketahui bahwa terdapat 433 kejadian perkawinan di Kecamatan Landono. Dari 433 kejadian perkawinan tersebut, terdapat 35 kejadian perkawinan antara etnis Tolaki Landono dengan Jawa/ Sunda, 29 kejadian perkawinan antara etnis Tolaki Landono dengan Bugis/ Makassar/ Toraja/ Muna/ Buton, 2 kejadian perkawinan antara etnis Tolaki Landono dengan Bali, 12 kejadian perkawinan antara etnis Jawa dengan Bugis/ Makassar/ Toraja/ Muna/ Buton, dan selebihnya merupakan perkawinan sesama etnis yaitu sebanyak 355 kejadian perkawinan.

Tabel 12
Perkawinan Campur Antar Etnis di Kecamatan Landono Berdasarkan Data Parisada Hindu Dharma Kecamatan Landono
Tahun 2007 s.d Juni Tahun 2010

No	Desa Adat	Etnis Pelaku Perkawinan Campur Tahun 2007 - Juni Tahun 2010		Keterangan
		Lk	Pr	
1.	Tridana Mulya	Bugis Tolaki Sunda	Bali Bali Bali	Dilakukan *sudiwhidani* dalam rangka pelepasan, karena mempelai sepakat memeluk agama Islam
		Bali Bali	Jawa Tolaki	Dilakukan *sudiwhidani* dalam rangka penerimaan, karena mempelai sepakat memeluk agama Hindu
2.	Talumbinga (Banjar Adat Tegal Sari)	Bali	Sunda	Dilakukan *sudiwhidani* dalam rangka penerimaan, karena mempelai sepakat memeluk agama Hindu
3.	Endanga	Bugis	Bali	Dilakukan *sudiwhidani* dalam rangka pelepasan, karena mempelai sepakat memeluk agama Islam
4.	Landono 2	Bali	Jawa	Dilakukan *sudiwhidani* dalam rangka penerimaan, karena mempelai sepakat memeluk agama Hindu
		Toraja	Bali	Dilakukan *sudiwhidani* dalam rangka pelepasan, karena mempelai sepakat memeluk agama Kristen

Sumber : Ketua Majelis masing-masing Desa Adat di Kecamatan Landono dan Pengurus Parisadha Hindu Dharma Kecamatan Landono (wawancara).

Dari tabel 12 tersebut di ketahui bahwa Kecamatan Landono terdiri atas empat Desa Adat yaitu Desa Adat Tridana Mulya, Talumbinga, Endanga dan Landono 2. Dari keempat Desa Adat tersebut terdapat Sembilan peristiwa perkawinan campur yang berlangsung dari tahun 2007 sampai dengan Juni tahun 2010. Dari peristiwa perkawinan campur tersebut, pelaksanaannya dilangsungkan dalam suasana damai walaupun terjadi perpindahan agama dari para mempelai namun kesemuanya dilakukan tanpa ada paksaan satu sama lain sehingga masyarakat Kecamatan Landono terintegrasi dalam hubungan kekerabatan yang mencakup perbedaan suku agama dan adat akibat adanya perkawinan tersebut. Sangat terlihat fenomena yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Landono yaitu agama yang dianut mempelai pada peristiwa perkawinan campur secara umum mengikuti agama dari mempelai laki-laki.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pengurus Majelis Gereja dan Pendeta di Kecamatan Landono, diketahui bahwa jumlah perkawinan di Gereja Gepsultra dari tahun 2007 sampai dengan Juni tahun 2010 adalah sebanyak 13 kejadian perkawinan. Namun dari ke-13 perkawinan tersebut terdapat 5 kejadian perkawinan yang dilakukan dengan latar belakang etnis dan agama yang sama, sementara 8 kejadian perkawinan memiliki perbedaan etnis dan latar belakang agama (Pendeta Hermin Subang, wawancara 28 Juni 2010). Sedangkan untuk gereja Giri Santa di Desa Abenggi, Ketua Majelis Gereja Giri Santa, Pikaris Roy mengatakan dari tahun 2007 sampai dengan Juni tahun 2010 cuma terdapat 5 kejadian perkawinan. Dari 5 kejadian perkawinan tersebut 3 perkawinan dilakukan oleh etnis dan latar belakang agama yang sama dan 2 perkawinan yang dilakukan oleh etnis dan latar belakang agama yang berbeda. Namun demikian, keduanya berpendapat bahwa adanya perbedaan

etnis dan latar belakang agama tersebut tidak menimbulkan konflik diantara masyarakat karena semuanya dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa adanya paksaan dari siapapun. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 13 berikut :

Tabel 13
Perkawinan Campur Antar Etnis di Kecamatan Landono Berdasarkan Data Majelis Gereja se Kecamatan Landono
Tahun 2007 s.d Juni Tahun 2010

No	Majelis Gereja	Etnis Pelaku Perkawinan Campur Tahun 2007 – Juni Tahun 2010		Keterangan
		Lk	Pr	
1.	Gepsultra Jemaat Tridana Mulya - Landono I	Jawa Jawa Jawa	Tolaki Jawa Jawa	Mempelai merupakan perkawinan campur yang dilakukan berdasarkan perbedaan etnis dan latar belakang agama yang berbeda, namun sepakat untuk memeluk agama Islam dan melepas agama Kristen Protestan dengan sukarela tanpa paksaan.
		Jawa Muna Jawa Jawa Jawa	Tolaki Jawa Jawa Jawa Jawa	Mempelai merupakan perkawinan campur yang dilakukan berdasarkan perbedaan etnis dan latar belakang agama yang berbeda, namun sepakat untuk memeluk agama Kristen Protestan dan melepas agama Islam dengan sukarela tanpa paksaan.
2.	Jemaat Giri Santa Desa Abenggi	Toraja	Bali	Mempelai merupakan perkawinan campur yang dilakukan berdasarkan perbedaan etnis dan latar belakang agama yang berbeda, namun sepakat untuk memeluk agama Kristen Protestan dan melepas agama Hindu dengan sukarela tanpa paksaan.
		Jawa	Tolaki	Sama-sama memiliki latar belakang agama yang sama yaitu Kristen Protestan

Sumber : wawancara, 2010

2. Acara Keagamaan

Kunjungan silaturahmi kepada teman, keluarga dekat, dan tetangga, merupakan hal yang lumrah bagi masyarakat Landono, apalagi dalam rangka hari besar keagamaan seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Kuningan dan Galungan. Interaksi sosial antara penduduk setempat dengan warga pendatang menjadikan warga Kecamatan Landono lebih terbuka menerima pengaruh budaya luar, sehingga perubahan sosial nampak jelas. Perbedaan hari-hari besar diantara mereka merupakan hal yang justru menambah keakraban di antara mereka, sebab dalam setahun masyarakat Kecamatan Landono yang jarang ketemu dengan berbagai kesibukan masing-masing setidaknya memiliki lima kali pertemuan yang pasti dilakukan oleh mereka yaitu pada hari-hari besar tersebut. Walaupun kegiatan tersebut merupakan hubungan individual diantara mereka untuk saling bersilahturahmi.

Selain itu hubungan dalam bidang keagamaan yang dilakukan dengan melibatkan dan mengundang banyak orang adalah dalam halal bi-halal yang dilaksanakan oleh unsur pemerintah biasanya setelah pelaksanaan perayaan Idul Fitri, Natal bersama yang dilaksanakan oleh pihak gereja dan biasanya berkoordinasi dengan pihak SINODE Sulawesi Tenggara, dan perayaan Dharma Shanti yang dilakukan oleh agama Hindu setelah hari raya Nyepi. Perayaan-perayaan ini selain mengundang pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat juga masyarakat disekitar tempat pelaksanaan. Melalui kegiatan ini masyarakat saling meningkatkan kerukunan beragama diantara mereka dan menjalin keharmonisan

antara masyarakat dan pemerintahnya, sehingga mendukung dan mendorong masyarakat untuk saling berintegrasi sesamanya. (Wawancara).

3. Perekonomian

Hubungan bermasyarakat di Kecamatan Landono terlihat dalam aneka kegiatan perekonomian yang tidak dibatasi oleh perbedaan suku, agama dan budaya. Ini terlihat dari interaksi masyarakat ketika berada di pasar Landono sebagai pusat kegiatan perekonomian warga Kecamatan Landono. Masyarakat melakukan jual beli tanpa membedakan suku, agama dan budaya masyarakat semuanya berbaur dalam perasaan saling membutuhkan, dimana pedagang membutuhkan pembeli begitupun sebaliknya.

Masih berkaitan dengan kegiatan perekonomian warga masyarakat Kecamatan Landono, seorang informan mengungkapkan bahwa mereka kadang melakukan barter sesama warga dengan menukarkan hasil kebun berupa buah-buahan atau sayur-sayuran dengan beras. Sistem barter oleh warga ini telah berlangsung lama diantara mereka, dimana pada awal kedatangan masyarakat transmigran mereka sudah melakukan barter dengan masyarakat lokal yaitu mempertukarkan kelapa dengan ubi (wawancara).

Proses integrasi masyarakat lewat kegiatan perekonomian juga ditandai oleh adanya koperasi serba usaha “Hiksa Jaya” yang anggotanya terdiri dari bermacam-macam etnis dan agama di desa Sabulakoa, begitupun KSU “Budi Luhur” yang ada di desa Tridana Mulya. Lain lagi di desa Lalonggapu, walaupun mereka tidak memiliki koperasi namun ibu-ibunya mempunyai perkumpulan arisan yang sengaja melakukan

jimpitan lalu uang tersebut diputar kepada anggota yang membutuhkan dan diberi bunga yang relative rendah kemudian keuntungan dibagi bersama kepada seluruh anggotanya. Secara umum Landono memiliki koperasi atau kegiatan ekonomi yang berfungsi sama seperti koperasi dengan kepengurusan yang tidak membedakan etnis dan agama. Kegiatan ini mengikat masyarakat Landono menjadi satu kesatuan tanpa diskriminasi etnis dan agama. Mereka saling mengenal satu sama lain dan saling berinteraksi.

Masih berkaitan dengan kegiatan perekonomian warga masyarakat Landono, seorang informan mengungkapkan adanya arisan yang dilakukan oleh ibu-ibu juga mempercepat proses integrasi diantara masyarakat, baik itu arisan dasawisma maupun arisan per dusun. Para pemudanya pun memiliki usaha bersama, khususnya di desa Sabulakoa dan Tetenggabo. Mereka memberikan jasa penyebrangan dengan menggunakan rakit melalui sungai Konaweha dari desa mereka ke Kabupaten Konawe. Mereka melayani penduduk setempat atau siapa saja yang membutuhkan, dan hasilnya dibagi bersama. Selain mendapatkan hasil berupa materi atau uang, hal ini juga dapat mempererat persatuan diantara pemuda di kedua desa. Kenyataan ini menunjukkan adanya integrasi diantara mereka.

4. Pertanian

Dalam bidang pertanian, masyarakat Kecamatan Landono melakukan kerjasama pada saat mereka membuat pematang, mengolah sawah dan pengairannya. Mereka melakukan penanaman dan panen secara serempak sehingga bisa bersama-sama mencegah dan membasmi hama. Hal ini dilakukan agar mendapatkan hasil

panen yang maksimal dan juga dapat mempererat persatuan diantara warga di Kecamatan Landono. Kenyataan-kenyataan ini menunjukkan adanya integrasi diantara mereka (observasi).

Kegiatan lain dalam bidang pertanian yang dapat mengintegrasikan masyarakat di Landono adalah melalui penjualan hasil-hasil pertanian dan perkebunan. Seperti yang terjadi di desa Talumbinga, masyarakatnya menjual hasil pertanian dan perkebunannya seperti rambutan, jeruk, lada dan coklat kepada para tengkulak tanpa melihat etnis atau suku dan agama mereka. Interaksi yang tercipta menimbulkan rasa saling membutuhkan sama lain sehingga terjalin komunikasi dan silahturahmi. Para tengkulak ini juga sebagian tinggal dan menetap di desa Talumbinga dan sebagian besar berasal dari desa lain di sekitarnya dan bahkan ada yang dari kota Kendari dan Surabaya. (observasi)

Selain itu adanya pembebasan lahan warga masyarakat asli Tolaki dengan ganti rugi yang relatif ringan untuk petani di desa Watabenua yang penduduknya kebanyakan dari warga pendatang asal Bali dan Jawa dalam pembuatan bendungan atau yang biasa disebut ‘pelimpahan’ oleh penduduk setempat untuk pengairan di sawah mereka, membuat proses integrasi diantara mereka pun semakin kental. Sebab masyarakat transmigran merasa berutang budi pada masyarakat asli Tolaki, begitupun masyarakat asli Tolaki merasa senang dengan adanya bendungan yang bisa juga mereka manfaatkan untuk sawah dan kebun mereka.

5. Olah raga

Dalam bidang olah raga, sering juga ditemui masyarakat yang melakukan interaksi diantara mereka tanpa melihat perbedaan suku, agama dan ras. Hal ini tampak menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia setiap tahunnya. Mereka mengadakan pertandingan menjelang 17 agustus-an, kemudian lewat pertandingan olah raga baik itu bola kaki, bola volley, sepak takraw, tarik tambang, dan kasti, mereka lakukan dengan sportifitas dan semangat kekeluargaan. Mereka berkumpul dalam satu lapangan, saling memberi semangat dan penontonnya saling berkenalan satu sama lain dan yang telah saling mengenal melalui kegiatan tersebut saling menyebarkan tali silahturahmi sehingga mempererat integritas mereka lewat adanya komunikasi yang baik diantara mereka.

Selain itu, di Kecamatan Landono setiap desanya memiliki kepengurusan karang taruna masing-masing. Lewat organisasi karang taruna tersebut, mereka sering mengadakan pertandingan persahabatan dalam bidang olah raga dengan menggilir desa yang menjadi tuan rumah. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa bidang olah raga juga menjadi pendorong integrasi sosial masyarakat di Kecamatan Landono.

6. Pendidikan

Integrasi sosial masyarakat Kecamatan Landono juga di dorong lewat bidang pendidikan, justru dunia pendidikanlah yang merupakan salah satu tempat penting pelaksanaan proses integrasi masyarakat Landono. Lewat sekolah, masyarakat berinteraksi tanpa adanya perbedaan agama dan etnis, baik antara sesama guru, sesama murid, guru dan murid, serta guru dan orang tua murid. Interaksi diantara

mereka membuat mereka saling mengenal satu sama lain, saling berbagi masalah yang menjadi kendala pihak sekolah dan tentu saja melibatkan orang tua murid yang latar belakang agama, etnis, dan tingkat sosial yang berbeda-beda. Para murid pun sudah terbiasa sejak dini dengan perbedaan diantara mereka sehingga sentiment-sentimen etnis tidak terjadi. Adanya interaksi dan komunikasi yang baik lewat dunia pendidikan mendorong percepatan proses integrasi masyarakat Kecamatan Landono.

7. Keamanan

Dalam bidang keamanan, masyarakat Kecamatan Landono melakukan ronda malam dengan mengaktifkan kegiatan ronda, dimana untuk menjaga keamanan masing-masing desa para kepala desa membuat jadwal dengan melibatkan para kepala dusun dalam pengaturan giliran masing-masing warganya. Bagi warga yang tidak melaksanakan ronda diwajibkan untuk membayar iuran keamanan yang digunakan para kepala dusun untuk membeli rokok dan kopi bagi yang melaksanakan ronda atau jaga malam. Ronda malam ini dilaksanakan mulai jam delapan malam sampai jam lima subuh. Kebanyakan melaksanakan setelah shalat isya dan pulang sebelum shalat subuh. Pelaksanaannya di pos kamling masing-masing dusun lalu dilakukan dua kali keliling kampung untuk mengecek keamanan kampung. Kebanyakan dari orang-orang yang melakukan ronda mengisi waktunya dengan bermain kartu (domino) untuk menghindari ngantuk. (observasi)

Walaupun demikian jadwal pelaksanaan dari masing-masing desa berbeda-beda, ada yang melaksanakan ronda malam setiap malam dengan menggilir warga

seperti di desa Tidana Mulya seperti yang diungkapkan Muhamad Syafi'i, Kepala Desa Tridana Mulya berikut :

> Kami melakukan ronda malam setiap hari dengan menggilir warga. Jadi tiap warga mendapat giliran satu kali seminggu tiap-tiap dusun. Satu pos ronda kami tempatkan antara 5 sampai 6 orang. Kegiatan ronda ini semakin intens menjelang PEMILUKADA Konawe Selatan kemarin untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan (wawancara, senin 7 juni 2010).

Hal yang sama diungkap oleh sebagian besar kepala desa di Kecamatan Landono, mereka intens melaksanakan ronda setiap malam menjelang PEMILUKADA namun setelah berakhirnya pesta rakyat tersebut, mayoritas desa melaksanakan ronda sekali seminggu seperti yang diungkapkan Kusdianto yaitu Kepala Desa Morini Mulya (wawancara, 7 juni 2010). Walaupun demikian, ada juga desa yang sudah tidak melaksanakan ronda dengan alasan bahwa desanya merupakan daerah yang cukup aman namun para kepala desa masing-masing berjanji akan mengaktifkan kembali secepatnya kegiatan tersebut di daerahnya.

Lain lagi yang terjadi di Talumbinga, dimana PEMILUKADA sama sekali tidak berpengaruh terhadap kegiatan ronda ini seperti diungkapkan kepala desanya, Jasmani :

> Kami melaksanakan ronda setiapa malam dari dulu sampai sekarang dan itu merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh warga tanpa melihat suku dan agama. Sebab desa Talumbinga merupakan desa yang sangat majemuk disini ada Tolaki, Bali, Jawa, Bugis, Buton, Muna dan semua warga harus ikut. Di desa ini memiliki 4 pos ronda dan setiap malam harus diisi oleh 5-7 orang per posnya. (wawancara, 7 Juni 2010)

Adanya ronda malam membuat masyarakat Kecamatan Landono memiliki nilai solidaritas dalam menjaga keamanan kampung masing-masing. Nilai solidatitas

tersebut mengikis sekat etnis dan agama yang ada di masyarakat Kecamatan Landono sehingga mereka dapat terintegrasi dengan baik.

8. Sosial Budaya

Bentuk integrasi sosial budaya warga Kecamatan Landono dapat dilihat dari kegiatan kemasyarakatan yang ada. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain, gotong royong, kegiatan kerja bakti dan menjaga kebersihan lingkungan. Keterlibatan masyarakat secara bersama-sama dalam kegiatan gotong royong ini, merupakan sarana integrasi masyarakat. Tradisi gotong royong telah menjadi wadah yang bisa menampung aktivitas antar warga, sehingga masyarakat di Kecamatan Landono dapat saling berinteraksi.

Dengan adanya hubungan interaksi sosial dalam hal gotong royong, diantara masyarakat asli dan pendatang yang sudah sangat baik dalam pola kemasyarakatan yang terus berlanjut sehari-hari dalam kehidupan mereka, membuat mereka semakin mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya di sebabkan adanya hubungan timbal-balik yang bisa saling memberi dan menerima membuat masyarakat Kecamatan Landono lebih saling menghargai di tengah perbedaan. Perwujudan dari gotong royong itu sendiri adalah bukan merupakan hal baru bagi mereka tetapi dilakukan sejak dulu. Pada awal interaksi antara penduduk lokal dan warga transmigran di tahun 1970-an mereka sudah melakukannya dengan saling membantu, bahkan pada saat itu transmigran spontan yang belum difasilitasi oleh pemerintah diperkenankan tinggal dan bermukim di rumah masyarakat lokal, bersama-sama bergotong royong membuka jalan dan pasar (wawancara).

Semangat dan sifat kegotong-royongan masih bisa dijumpai di Kecamatan Landono, meskipun berbeda suku, agama dan adat. Wujud gotong royong yang masih dijumpai saat ini adalah melakukan kegiatan bakti sosial bersama-sama dengan seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Landono untuk membersihkan lingkungan rumah masing-masing, kegiatan ini biasa mereka lakukan pada hari jum'at. Sedangkan untuk sarana umum diberlakukan sistem bergilir, masing-masing dusun mendapat jatah satu kali satu minggu untuk membersihkan jalan atau lingkungan sarana fisik yang ada di desa masing-masing yang dikoordinir oleh kepala desa masing-masing (observasi).

Namun demikian dari wawancara beberapa sumber di ketahui bahwa walaupun semangat gotong-royong masih melekat pada masyarakat Kecamatan Landono namun sifat gotong-royongnya mulai sedikit demi sedikit terkikis akibat tingkat kesibukan masyarakat yang berbeda. Sebagian masyarakat yang merasa tingkat kesibukannya agak tinggi biasanya lebih memilih menyumbang materi ketika mereka merasa tidak mampu menyumbangkan tenaga. Biasanya dengan memberikan fasilitas yang dibutuhkan warga.

Hubungan sosial yang baik diantara masyarakat di Kecamatan Landono juga ditemukan dalam hubungan bertetangga. Untuk memperkuat rasa kebersamaan masyarakat Kecamatan Landono, interaksi sosial yang dilakukan dalam bertetangga tersebut antara lain dengan kunjungan ke tempat tetangga yang sedang sakit atau mendapat musibah, menghadiri undangan pernikahan, menghadiri yasinan dan acara-acara lain yang bisa mempererat hubungan ketetanggan (Wawancara). Tradisi saling mengundang inilah yang memberikan dampak keharmonisan dalam bertetangga.

Terlebih lagi hubungan ketetanggaan di Kecamatan Landono tidak didasarkan pada perkawinan, persamaan agama, dan suku, sehingga dapat diketahui melalui pola bertetangga, interaksi dengan masyarakat lain tidak mengalami perubahan yaitu interaksi mereka memungkinkan cepat akrab dengan masyarakat lain.

9. Upacara Siklus Hidup

Upacara siklus hidup yang dimaksud adalah peristiwa dalam kehidupan manusia yang dianggap penting yang meliputi kelahiran, perkawinan dan kematian. Upacara-upacara tersebut berdasarkan pada tradisi atau adat yang dianut oleh masyarakat dan bersumber pada ajaran agamanya masing-masing. Upacara yang demikian itu masih banyak dilakukan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Landono.

Disamping dalam upacara kematian dan perkawinan, hubungan antar umat beragama juga terjalin dengan baik pada upacara kelahiran (aqiqah), sunatan, keberangkatan dan kepulangan menunaikan ibadah haji, dan upacara hajatan yang lain. Hubungan-hubungan tersebut tanpa dibatasi oleh adanya perbedaan suku, budaya dan agama diantara mereka.

Selain itu pada kegiatan pesta atau hajatan, hampir sebagian besar masyarakat belum mengenal tenda besi. Mereka bekerja sama dalam membuat tenda dengan menggunakan bambu atau dolken (kayu berukuran sedang), tanpa memandang perbedaan suku, agama dan budaya asalkan mereka saling mengenal dan masih berada dalam lingkungan yang sama.

Apalagi dalam kegiatan kedukaan. Karena menurut mayoritas warga Kecamatan Landono, kalau ada masyarakat yang meninggal, tanpa dipanggil pun mereka berbondong-bondong datang membantu mendirikan tenda untuk para pelayat tanpa diminta atau diperintah juga tanpa melihat dia beragama dan beretnis apa. Ini sudah menjadi tradisi masyarakat Kecamatan Landono dalam bertetangga, bahwa kedukaan merupakan Kegiatan ini membantu mempercepat proses integrasi dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Landono.

Berikut disajikan dalam tabel faktor pendorong integrasi masyarakat di Kecamatan Landono

Tabel 14
Faktor Pendorong Integrasi Sosial Masyarakat Kecamatan Landono

No	Faktor Pendorong	Deskripsi	Keterangan
1.	Perkawinan campur	- Antar etnis/ suku - Antar agama (dengan latar belakang agama yang berbeda lalu bersepakat dengan sukarela dan tanpa paksaan untuk memeluk salah satu agama)	Berjalan baik dan mempercepat proses integrasi masyarakat
2.	Acara Keagamaan	- Kunjungan silaturahmi dalam rangka hari besar keagamaan seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Kuningan dan Galungan. - Pelaksanaan halal bi-halal yang dilaksanakan setelah pelaksanaan perayaan Idul Fitri, Natal bersama, dan perayaan Dharma Shanti yang dilakukan setelah hari raya Nyepi. Perayaan-perayaan ini mengundang pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat juga masyarakat disekitar tempat pelaksanaan.	Menambah keakraban dan kerukunan hidup beragama dalam masyarakat Kecamatan Landono
3.	Ekonomi	➢ Masyarakat melakukan jual beli tanpa membedakan suku, agama dan budaya masyarakat semuanya berbaur dalam perasaan saling membutuhkan, dimana pedagang membutuhkan pembeli begitupun sebaliknya.	Kegiatan ini mengikat masyarakat Landono menjadi satu kesatuan tanpa diskriminasi etnis dan agama,

Lanjutan Tabel 14
Faktor Pendorong Integrasi Sosial Masyarakat Kecamatan Landono

No	Faktor Pendorong	Deskripsi	Keterangan
		➢ Kegiatan barter sesama warga dengan menukarkan hasil kebun berupa buah-buahan atau sayur-sayuran dengan beras. ➢ Adanya koperasi serba usaha "Hiksa Jaya" yang anggotanya terdiri dari bermacam-macam etnis dan agama di desa Sabulakoa, begitupun KSU "Budi Luhur" yang ada di desa Tridana Mulya. ➢ Di Desa Lalonggapu, ibu-ibu dasawisma membentuk arisan yang memiliki uang jimpitan, lalu uang tersebut diputar kepada anggota yang membutuhkan dan diberi bunga yang relatif rendah kemudian keuntungan dibagi bersama kepada seluruh anggotanya yang terdiri atas berbagai etnis dan agama. ➢ Di Desa Sabulakoa dan Tetenggabo. Masyarakat memiliki jasa penyebrangan bersama dengan menggunakan rakit melalui sungai Konaweha dari desa mereka ke Kabupaten Konawe. Mereka melayani penduduk setempat atau siapa saja yang membutuhkan, dan hasilnya dibagi bersama.	mereka saling mengenal satu sama lain dan saling berinteraksi sehingga mempercepat proses integrasi di dalam masyarakat
4.	Pertanian	➢ Masyarakat Kecamatan Landono melakukan kerjasama pertanian dengan bergotong royong dalam membuat pematang, mengolah sawah dan pengairannya. Mereka melakukan penanaman dan panen secara serempak sehingga bisa bersama-sama mencegah dan membasmi hama. Hal ini dilakukan agar mendapatkan hasil panen yang maksimal dan juga dapat mempererat persatuan diantara warga di Kecamatan Landono. ➢ Dalam jual beli hasil pertanian, masyarakat menjual hasil pertanian dan perkebunannya seperti rambutan, jeruk, lada dan coklat kepada para tengkulak tanpa melihat etnis atau suku dan agama mereka. Interaksi yang tercipta menimbulkan rasa saling membutuhkan sama lain sehingga terjalin komunikasi dan silahturahmi.	Kenyataan-kenyataan ini mendorong proses integrasi diantara masyarakat Kecamatan Landono

Lanjutan Tabel 14
Faktor Pendorong Integrasi Sosial Masyarakat Kecamatan Landono

No	Faktor Pendorong	Deskripsi	Keterangan
		➢ Adanya pembebasan lahan warga masyarakat asli Tolaki dengan ganti rugi yang relatif ringan untuk petani di desa Watabenua yang penduduknya kebanyakan dari warga pendatang asal Bali dan Jawa dalam pembuatan bendungan atau yang biasa disebut 'pelimpahan' oleh penduduk setempat untuk pengairan di sawah mereka.	
5.	Olah raga	❖ Adanya pertandingan olah raga baik itu bola kaki, bola volley, sepak takraw, tarik tambang, dan kasti, mereka lakukan dengan sportifitas dan semangat kekeluargaan menjelang perayaan kemerdekaan 17 agustus-an. Mereka berkumpul dalam satu lapangan, saling memberi semangat dan penontonnya saling berkenalan satu sama lain dan yang telah saling mengenal melalui kegiatan tersebut saling menyebarkan tali silahturahmi sehingga mempererat integritas mereka lewat adanya komunikasi yang baik diantara mereka. ❖ Adanya kepengurusan karang taruna masing-masing desa. , dimana mereka sering mengadakan pertandingan persahabatan dalam bidang olah raga dengan menggilir desa yang menjadi tuan rumah.	Mereka berkumpul dalam satu lapangan, saling memberi semangat dan saling berkenalan satu sama lain, menyebarkan tali silahturahmi dan mendorong integrasi sosial diantara mereka.
6.	Pendidikan	Lewat dunia pendidikan (sekolah) masyarakat saling mengenal satu sama lain, saling berbagi masalah yang menjadi kendala pihak sekolah dan tentu saja melibatkan orang tua murid yang latar belakang agama, etnis, dan tingkat sosial yang berbeda-beda. Para murid pun sudah terbiasa sejak dini dengan perbedaan diantara mereka sehingga sentiment-sentimen etnis tidak terjadi.	Adanya interaksi dan komunikasi yang baik lewat dunia pendidikan mendorong percepatan proses integrasi masyarakat Kecamatan Landono.
7.	Keamanan	Diadakannya Ronda malam dengan menggilir warga tanpa membedakan etnis, agama dan ras	Masyarakat terintegrasi lewat perasaan senasib dan sepenanggungan dalam menjaga keamanan desa

Lanjutan Tabel 14
Faktor Pendorong Integrasi Sosial Masyarakat Kecamatan Landono

No	Faktor Pendorong	Deskripsi	Keterangan
8.	Sosial Budaya	Digalakkannya kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan antara lain, gotong royong, kerja bakti dan menjaga kebersihan lingkungan.	Kegiatan ini merupakan sarana yang baik dalam mengintegrasikan masyarakat.
9.	Upacara Siklus Hidup	Dalam upacara kelahiran, perkawinan dan kematian. Masyarakat bekerja sama dalam membuat tenda dengan menggunakan bambu atau dolken (kayu berukuran sedang), tanpa memandang perbedaan suku, agama dan budaya asalkan mereka saling mengenal dan masih berada dalam lingkungan yang sama.	Menimbulkan semangat kekeluargaan di dalam masyarakat

Sumber : Hasil analisis observasi dan wawncara, 2010

3. Faktor Penghambat Integrasi Sosial Masyarakat Kecamatan Landono

Bertitik tolak dari konsep yang dikemukakan Blau (1977) tentang konsep integrasi masyarakat majemuk, dimana semakin besar jumlah kelompok-kelompok etnis dalam sebuah komunitas, maka semakin besar heterogenitas etnis atau horisontal diferensiasinya maka pemukiman transmigrasi dapat merupakan *melting pot* (tempat dapur) beraneka ragamnya etnis, begitupun yang terjadi di Landono yang sebagian wilayahnya di huni oleh masyarakat transmigran dan pendatang lain.

Adanya kemajemukan mau tidak mau sekaligus juga membawa serta perbedaan di tengah masyarakat. berhasil tidanya masyarakat majemuk berintegrasi merupakan pilihan dari masyarakat itu sendiri untuk saling menyesuaikan dan menjadikan perbedaan sebagai rahmat bukan sebagai masalah untuk dipersoalkan. Berikut adalah bagaimana masyarakat Kecamatan Landono menyikapi persaingan,

kontraversi dan konflik dalam kesehariannya, yang tergambar pada pola hidup mereka dalam bermasyarakat.

1. Persaingan atau Competition

Pada masyarakat Kecamatan Landono, persaingan merupakan hal yang lumrah terjadi namun tidak menyebabkan masyarakatnya menjadi disharmonis, justru dengan adanya persaingan ini masyarakat Landono menjadi lebih baik taraf hidupnya, pendidikannya dan toleransi bermasyarakatnya. Persaingan dalam masyarakat Kecamatan Landono merupakan pola persaingan sehat dalam arti negatif, tidak merusak dan mengganggu integrasi masyarakatnya. Mayoritas masyarakat menganggap hal ini merupakan hal sepele yang tidak perlu dibesar-besarkan. Namun demikian persaingan atau competition ini harus diwaspadai menjurus kearah yang mampu merusak disintegrasi masyarakat Kecamatan Landono itu sendiri.

a. Persaingan Ekonomi

Persaingan ekonomi merupakan realitas yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Landono, namun persaingan ekonomi ini belum menimbulkan kesenjangan yang besar diantara masyarakat Kecamatan Landono. Ini disebabkan oleh kebanyakan masyarakat yang tinggi tingkat ekonominya mempunyai rumah yang sederhana di desanya dan mereka membangun rumah yang lebih besar di sekitar jalan poros atau jalan utama yang memang mayoritas penduduknya memiliki rumah dengan tipe dan model yang relatif sama. Kebanyakan mereka membeli tanah para masyarakat asli Tolaki Landono kemudian membangun rumah dan masyarakat asli

Tolaki Landono pun kebanyakan setelah menjual tanah, mereka mendirikan rumah yang lebih besar.

Sepintas lalu ini merupakan hal yang wajar, namun apabila ini berlangsung secara terus-menerus maka para masyarakat asli Tolaki Landono akan semakin tergeser dan lahannya akan semakin sempit sementara mereka akan terus beranak cucu. Kondisi yang demikian bisa menyebabkan rusaknya integrasi diantara masyarakat asli dan pendatang dengan timbulnya kecemburuan sosial. Hal ini tentu saja belum terjadi saat ini, namun jika hal ini berlangsung terus dan pola hidup masyarakat asli Tolaki Landono tidak berubah maka suatu saat persaingan ekonomi akan memberi efek negatif bagi kelangsungan hidup bermasyarakat di Kecamatan Landono.

b. Persaingan Kebudayaan

Persaingan kebudayaan disini meliputi persaingan dalam bidang keagamaan dan pendidikan. Dalam bidang keagamaan, persaingan ini memberi efek positif pada masyarakat, yaitu masyarakat berupaya dalam memperbaiki sarana peribadatan masing-masing dan berupaya menggiatkan ritual-ritual keagamaan di masing-masing desa sebab enggan dikatakan ketinggalan dari desa lain. Mereka mengadakan majelis ta'lim, taman pengajian Al-Qur'an (TPA), yasinan, kebaktian untuk yang beragama Kristen dan sembahyang bersama di Pura bagi yang beragama Hindu.

Kegiatan yasinan dilakukan masyarakat tiap hari kamis malam dengan melakukan giliran dari rumah kerumah, sedangkan majelis ta'lim dilakukan tiap hari jum'at sore di mesjid masing-masing. Untuk TPA dilaksanakan setiap sore oleh anak-

anak tiap sore di mesjid atau mushallah terdekat. Namun di beberapa desa TPA-nya dilakukan di rumah guru mengajinya langsung.

Untuk yang beragama Kristen, mereka membentuk lingkungan (kring) yang bertujuan untuk menyadarkan umat di suatu wilayah sebagai bagian dari gereja serta untuk mempermudah komunikasi antar umat dalam melaksanakan kegiatan peribadatan. Mereka mengadakan kebaktian setiap hari sabtu dari rumah ke rumah. Kadang kala apabila ada yang mempunyai hajatan di rumah salah seorang jemaat yang hampir berdekatan harinya maka mereka menggeser kegiatan hari sabtu tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama. Kebaktian ini biasanya dipimpin oleh seorang pendeta. Di Kecamatan Landono terdapat 3 orang pendeta yang melayani 3 gereja. Masyarakat yang beragama Kristen tersebar di desa Tridana Mulya, Abenggi dan Watabenua.

Untuk umat Hindu, mereka mengadakan sembahyang bersama di Pura setiap 15 hari, yaitu pada saat bulan mati dan bulan purnama. Selain itu mereka melakukan odalan setahun sekali namun perhitungan tahunnya bukan berdasarkan tahun masehi yang satu bulan terdiri dari 30-31 hari, namun dalam 1 bulan mereka hitung selama 35 hari. (wawancara)

Pada saat ini persaingan antar umat beragama tidak terdapat di Kecamatan Landono, masyarakatnya bebas menjalankan aktifitas keagamaannya dengan toleransi yang tinggi. Yang perlu diwaspadai adalah munculnya fanatisme berlebihan dari salah satu agama yang dapat mengancam kehidupan antar umat beragama di Kecamatan Landono.

Dalam bidang pendidikan, masyarakat berlomba-lomba menyekolahkan anaknya kesekolah yang lebih tinggi karena masyarakat Kecamatan Landono telah menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka.

c. Persaingan Kedudukan

Persaingan kedudukan adalah merupakan keinginan seseorang untuk lebih diterima dan diakui dalam masyarakat. Persaingan ini secara realitas tergambar pada saat pemilihan kepala desa. Walaupun demikian persaingan ini tidak menimbulkan disintegrasi dalam masyarakat Kecamatan Landono. Riak-riak ketegangan dalam pemilihan Kepala Desa adalah hal wajar bagi masyarakat. setiap warga pasti menginginkan jagoannya yang menang namun demikian ketika hasil telah diputuskan masyarakat langsung bersatu padu mendukung siapa pun yang terpilih. Sikap sportif yang ditunjukkan oleh masyarakat Kecamatann Landono semakin mempererat integrasi sosial di daerah tersebut. (wawancara)

d. Persaingan Ras

Persaingan ras dalam arti yang positif diperlukan untuk melestarikan budaya asli masing-masing etnis sebagai satu kekayaan bangsa, namun demikian dapat juga memberi efek yang negatif bila masyarakat saling mengagung-agungkan etnisnya dan menganggap etnis lain lebih rendah. Persaingan ras dalam arti yang negatif tersebut tidak ditemui dalam masyarakat Kecamatan Landono. Semua masyarakat menganggap bahwa etnis atau ras masing-masing memiliki kelebihan sendiri sehingga tidak pantas dibandingkan antara satu sama lain. Walaupun demikian, mayoritas masyarakat Kecamatan Landono masih memiliki identitas etnis yang ada disana sehingga tanpa menyebutkan suku, identitas etnis tersebut bisa langsung

terbaca. Identitas etnis bisa diketahui dari cara masyarakat berbicara baik itu masyarakat asli Tolaki, Jawa-Bali, buton, Bugis, Toraja ataupun Makassar. Dari logat bahasa mereka dapat langsung diidentifikasi suku bangsa masyarakatnya. Walaupun mereka sudah lama berbaur satu sama lain namun logat bahasa masyarakat Kecamatan Landono masih kental dengan etnis masing-masing. Adanya identitas etnis dari segi logat bahasa tidak menimbulkan pengaruh negatif bagi masyarakat Kecamatan Landono.

2. Kontraversi

a. Kontraversi Antar Generasi

Kontraversi antar generasi wajar tejadi, sebab perkembangan zaman terus merangkak maju, setiap tahun terjadi perubahan, bahkan pola pendidikan pun mengalami pergeseran. Pengetahuan tentang pola hidup, pertanian, teknologi dan komunikasi mengalami kemajuan pesat. Apa yang dianggap tabu oleh orang-orang terdahulu sekarang sudah dianggap biasa, sehingga perbedaan pendapat dan pandangan oleh generasi terdahulu dan sekarang sering terjadi. Kalau dulu mengeluarkan pendapat dilakukan dengan sopan, santun dan memikirkan kadar ketersinggungan orang lain maka saat ini hal itu telah mengalami pergeseran dimana mengeluarkan pendapat identik dengan penghujatan dan penghakiman.

Pergeseran-pergeseran semacam itu belum nampak di Kecamatan Landono. Masyarakatnya masih hidup dalam kondisi mewarisi pola-pola hidup masyarakat yang sopan, santun dan memiliki penghargaan kepada orang lain. Namun demikian, hal yang perlu diwaspadai adalah masuknya perubahan-perubahan tersebut di dalam

kehidupan masyarakat yang di bawa oleh generasi muda Kecamatan Landono yang melanjutkan sekolahnya di luar Kecamatan Landono. Hal tersebut bukan tidak mungkin akan membawa perubahan pada pola tingkah laku masyarakat dan akhirnya menggeser nilai-nilai baik yang selama ini berkembang di masyarakat sehingga berefek pada integrasi masyarakat Kecamatan Landono.

b. Kontraversi Seks

Kontraversi seks biasa dikenal dengan kesetaraan gender. Namun dalam masyarakat Kecamatan Landono, sebagian besar belum faham tentang apa itu kesetaraan gender. Kontraversi ini menyangkut tentang pembagian tugas dalam berumah tangga. Realitas yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Landono pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan cenderung konvensional. Dimana laki-laki bertugas mencari nafkah dan perempuan mengurus rumah dan anak-anak. Kondisi seperti ini menempatkan masyarakat Kecamatan Landono dalam kondisi yang stabil, pertengkaran suami istri jarang terjadi, pembagian kerja jelas, hubungan kekerabatan kental dan minimnya tingkat perceraian (wawancara).

c. *Kontraversi Parlementer*

Kontraversi parlementer tidak ditemui di Kecamatan Landono, sebab kontraversi ini terjadi akibat adanya mayoritas dan minoritas dalam masyarakat. perbandingan antara masing-masing etnis yang hamper sama dimana pendatang dan penduduk asli Tolaki Landono adalah 55% dan 45% membuat kontraversi ini kemungkinan kecil terjadi. Keadaan masyarakat yang relatif seimbang tersebut menumbuhsuburkan integrasi sosial dalam masyarakat sebab tidak ada yang mendominasi.

3. Konflik

Dalam kasus-kasus konflik yang terjadi di daerah yang sering terjadi konflik kekerasan, tidak dipungkiri bahwa dengan meningkatnya heterogenitas etnis dapat menimbulkan masalah timbulnya gangguan dalam antara kelompok etnis, kadang-kadang menjurus ke konflik terbuka, terutama dalam konflik tersebut berkaitan dengan masalah perbedaan sikap dan pandangan terhadap kelompok etnis lainnnya. Dalam konflik tersebut tidak jarang diaktifkannya kesukubangsaan dan *steriotife* etnik negatif, yang pada hakekatnya bersumber dari identitas yang dimiliki masing-masing etnis.

Bagi masyarakat Kecamatan Landono pada umumnya, konflik adalah merupakan peristiwa luar biasa yang dapat merusak tatanan hidup bermasyarakat yang patut dihindari, tabu dan dapat mengganggu keharmonisan hidup antar masyarakat di Kecamatan landono. Konflik yang dipahami oleh masyarakat merupakan konflik yang membawa kekerasan dan bentrok fisik, oleh karena itu perlu segera diakhiri dan diselesaikan (wawancara). Pandangan masyarakat Kecamatan Landono terhadap konflik ini juga telah diungkap oleh Sutaryo tentang beberapa mitos masyarakat tentang konflik (2000 : 246).

Dari pandangan masyarakat tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat Kecamatan Landono menganggap bahwa konflik merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kelangsungan proses integrasi di dalam masyarakat Kecamatan Landono yang selama ini berjalan sangat baik. Mereka mengambil pengalaman masa lalu sebagai pelajaran yang sangat berharga di dalam kehidupan mereka lewat kasus Amotowo dan Sabulakoa. Meskipun konflik ini tidak menyebabkan konflik

horizontal yang lebih besar di dalam masyarakat, namun menyebabkan kerugian bagi masyarakat dengan adanya korban dan ketegangan yang walaupun cuma berlangsung dalam 1-2 hari namun mampu mengganggu proses bersosial masyarakat baik itu ke sawah, ke pasar maupun aktifitas warga yang lain.

Dari peristiwa inilah masyarakat Kecamatan Landono menganggap bahwa konflik tidak membawa keuntungan bagi mereka namun menyebabkan kerugian dengan terciptanya suasana yang tidak harmonis diantara masyarakat. Ketidakharmonisan yang berlangsung lama dalam masyarakat merupakan hal yang dapat merusak integrasi di dalam masyarakat (wawancara).

Dalam upaya penyelesaian konflik pada masyarakat asli Tolaki di Kecamatan Landono, hal yang dianggap sangat tepat adalah dengan menggunakan adat lokal atau kearifan lokal karena selama ini sudah membudaya dalam masyarakat. Oleh karena kearifan lokal adalah sesuatu yang sudah mengakar dan biasanya tidak hanya berorientasi profan semata, tetapi juga berorientasi sakral sehingga pelaksanaannya bisa lebih cepat dan mudah diterima oleh masyarakat. Dengan adat lokal ini diharapkan resolusi konflik bisa cepat terwujud, bisa diterima semua kelompok sehingga tidak ada lagi konflik laten yang tersembunyi dalam masyarakat. Untuk penyelesaian konflik berdasarkan kearifan lokal pada masyarakat tolaki digunakan *"kalosara"*.

Menurut Laduma, seorang tokoh adat masyarakat Tolaki di Landono :

> *Kalosara* merupakan simbol tertinggi dalam masyarakat tolaki sejak dahulu hingga saat ini juga merupakan lambang pemersatu dan perdamaian yang sangat sakral dalam kehidupan suku tolaki. Kalosara merupakan symbol kekeluargaan dan digunakan sebagai alat perdamaian dalam menyelesaikan salah faham dalam masyarakat. Rotan sebagai bahan kalo dengan sehelai daun

> sirih dan pinang adalah untuk mengingatkan orang tolaki agar hidup rukun dan bekerjasama dengan orang lain, tolong menolong, terjalin suatu persekutuan hidup yang damai dan tenteram, terhindar dari perselisihan memperingatkan seseorang agar didalam hidupnya selalu berguna, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain (wawancara).

Kalosara juga merupakan simbol kepatuhan masyarakat kepada pemerintah. Pada penyelesaian kasus Amotowo dan Sabulakoa, kalosara juga digunakan dalam penyelesaian masalah yang melibatkan pemerintah setempat dan para tokoh adat dan agama. Proses penyelesaian konflik yang cepat disebabkan oleh kesadaran masyarakat terhadap makna dari *kalosara*. Risman Bumbung yang turut dalam penyelesaian masalah tersebut mengatakan :

> Penyelesaian masalah yang ada di Sabulakoa tersebut juga dikarenakan sikap keluarga korban yang beretnis Tolaki, yang sangat menjunjung tinggi kesakralan *kalosara* yang di bawa oleh pihak tersangka yang beretnis Bugis melalui tokoh adat tolaki setempat. Sudah tradisi yang lazim dalam masyarakat, bahwa sepanas apapun kondisi psikologis seseorang ketika dihadapkan oleh adat *(kalosara)* maka semua masalah dapat diselesaikan lewat proses musyawarah untuk mencari penyelesaian terbaik. Apalagi *Kalosara* juga merupakan simbol kepatuhan masyarakat terhadap pemerintahnya.

Sementara di dalam masyarakat Bali yang ada di Kecamatan Landono, terdapat kearifan lokal yang sudah ada sejak dahulu dan masih terpelihara sampai sekarang yaitu *menyama braya*. Dimana setiap permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan diantara mereka. Tradisi dan kearifan lokal yang masih ada serta berlaku di masyarakat, berpotensi untuk dapat mendorong keinginan hidup rukun dan damai. Hal itu karena kearifan tradisi lokal pada dasarnya mengajarkan perdamaian dengan sesamanya, lingkungan, dan Tuhan. Apabila konflik terjadi antara mereka dengan masyarakat lokal (Tolaki) maka mereka pun menyelesaikannya sesuai dengan

adat-istiadat setempat. Hal ini diungkapkan salah satu Ketua Adat Bali di Kecamatan Landono, Ketut Simir :

> Penyelesaian masalah diantara kami sesama orang Bali dilakukan secara kekeluargaan baik itu di tingkat lingkungan, dusun dan desa. Semua masalah dapat diselesaikan lewat rapat kampung, kalau masalahnya menyangkut pidana maka kami melibatkan pemerintah dalam hal ini kepolisian, karena hal itu di luar kewenangan kami. Kalau dengan penduduk asli kami tidak pernah ada masalah, selama ini baik-baik saja. Kalaupun ada, hal ini terkait perkawinan silang antara suku Bali dan Tolaki. Pada proses penyelesaiannya kami harus mengikuti cara penyelesaian yang biasa dilakukan oleh suku Tolaki dengan menggunakan kalosara. Karena kami sangat sadar bahwa penduduk disini sangat menjunjung tinggi adatnya.

Menurut Korten (1985 : 14) cara penyelesaian konflik lebih tepat jika menggunakan model-model penyelesaian yang disesuaikan dengan kondisi wilayah serta budaya setempat. Ideal apabila penyelesaian tersebut dilakukan atas inisiatif penuh dari masyarakat bawah yang masih memegang teguh adat lokal serta sadar akan pentingnya budaya lokal dalam menjaga dan menjamin keutuhan masyarakat. Begitupun yang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Landono, mereka lebih menyukai proses penyelesaian konflik lewat bahasa budaya karena dianggap lebih cepat, lebih mudah dan lebih sakral.

4. Upaya Peningkatan Integrasi Sosial Masyarakat Kecamatan Landono

Ditinjau dari aspek sosiologis suatu masyarakat tidak boleh dibayangkan sebagai keadaan yang tetap, tetapi sebagai proses, bukan sebagai obyek semu yang kaku tetapi sebagai aliran yang terus-menerus tanpa henti. Diakui bahwa masyarakat majemuk yang terdapat di Kecamatan Landono hanya dapat dikatakan ada sejauh dan selama terjadi sesuatu di dalamnya, ada tindakan tertentu yang dilakukan, ada perubahan tertentu, dan ada proses tertentu yang senantiasa bekerja. Secara singkat

dapat dikatakan bahwa masyarakatnya secara terus-menerus mengalami perubahan sesuai dengan berubahnya tuntutan dan kebutuhan hidup masyarakatnya.

Semua realitas sosial yang terjadi di Kecamatan Landono senantiasa berubah dengan derajat kecepatan, intensitas, irama dan tempo yang berbeda. Sztompka (2007 : 9) mengatakan bahwa kehidupan adalah gerakan dan perubahan, dan bila berhenti berarti tidak ada lagi kehidupan melainkan suatu keadaan yang sama sekali berhenti yang disebut ketiadaan atau kematian. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa masyarakat tidak lagi dipandang sebagai sebuah sistem yang kaku atau "keras" melainkan dipandang sebagai antar hubungan yang "lunak" (Sztompka, 2007: 9-11). Dimana realitas sosial yang terjadi di Kecamatan Landono merupakan realitas hubungan antarindividu, segala hal yang ada di antara individu manusia, jaringan hubungan ikatan, ketergantungan, pertukaran dan kesetiakawanan sosial baik antara masyarakat asli tolaki dengan sesamanya, pendatang dengan sesama pendatang dan antara masyarakat asli tolaki Landono dengan pendatang.

Berdasarkan realitas sosial masyarakat yang selalu berubah tersebut maka perlu upaya peningkatan integrasi sosial dalam masyarakat agar kondisi sosial masyarakat yang selama ini dipenuhi rasa saling harga-menghargai dan kesetiakawanan di Kecamatan Landono tetap terjaga dan lestari secara horizontal masyarakat majemuk di Landono memiliki perbedaan suku bangsa, perbedaan agama dan adat. Kondisi masyarakat yang demikian, dapat menjadi bibit terciptanya konflik antar etnis dan agama. Hal ini didukung pula oleh kondisi ekonomi para pendatang yang cenderung lebih maju sehingga dapat menciptakan kecemburuan sosial dalam masyarakat Kecamatan Landono.

Solusi yang ditawarkan untuk meningkatkan integrasi sosial suatu masyarakat, yaitu dengan pendekatan toleransi sebagai nilai kebajikan dalam kehidupan bersama. Pendekatan toleransi merupakan pendekatan yang mudah diterima oleh semua kalangan di dalam masyarakat majemuk karena prinsip dasar beragama adalah toleransi yang cinta perdamaian dan anti kekerasan. Untuk membangun toleransi sebagai nilai kebajikan setidaknya ada dua modal yang dibutuhkan, yaitu : *Pertama*, toleransi membutuhkan interaksi sosial melalui percakapan dan pergaulan yang intensif. *Kedua*, membangun kepercayaan di antara masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan perbedaan lainnya. Secara umum, masyarakat Kecamatan Landono telah memiliki kedua modal awal terbangunnya toleransi diantara mereka. Namun, untuk terus meningkatkan integrasi diantara mereka tidak cukup dengan kedua modal tersebut, melainkan sangat diperlukan pengembangan pendekatan toleransi melalui dua pendekatan lainnya , yaitu pendekatan sistem sosial dan sistem budaya pada masyarakat.

Pendekatan sistem sosial dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan dengan melibatkan seluruh agama dan suku tanpa adanya diskriminasi. Sedangkan pendekatan sistem budaya, bilamana masyarakat majemuk dapat bersatu melalui penganutan nilai umum yang berlaku bagi semua anggota masyarakat. Nilai-nilai umum ini sebagai perekat bagi kelompok-kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai umum itu bersumber pada budaya dominan masyarakat majemuk yang menjadi acuan perilaku yang terpola. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan *kalosara* dalam penyelesaian konflik antar etnis di Kecamatan Landono.

Melalui kedua pendekatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan toleransi untuk meningkatkan integrasi sosial masyarakat. Tercapainya integrasi sosial memerlukan pengorbanan baik pengorbanan perasaan, maupun pengorbanan materil. Dasar dari pengorbanan adalah langkah penyesuaian antara banyak sekali perbedaan perasaan, keinginan, ukuran dan penilaian. Apabila pengorbanan dan toleransi dapat dicapai dalam bentuk konsensus, kemungkinan terjadinya integrasi tahap awal akan mulai nampak. Norma sosial sebagai acuan bertindak dan berprilaku dalam masyarakat akan memberikan pedoman untuk seorang bagaimana bersosialisasi dalam masyarakat.

Dalam rangka upaya meningkatkan integrasi sosial masyarakat Kecamatan Landono, dimana terciptanya kerukunan umat beragama, maka Kepala Kecamatan Landono menggelar sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada tahun 2009, seminggu setelah idul fitri yang sekaligus dirangkaikan dengan acara halal bi halal dan dihadiri sejumlah tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat se-Kecamatan Landono. Pemerintah selaku fasilitator dan dinamisator dengan tujuan utama adalah bagaimana mempertahankan persatuan dan kesatuan serta mewujudkan sistem politik yang demokratis untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, sebagai salah satu wujud pelaksanaan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hal ini tidak lain dilakukan untuk menghadapi berbagai ancaman situs terhadap integrasi sosial yang ditandai dengan berkembangnya gejala-gejala yang menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang terjadi dan dapat mengancam persatuan dan kesatuan masyarakat.

Menurut Camat Landono, Drs. Nahruddin “Pemerintah Kecamatan Landono berupaya agar suasana kerukunan kehidupan beragama ini harus berjalan dengan harmonis dan saling menghargai satu sama lain diantara masyarakat, oleh karena itu kegiatan sosialisasi yang dilakukan merupakan salah satu kepedulian Pemerintah Kecamatan Landono dalam hal pembinaan kerukunan kehidupan umat beragama,. Jangan sampai gara-gara masalah kecil yang terjadi antara sesama pemeluk agama menjadi pemicu terjadinya konflik antaragama yang ada”.

Fakta menjelaskan meskipun setiap agama mengajarkan tentang kedamaian dan keselarasan hidup, realitas menunjukkan pluralisme agama bisa memicu pemeluknya saling berbenturan dan bahkan terjadi konflik. Sementara di pihak lain, integrasi sosial keagamaan dapat terbangun jika pemeluk agama mampu mengekspresikan kebenaran agamanya secara universal dan inklusif, dalam arti subjektivitas kebenaran yang diyakini tidak menafikan kebenaran yang diyakini penganut agama yang lain. Oleh karena itu, tugas dan tanggung jawab pembinaan kerukunan umat beragama tidak semata-mata berada pada pemerintah namun merupakan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Landono. Sehubungan dengan hal tersebut, maka upaya pemantapan persatuan dan kesatuan nasional sebagaimana yang telah diamanatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain TAP MPR No. V/MPR/2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional, TAP MPR No. VII/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan, perlu terus-menerus ditingkatkan yang salah satunya melalui pemantapan kerukunan antar umat beragama. Hal tersebut perlu dikembangkan dan

ditingkatkan dalam upaya peningkatan kualitas pemahaman masyarakat tentang kerukunan umat beragama.

Tujuan khusus pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pemerintah Kecamatan Landono tersebut adalah untuk :

1. Memantapkan persatuan dan kesatuan Bangsa melalui peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama di Kecamatan Landono.
2. Mewujudkan kerukunan umat beragama melalui peningkatan pemahaman tentang toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama di Kecamatan Landono.

Tabel 15
Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Integrasi Sosial Masyarakat Kecamatan Landono

Tahun Pelak-sanaan	Nama Kegiatan	Pelaksana	Peserta	Tujuan	
					Khusus
2009	Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006	Pemerintah Kecamatan Landono	Tokoh Agama Tokoh Adat Tokoh Masyarakat	Dalam upaya mewujudkan sistem politik yang demokratis untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, sebagai salah satu wujud pelaksanaan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004	Memantapkan persatuan dan kesatuan Bangsa melalui peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama di Kecamatan Landono. Mewujudkan kerukunan umat beragama melalui peningkatan pemahaman tentang toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama di Kecamatan Landono.

Sumber : Wawancara, 2010

Masyarakat Kecamatan Landono merupakan contoh keberhasilan masyarakat yang mampu mengintegrasikan diri terhadap kemajemukan yang melekat padanya. Adanya kemampuan untuk mengkondisikan keragaman suku bangsa,

agama, adat dan kebiasaan menjadi sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan dalam berinteraksi di dalam masyarakat merupakan wujud dipedomaninya consensus dasar dalam berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila di Kecamatan ini. Keberhasilan toleransi bermasyarakat di Kecamatan Landono dalam menyatukan semua etnis dan agama dalam bingkai nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, membentuk masyarakat yang mempunyai kesamaan tujuan dan cita-cita. Adanya tujuan dan cita-cita yang sama menjadikan masyarakat Landono sebagai masyarakat yang homogen berdasarkan kesamaan consensus dasar, bukan lagi sebagai masyarakat yang heterogen karena tersimpul dalam satu nilai budaya yang sama yaitu budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kesamaan ini menciptakan rasa solidaritas yang tinggi pada masyarakat Kecamatan Landono yang tercermin dalam suasana rukun dan damai. Hal ini memberi kesan unik, seiring kian merebaknya konflik antar etnis di negeri ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi data hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik empat kesimpulan pokok sebagai berikut :

1. Masyarakat Kecamatan Landono yang merupakan pembauran antara masyarakat asli Tolaki Landono, transmigran asal Jawa-Bali dan pendatang lain merupakan perwujudan dari masyarakat majemuk yang memiliki keragaman etnis, agama, bahasa dan budaya. Di tengah perbedaan tersebut, masyarakat Kecamatan Landono mampu berintegrasi dengan baik lewat proses asimilasi dan akulturasi budaya. Sikap masyarakat asli Tolaki Landono yang sangat terbuka terhadap kedatangan para pendatang di daerahnya dan sikap lebih mengalah yang ditunjukkan oleh para pendatang semakin mempercepat proses integrasi diantara mereka.

2. Proses integrasi masyarakat majemuk di Kecamatan Landono di dukung oleh faktor-faktor sebagai berikut :

   a. Faktor budaya merupakan salah satu faktor pendukung proses integrasi sosial di dalam masyarakat majemuk. Nilai-nilai budaya yang bersumber dari akar kebudayaan bangsa yang tertuang dalam nilai-nilai Pancasila mampu mempersatukan perbedaan yang terdapat dalam masyarakat majemuk.

   b. Faktor kekerabatan menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan integrasi sosial pada masyarakat majemuk. Melalui perkawinan antar suku

bangsa yang berbeda, kekerabatan masyarakat Landono menjadi luas sehingga tercipta simpul-simpul yang mampu mengokohkan rasa kebersamaan di antara warga yang suku bangsanya berbeda.

c. Faktor kepatuhan masyarakat pada pejabat pemerintahan merupakan faktor lain yang mendukung integrasi sosial masyarakat majemuk di Kecamatan Landono. Dengan adanya kepatuhan masyarakat pada pemerintah maka setiap permasalahan yang dapat bersinggungan dengan keberadaan etnis tertentu dapat segera dinetralisir sehingga konflik horizontal dapat dicegah dengan mengintegrasikan masyarakat lewat kearifan lokal yang dibingkai oleh nilai-nilai luhur Pancasila sebagai *consensus* dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Masyarakat Landono menganggap konflik sebagai faktor penghambat dalam proses integrasi di daerahnya. Menurut mereka konflik adalah merupakan peristiwa luar biasa yang dapat merusak tatanan hidup bermasyarakat yang patut dihindari, tabu dan dapat mengganggu keharmonisan hidup antar masyarakat di Landono. Sementara persaingan dan kontraversi mereka anggap sebagai hal yang sanagat lumrah terjadi baik pada masyarakat homogeny apalagi pada masyarakat majemuk yang heterogen.

4. Upaya peningkatan integrasi sosial pada masyarakat Landono dilakukan dengan mengembangkan toleransi melalui pendekatan sistem sosial dan sistem budaya. Dalam rangka itu pemerintah Kecamatan Landono menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun

2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. Pemerintah selaku fasilitator dan dinamisator dengan tujuan utama adalah bagaimana mempertahankan persatuan dan kesatuan serta mewujudkan sistem politik yang demokratis untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, sebagai salah satu wujud pelaksanaan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004

B. Saran-Saran

Dengan tetap mengacu pada hasil penelitian ini, demi terciptanya integrasi dalam masyarakat yang majemuk, terciptanya keadaan yang kondusif, dan lebih memantapkan ko-eksistensi damai serta dapat mengukuh-kuatkan pilar-pilar harmonis antar masyarakat, maka:

Pertama, hendaknya semua komponen bangsa menunjukkan keterbukaan pandangan dalam menerima perbedaan dan keinginan untuk belajar memahami pihak lain yang berbeda suku, agama, bahasa dan juga adat dalam berinteraksi sosial. Perbedaan yang terdapat di dalam masyarakat majemuk merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak perlu dipersoalkan. Sebagai bangsa Indonesia hendaknya menerima kemajemukan sebagai kenyataan hidup yang tidak dapat dihindari serta menyadari sepenuhnya bahwa sikap hidup saling menghormati antar sesama dan menerima perbedaan baik suku, agama, bahasa dan ras merupakan bagian yang inheren dengan sila-sila Pancasila.

Kedua, hendaknya nilai-nilai luhur yang tertuang dalam Pancasila dikembangkan menjadi suatu kebiasaan dalam bermasyarakat dengan menjadikannya pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai luhur Pancasila merupakan

budaya bangsa yang mampu mengintegrasikan beranekaragam kebudayaan daerah di Indonesia. Selain itu, hendaknya untuk mendorong integrasi sosial masyarakat majemuk diperlukan pemimpin yang berfikiran pluralis sebab faktor kepatuhan masyarakat kepada pemerintah juga merupakan hal penting dalam mewujudkan masyarakat yang terintegrasi dengan baik.

Ketiga, hendaknya semua komponen bangsa menyadari bahwa konflik yang berujung kekerasan dan bentrok fisik yang disebabkan oleh suku, agama dan ras seharusnya dicegah, sebab dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Olehnya itu diperlukan sikap humanis, inklusif, dan pluralis dalam hidup bermasyarakat agar tercipta saling pengertian yang kental dan mendalam. Interaksi antarumat beragama perlu dikembangkan dan dipupuk secara lebih intensif dan komprehensif melalui pendekatan di berbagai aspek termasuk dalam menjaga hubungan harmonis yang selama ini sudah tercipta.

Keempat, dalam upaya meningkatkan integrasi masyarakat majemuk, hendaknya toleransi hidup bermasyarakat selalu menjadi pijakan dalam setiap sendi-sendi kehidupan baik dalam keluarga, tetangga, lingkungan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Harus selalu diingat bahwa toleransi merupakan nafas dari saling pengertian, saling menghargai, menghormati dan kerukunan hidup di dalam masyarakat.